



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.
3. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.

4. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
6. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
9. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
10. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
11. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
12. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
13. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
20. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Bupati adalah Bupati Bantul.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Pasal 2

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah menjadi pedoman dan arahan dalam:

- a. upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal; dan
- b. pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam upaya pencapaian SPM di Daerah.

Pasal 3

- (1) Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kondisi Umum Wilayah
 - c. BAB III : Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM

- d. BAB IV : Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM dan Permasalahan
 - e. BAB V : Rencana Aksi Penerapan SPM
 - f. BAB VI : Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM
 - g. BAB VII : Kesimpulan dan Saran
- (2) Rincian Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Desember 2022
BUPATI BANTUL,
ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 1 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 108



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 108 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2022-2026

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022-2026

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
BAB. I	I-1
1. 1. Latar Belakang.....	I-1
1. 2. Landasan Hukum	I-2
1. 3. Maksud dan Tujuan	I-3
1. 4. Ruang Lingkup	I-4
1. 5. Sistematika Rencana Aksi.....	I-5
BAB. II	II-7
2. 1. KONDISI GEOGRAFI	II-7
2. 2. KONDISI DEMOGRAFI.....	II-9
2. 2. 1. Komposisi Penduduk Menurut Kapanewon/ Kecamatan	II-9
2. 2. 2. Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia	II-11
2. 2. 3. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir.....	II-13
2. 3. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	II-14
2. 3. 1. Pertumbuhan PDRB	II-14
2. 3. 2. Indeks Gini	II-17
2. 3. 3. Kemiskinan.....	II-18
2. 3. 4. Angka Pengangguran Terbuka	II-19
2. 4. KONDISI PEMBANGUNAN MANUSIA	II-21
2. 4. 1. Indeks Pembangunan Manusia	II-21
2. 4. 2. Usia Harapan Hidup (UHH)	II-24
2. 4. 3. Angka Kematian Bayi	II-25
2. 4. 4. Angka Kematian Ibu.....	II-26
2. 4. 5. Angka Rata-rata Lama Sekolah	II-27
2. 4. 6. Angka Harapan Lama Sekolah	II-28
2. 4. 7. Pengeluaran Riil Per Kapita (PDRB ADHB per Kapita).....	II-29
BAB. III	III-33

3. 1.	KEBIJAKAN SPM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	III-33
3. 2.	KEBIJAKAN SPM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	III-35
3. 3.	KEBIJAKAN SPM DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL	III-36
3. 4.	KEBIJAKAN SPM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2021	III-37
3. 5.	KEBIJAKAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) di KABUPATEN BANTUL.....	III-40
3. 5. 1.	Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kerangka Pendanaan dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	III-40
3. 5. 2.	Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal	III-48
BAB. IV	IV-55
4. 1.	PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM DENGAN MELAKUKAN TELAAH TERHADAP PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026.....	IV-55
4. 1. 1.	Bidang Pendidikan	IV-55
4. 1. 2.	Bidang Kesehatan	IV-63
4. 1. 3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	IV-76
4. 1. 4.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	IV-91
4. 1. 5.	Bidang Sosial	IV-102
4. 2.	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	IV-112
4. 2. 1.	Bidang Pendidikan	IV-112
4. 2. 2.	Bidang Kesehatan	IV-112
4. 2. 3.	Bidang Pekerjaan Umum	IV-113
4. 2. 4.	Bidang Perumahan Rakyat.....	IV-113
4. 2. 5.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	IV-113
4. 2. 6.	Bidang Sosial	IV-114
BAB. V	V-115
5. 1.	STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENERAPAN SPM.....	V-115
5. 1. 1.	Bidang Pendidikan	V-115
5. 1. 2.	Bidang Kesehatan	V-115
5. 1. 3.	Bidang Pekerjaan Umum	V-116
5. 1. 4.	Bidang Perumahan Rakyat.....	V-116
5. 1. 5.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	V-117

5. 1. 6. Bidang Sosial.....	V-119
5. 2. RENCANA AKSI PENERAPAN SPM.....	V-120
5. 2. 1. Bidang Pendidikan.....	V-120
5. 2. 2. Bidang Kesehatan.....	V-124
5. 2. 3. Bidang Pekerjaan Umum.....	V-127
5. 2. 4. Bidang Perumahan Rakyat	V-132
5. 2. 5. Bidang Trantibumlinmas	V-134
5. 2. 6. Bidang Sosial.....	V-147
5. 3. INTEGRASI RENCANA AKSI PENERAPAN SPM KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN	V-152
5. 3. 1. SPM Bidang Pendidikan.....	V-152
5. 3. 2. SPM Bidang Kesehatan	V-164
5. 3. 3. SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	V-169
5. 3. 4. SPM Bidang Perumahan Rakyat	V-181
5. 3. 5. SPM Bidang Trantibumlinmas	V-185
5. 3. 6. SPM Bidang Sosial.....	V-199
BAB. VI	207
6. 1. MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN SPM.....	207
6. 2. MEKANISME PELAPORAN PENERAPAN SPM.....	207
BAB. VII.....	209
7. 1. KESIMPULAN	209
7. 2. SARAN.....	210

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Daerah menurut Kecamatan/ Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2021.....	II-9
Tabel II.2	Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan dan Angka Kepadatan Penduduk per Kapanewon pada Akhir Semester 1 tahun 2022.....	II-10
Tabel II.3	Komposisi Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Struktur Usia per Kapanewon pada Akhir Semester 1 Tahun 2022.....	II-11
Tabel II.4	Komposisi Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Pendidikan Terakhir per Kapanewon pada Akhir Semester 1 Tahun 2022..	II-13
Tabel II.5	Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha (%) pada Tahun 2017 - 2021.....	II-15
Tabel II.6	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul pada Tahun 2017 – 2021 .	II-18
Tabel II.7	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Bantul, 2018 - 2021	II-19
Tabel II.8	Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2017-2021	II-20
Tabel II.9	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul tahun 2017 - 2021	II-24
Tabel II.10	Perkembangan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bantul tahun 2017 - 2021.....	II-30
Tabel III.1	Perbedaan Permendagri 18/ 2018 dengan Permendagri 59/ 2021 ..	III-38
Tabel III.2	Program Pelayanan Dasar RPJMD dalam Pemenuhan SPM	III-42
Tabel III.3	Tim Penerapan SPM Kabupaten Bantul.....	III-48
Tabel IV.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Tahun 2021	IV-56
Tabel IV.2	Jumlah Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2021	IV-56
Tabel IV.3	Sebaran Satuan Pendidikan pada masing-masing Kapanewon/ Kecamatan.....	IV-57

Tabel IV.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul pada Urusan Pendidikan Tahun 2016 - 2021	IV-58
Tabel IV.5	Capaian Kinerja SPM Kabupaten Bantul Bidang Pendidikan Tahun 2020 - 2021	IV-61
Tabel IV.6	Jumlah Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021	IV-63
Tabel IV.7	Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021	IV-64
Tabel IV.8	Distribusi 10 Besar Penyakit Rawat Jalan di Puskesmas Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.....	IV-65
Tabel IV.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	IV-65
Tabel IV.10	Capaian Kinerja SPM Kabupaten Bantul Bidang Kesehatan Tahun 2020 - 2021	IV-70
Tabel IV.11	Data Sebaran Pegawai pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul.	IV-76
Tabel IV.12	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021	IV-77
Tabel IV.13	Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2017 - 2021	IV-77
Tabel IV.14	Jumlah Bangunan Rumah dan Gedung Kabupaten Bantul Tahun 2021.....	IV-78
Tabel IV.15	Luas Areal Sawah Yang Dilayani Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.....	IV-79
Tabel IV.16	Target Dan Capaian Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020	IV-79
Tabel IV.17	Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.....	IV-80
Tabel IV.18	Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul	IV-81
Tabel IV.19	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul Tahun 2021.....	IV-82
Tabel IV.20	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan SK Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2021.....	IV-83
Tabel IV.21	Tabel Penanganan RTLH Tahun 2016 - 2021.....	IV-83

Tabel IV.22 Pembangunan Rusunawa Dan Operasional Pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta Di Kabupaten Bantul Tahun 2008 - 2018.....	IV-84
Tabel IV.23 Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.....	IV-85
Tabel IV.24 Data Penduduk Dengan Akses Air Minum Tahun 2021	IV-86
Tabel IV.25 Data IPAL Komunal Dan Jumlah Pengguna (KK) Menurut Kapanewon Di Kabupaten Bantul Tahun 2021	IV-87
Tabel IV.26 Data Penduduk Dengan Akses Sanitasi Tahun 2021	IV-87
Tabel IV.27 C apaian Kinerja SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2021.....	IV-88
Tabel IV.28 Faktor Pendorong dan Penghambat Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bantul.....	IV-90
Tabel IV.29 C apaian Kinerja SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bantul tahun 2020 – 2021	IV-90
Tabel IV.30 Faktor Pendorong dan Penghambat Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bantul	IV-91
Tabel IV.31 Jumlah SDM di Lingkungan Satpol PP.....	IV-92
Tabel IV.32 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	IV-93
Tabel IV.33 Analisis SDM Aparatur berdasarkan Kelompok Jabatan	IV-95
Tabel IV.34 Optimalisasi Tenaga Non ASN dalam Peningkatan Cakupan SDM	IV-96
Tabel IV.35 Kejadian Bencana dan Kebakaran di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021	IV-96
Tabel IV.36 Perkembangan Indeks Risiko Bencana wilayah DIY tahun 2015-2021	IV-97
Tabel IV.37 Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2021	IV-97
Tabel IV.38 Capaian Kinerja SPM Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Bantul tahun 2020 – 2021	IV-99
Tabel IV.39 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan.....	IV-102
Tabel IV.40 Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020	IV-103

Tabel IV.41	Data PMKS di Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2021.....	IV-103
Tabel IV.42	Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Bantul tahun 2020 - 2021.....	IV-105
Tabel V.1	Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Pendidikan.....	V-115
Tabel V.2	Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Kesehatan	V-115
Tabel V.3	Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Pekerjaan Umum... ..	V-116
Tabel V.4	Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Perumahan Rakyat	V-116
Tabel V.5	Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	V-117
Tabel V.6	Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Sosial	V-119
Tabel V.7	Rencana Aksi Bidang Pendidikan	V-120
Tabel V.8	Rencana Aksi Bidang Kesehatan	V-124
Tabel V.9	Rencana Aksi Bidang Pekerjaan Umum	V-127
Tabel V.10	Rencana Aksi Bidang Perumahan Rakyat.....	V-132
Tabel V.11	Rencana Aksi Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	V-134
Tabel V.12	Rencana Aksi Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	V-137
Tabel V.13	Rencana Aksi Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran....	V-142
Tabel V.14	Rencana Aksi Bidang Urusan Sosial.....	V-147
Tabel V.15	Kinerja Penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan	V-153
Tabel V.16	Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan.....	V-154
Tabel V.17	Kinerja Penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan	V-164
Tabel V.18	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	V-165
Tabel V.19	Kinerja Penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum	V-169
Tabel V.20	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	V-170
Tabel V.21	Kinerja Penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan Rakyat.....	V-181

Tabel V.22 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat	V-182
Tabel V.23 Kinerja Penyelenggaraan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	V-185
Tabel V.24 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ..	V-187
Tabel V.25 Kinerja Penyelenggaraan SPM Bidang Sosial	V-199
Tabel V.26 Rencana Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Bidang Sosial	V-203

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Peta Administratif Kabupaten Bantul (Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2021)	II-7
Grafik II.2	Persentase luas wilayah menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul.....	II-8
Grafik II.3	Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Bantul per Kelompok Umur pada Akhir Semester 1 Tahun 2022. (Sumber : Buku Agregat Kependudukan Semester 1 2022, Disdukcapil, 2022).....	II-13
Grafik II.4	Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021 (dalam miliar rupiah). (Sumber : Kabupaten Bantul dalam Angka 2022, BPS.2022).....	II-15
Grafik II.5	Indeks Gini Ratio Kabupaten Bantul dan D.I. Yogyakarta Tahun 2017 – 2020 (Sumber BPS, data diolah).....	II-17
Grafik II.6	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul, D.I.Y, dan Nasional Tahun 2017 – 2021 (Sumber : BPS 2022, Data Diolah).....	II-19
Grafik II.7	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, D.I.Y, dan Nasional tahun 2017 – 2021 (Sumber : BPS, 2022).....	II-21
Grafik II.8	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul, D.I.Y, dan Nasional Tahun 2017 – 2021 (Sumber : BPS, 2022)...	II-23
Grafik II.9	Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional tahun 2017 - 2021(Sumber : BPS, 2022).....	II-25
Grafik II.10	Angka Kematian Bayi Kabupaten Bantul, D.I.Y dan Nasional Tahun 2017 – 2021 (Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Bappeda D.I.Y, BPS; 2022).....	II-26
Grafik II.11	Angka Kematian Ibu Kabupaten Bantul, D.I.Y dan Nasional pada tahun 2017 – 2022 (Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Bappeda D.I.Y, BPS; 2022).....	II-27
Grafik II.12	Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021 (Sumber : BPS, 2022).....	II-28
Grafik II.13	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul, D.I.Y, dan Nasional (Sumber : BPS, 2022).....	II-29

Grafik II.14	Perkembangan PDRB per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Bantul tahun 2017 – 2021 (Sumber : BPS, 2022).....	II-31
Grafik II.15	Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021 (Sumber : BPS, 2022)	II-31
Grafik IV.1	Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	IV-94
Grafik IV.2	Komposisi Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2019	IV-98
Grafik IV.3	Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.	IV-98

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat, berkah, dan karunia-Nya sehingga penyusunan Peraturan Bupati Bantul tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat, bidang sosial, serta peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Rencana Aksi Penerapan SPM di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 ini mengacu pada dokumen perencanaan daerah yang telah disusun yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sehingga terdapat integrasi dan keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen rencana aksi penerapan SPM. Rencana Aksi Penerapan SPM menjadi pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal di Kabupaten Bantul.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026. Semoga Rencana Aksi Penerapan SPM ini dapat menjadi pedoman dan arahan dalam upaya meningkatkan cakupan dan kualitas layanan dasar bagi masyarakat Kabupaten Bantul dan mendukung perencanaan pembangunan Kabupaten Bantul.

BAB. I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat.

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2)



Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) Sosial. Ke-enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator SPM, Kabupaten Bantul perlu menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM agar dapat memberikan pedoman bagi para stakeholder terkait dalam pencapaian SPM tersebut. Rencana aksi tersebut harus diintegrasikan kepada dokumen perencanaan di daerah supaya bisa diimplementasikan, diterapkan dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bantul

1. 2. Landasan Hukum

Dasar hukum penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; dan
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul tahun 2022-2026

Adapun tujuan disusunnya Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal ini adalah:

1. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan oleh Pemerintah Daerah baik dari sisi Kinerja maupun Kemampuan Anggaran serta menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan pelaksanaan SPM pada tahun sebelumnya;
2. Merumuskan dan menetapkan Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal selama periode Tahun 2022-2026;
3. Merumuskan Indikator dan Target Kinerja terukur yang akan dicapai serta menjadi Instrumen pengukuran kinerja Perangkat Daerah pengampu Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebagai hasil pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala selama periode Tahun 2022-2026;
4. Memastikan pelaksanaan Jenis, Mutu, serta Penerima Pelayanan Dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

1. 4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana aksi meliputi:

1. Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada enam urusan wajib.
2. Identifikasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan besaran anggaran yang mendukung pencapaian SPM di Kabupaten Bantul.
3. Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar.
4. Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM.
5. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing -masing urusan.
6. Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternatif dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM.

1. 5. Sistematika Rencana Aksi

Sistematika rencana aksi adalah sebagai berikut:

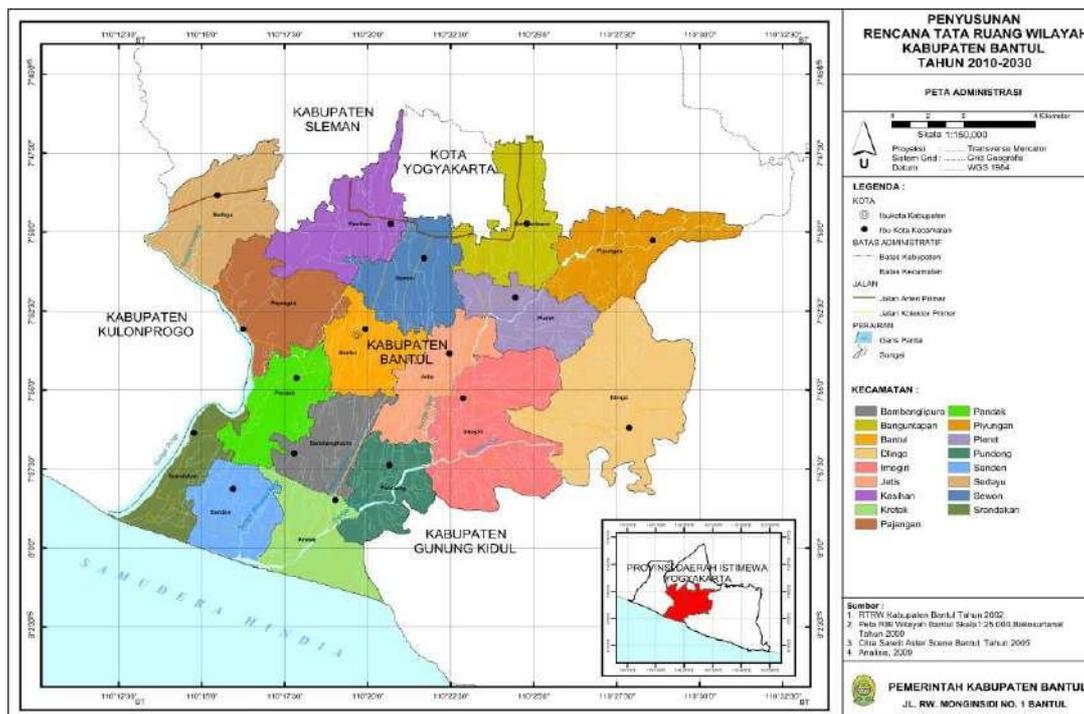
1. Bab I. Pendahuluan
Bab I menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Sistematika Rencana Aksi.
2. Bab II. Kondisi Umum Wilayah
Bab II menguraikan tentang Kondisi Geografi, Aspek Kesejahteraan Manusia, dan Kondisi Pembangunan Manusia.
3. Bab III. Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM
Bab III menguraikan tentang kebijakan SPM dan Tim Penerapan SPM Kabupaten Bantul.
4. Bab IV. Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan, Pembiayaan Pencapaian SPM dan Permasalahan
Bab IV menguraikan tentang Kondisi Pemenuhan SPM pada Pelayanan Dasar dan Permasalahan yang dihadapi dalam Pemenuhan Penerapan SPM di Kabupaten Bantul.
5. Bab V. Rencana Aksi Penerapan SPM
Bab V menguraikan tentang Strategi dan Kebijakan Penerapan SPM, Target Penerapan SPM Pelayanan Dasar 5 Tahunan dan Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Integrasi Rencana Aksi ke dalam Dokumen Perencanaan.
6. Bab VI. Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM
Bab VI menguraikan tentang Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM serta Mekanisme Pelaporan Penerapan SPM.
7. Bab VII. Kesimpulan dan Saran
Bab VII menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran terhadap Penerapan SPM di Kabupaten Bantul.

BAB. II KONDISI UMUM WILAYAH

2.1. KONDISI GEOGRAFI

Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah 506,85 km² (sekitar 15,91% dari luas wilayah DIY). Wilayah administratif Kabupaten Bantul memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul



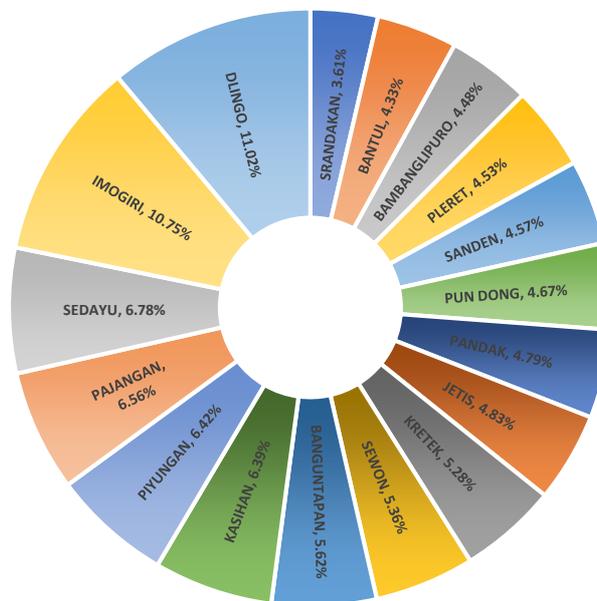
Grafik II.1 Peta Administratif Kabupaten Bantul (Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2021)

Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 110°12'34"- 110°31'08" Bujur Timur dan 7°44'04" 8°00'27" Lintang Selatan. Bentang alam wilayah Kabupaten Bantul merupakan dataran rendah 40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang



kurang subur, secara garis besar terdiri dari:

1. Bagian Barat, adalah daerah landai merupakan daerah yang kurang subur serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km² (17,73 % dari seluruh wilayah).
2. Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km² (41,62 %).
3. Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km² (40,65%).
4. Bagian Selatan, adalah daerah yang sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan wilayah Kapanewon Srandakan, Sanden dan Kretek



Grafik II.2 Persentase luas wilayah menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kapanewon. Sebutan kapanewon merupakan sebutan lain kecamatan di wilayah kabupaten/kota di DIY sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Demikian pula sebutan kalurahan merupakan sebutan lain desa di wilayah DIY yang merupakan gabungan beberapa pedukuhan dan berkedudukan di bawah kapanewon

Persentase luas wilayah menurut kapanewon di Kabupaten Bantul disajikan pada Grafik II.2 dan Tabel II.1. Kapanewon Dlingo merupakan kapanewon yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 km² (11,02%) sementara Kapanewon Srandakan merupakan kapanewon dengan wilayah paling sempit, yaitu 18,32 Km² (3,62%).

Tabel II.1 Luas Daerah menurut Kecamatan/ Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kalurahan	Luas (km ²)	% terhadap Luas Kabupaten
1	SRANDAKAN	Trimurti	2	18,32	3,61%
2	BANTUL	Bantul	5	21,95	4,33%
3	BAMBANGLIPURO	Sidomulyo	3	22,70	4,48%
4	PLERET	Pleret	5	22,97	4,53%
5	SANDEN	Murtigading	4	23,16	4,57%
6	PUNDONG	Srihardono	3	23,68	4,67%
7	PANDAK	Wijirejo	4	24,30	4,79%
8	JETIS	Sumberagung	4	24,47	4,83%
9	KRETEK	Donotirto	5	26,77	5,28%
10	SEWON	Panggunharjo	4	27,16	5,36%
11	BANGUNTAPAN	Baturetno	8	28,48	5,62%
12	KASIHAN	Tirtonirmolo	4	32,38	6,39%
13	PIYUNGAN	Srimulyo	3	32,54	6,42%
14	PAJANGAN	Sendangsari	3	33,25	6,56%
15	SEDAYU	Argorejo	4	34,36	6,78%
16	IMOGIRI	Imogiri	8	54,49	10,75%
17	DLINGO	Dlingo	6	55,87	11,02%
TOTAL			75	506,85	100,00

(Sumber : Kabupaten Bantul Dalam Angka 2022, BPS, 2022- Data Diolah)

2. 2. KONDISI DEMOGRAFI

2. 2. 1. Komposisi Penduduk Menurut Kapanewon/ Kecamatan

Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul pada Akhir Semester 1 Tahun 2022 (Tabel II.2) berdasarkan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebanyak 957.352 jiwa. Persebaran penduduk Kabupaten Bantul menurut Kapanewon pada tahun 2022 tertinggi berada pada Kapanewon Banguntapan dengan Jumlah penduduk sebanyak 114.007 jiwa, dan terendah pada Kapanewon Kretek dengan jumlah penduduk sebanyak 30.583 jiwa.

Tabel II.2 Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan dan Angka Kepadatan Penduduk per Kapanewon pada Akhir Semester 1 tahun 2022.

No	Kecamatan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ km ²)
1	SRANDAKAN	15.425	15.556	30.981	18,32	1.691,10
2	BANTUL	32.165	32.689	64.854	21,95	2.954,62
3	BAMBANGLIPURO	20.586	21.158	41.744	22,70	1.838,94
4	PLERET	24.494	24.149	48.643	22,97	2.117,68
5	SANDEN	15.669	16.093	31.762	23,16	1.371,42
6	PUNDONG	17.643	18.107	35.750	23,68	1.509,71
7	PANDAK	26.092	25.837	51.929	24,30	2.137,00
8	JETIS	29.308	29.498	58.806	24,47	2.403,19
9	KRETEK	14.955	15.628	30.583	26,77	1.142,44
10	SEWON	50.433	50.330	100.763	27,16	3.709,98
11	BANGUNTAPAN	56.586	57.421	114.007	28,48	4.003,05
12	KASIHAN	52.415	52.793	105.208	32,38	3.249,17
13	PIYUNGAN	26.312	26.688	53.000	32,54	1.628,76
14	PAJANGAN	18.464	18.477	36.941	33,25	1.111,01
15	SEDAYU	24.243	24.292	48.535	34,36	1.412,54
16	IMOGIRI	31.706	32.138	63.844	54,49	1.171,66
17	DLINGO	19.812	20.190	40.002	55,87	715,98
TOTAL		476.308	481.044	957.352	506,85	1.888,83

(Sumber : Agregat Kependudukan Semester 1 Tahun 2022, Disdukcapil Bantul 2022; Kabupaten Bantul Dalam Angka 2022, BPS, 2022-Data Diolah)

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Bantul tertinggi berada di Kapanewon Banguntapan dengan luas wilayah Kapanewon seluas 28,48 km², Kapanewon Banguntapan memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 4003,05 jiwa/ km².

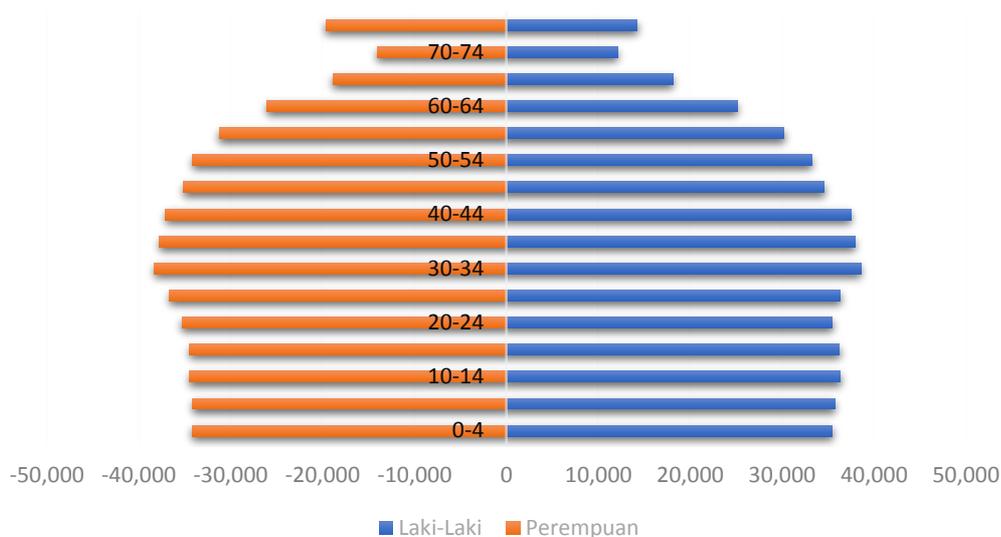
2. 2. 2. Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia

Tabel II.3 Komposisi Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Struktur Usia per Kapanewon pada Akhir Semester 1 Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Kapanewon/ Kecamatan																Total	
		Srandakan	Sanden	Kretek	Pundong	Bambanglipuro	Pandak	Pajangan	Bantul	Jetis	Imogiri	Dlingo	Bangunpapan	Pleret	Piyungan	Sewon	Kasih		Sedayu
1	0-4	1.745	1.762	1.674	2.152	2.454	3.052	2.367	3.902	3.628	3.993	2.445	7.317	3.285	3.342	6.185	6.414	3.006	58.723
2	5-9	2.059	1.930	1.927	2.481	2.751	3.378	2.573	4.447	4.130	4.624	2.565	8.483	3.747	3.936	7.263	7.598	3.307	67.199
3	10-14	2.228	2.246	2.114	2.591	2.976	3.743	2.872	4.950	4.479	4.856	2.877	9.313	4.162	4.226	7.682	8.042	3.635	72.992
4	15-19	2.004	1.931	1.912	2.131	2.722	3.481	2.451	4.576	3.966	4.068	2.494	8.364	3.499	3.775	6.942	7.439	3.421	65.176
5	20-24	2.052	2.187	2.129	2.396	2.795	3.604	2.679	4.333	3.871	4.196	2.868	8.218	3.415	3.903	7.248	7.573	3.333	66.800
6	25-29	2.104	2.327	2.205	2.555	2.840	3.588	2.759	4.565	4.059	4.365	3.073	8.278	3.518	3.718	6.867	7.786	3.583	68.190
7	30-34	2.059	2.027	2.000	2.524	2.764	3.606	2.619	4.413	4.169	4.427	2.819	7.969	3.473	3.615	7.024	7.468	3.408	66.384
8	35-39	2.256	2.076	2.012	2.654	3.074	3.886	2.855	4.913	4.596	4.993	2.623	8.919	3.711	4.064	7.808	8.365	3.490	72.295
9	40-44	2.234	2.283	2.076	2.625	2.993	3.928	2.962	4.880	4.532	5.015	2.784	9.484	3.922	4.328	8.235	8.605	3.808	74.694
10	45-49	2.115	2.198	2.181	2.428	3.008	3.661	2.589	4.576	4.289	4.469	2.977	8.598	3.865	3.901	7.538	7.881	3.434	69.708
11	50-54	2.260	2.360	2.212	2.534	3.008	3.817	2.518	4.803	4.166	4.190	2.978	8.068	3.341	3.739	7.352	7.362	3.463	68.171
12	55-59	2.114	2.195	2.154	2.433	3.080	3.627	2.202	4.591	3.985	3.966	2.398	6.800	2.729	3.128	6.525	6.508	3.160	61.595
13	60-64	1.863	1.932	1.923	2.224	2.626	3.203	1.919	3.842	3.387	3.701	2.258	5.756	2.199	2.659	5.534	5.575	2.683	53.284
14	65-69	1.397	1.466	1.340	1.486	1.663	2.065	1.357	2.558	2.190	2.662	1.672	3.839	1.562	1.846	3.849	3.736	1.931	36.619
15	70-74	941	983	1.008	957	1.147	1.237	878	1.433	1.287	1.669	1.314	2.073	942	1.164	2.020	2.187	1.090	22.330
16	>75	1.550	1.859	1.716	1.579	1.843	2.053	1.341	2.072	2.072	2.650	1.857	2.528	1.273	1.656	2.691	2.669	1.783	33.192
Total		30.981	31.762	30.583	35.750	41.744	51.929	36.941	64.854	58.806	63.844	40.002	114.007	48.643	53.000	100.763	105.208	48.535	957.352

(Sumber : Agregat Kependudukan Semester 1 Tahun 2022, Disdukcapil Bantul 2022; Data Diolah)





Grafik II.3 Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Bantul per Kelompok Umur pada Akhir Semester 1 Tahun 2022. (Sumber : Buku Agregat Kependudukan Semester 1 2022, Disdukcapil, 2022)

Berdasarkan Kelompok Usia, jumlah penduduk Kabupaten Bantul terbanyak berada pada rentang usia 40 – 44 tahun dengan persentase sebesar 7,80% atau sebanyak 74.694 jiwa. Kemudian diikuti penduduk dengan rentang usia 10 – 14 tahun sebesar 7,62% atau 72.992 jiwa. Secara lengkap struktur penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada Tabel II.3.

2. 2. 3. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul sebesar 957.352 jiwa. Komposisi terbesar penduduk Kabupaten Bantul menurut pendidikan terakhir adalah Tamatan SMA/ Sederajat dengan persentase sebesar 28,77%, disusul Tamatan SD/ Sederajat sebesar 18,45% dan Tamatan SMP/ Sederajat sebesar 14,98%. Rincian lebih lengkap terhadap komposisi penduduk Kabupaten Bantul menurut pendidikan terakhir disampaikan dalam Tabel II.4 di bawah ini.

Tabel II.4 Komposisi Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Pendidikan Terakhir per Kapanewon pada Akhir Semester 1 Tahun 2022

NO	KAPANEWON/KECAMATAN	BLM/ TDK SKLH	BLM TMT SD	TMT SD/ SDRJT	TMT SMP/ SDRJT	TMT SMA/ SDRJT	DI/ DII	DIII/ SARJANA MUDA	D IV/ S I	S II	S III
1	SRANDAKAN	5.326	3.014	5.174	4.377	10.236	290	673	1769	115	7
2	SANDEN	5.166	2.085	5.865	4.979	10.216	301	754	2274	120	2
3	KRETEK	4.750	2.353	5.343	4.721	10.259	274	706	2047	121	9



NO	KAPANEWON/ KECAMATAN	BLM/ TDK SKLH	BLM TMT SD	TMT SD/ SDRJT	TMT SMP/ SDRJT	TMT SMA/ SDRJT	DI/ DII	DIII/ SARJANA MUDA	D IV/ S I	S II	S III
4	PUNDONG	6.799	2.549	8.145	5.552	10.241	217	581	1582	80	4
5	BAMBANGLIPURO	8.046	2.736	7.449	5.920	13.486	358	962	2594	187	6
6	PANDAK	10.174	3.525	12.001	7.825	14.458	305	945	2526	163	7
7	PAJANGAN	7.290	3.696	7.915	6.640	9.100	199	535	1454	106	6
8	BANTUL	12.554	4.792	10.222	8.526	20.459	552	1862	5398	464	25
9	JETIS	11.601	4.822	10.912	8.767	17.314	369	1212	3554	238	17
10	IMOGIRI	14.412	3.534	17.597	10.343	14.132	276	897	2515	124	14
11	DLINGO	8.650	2.910	10.460	9.015	7.898	135	231	672	30	1
12	BANGUNTAPAN	21.673	9.661	15.783	15.401	31.915	949	3788	13077	1590	170
13	PLERET	10.606	4.358	10.307	7.314	12.172	263	648	2726	235	14
14	PIYUNGAN	10.907	4.199	8.277	7.122	17.369	375	1111	3330	293	17
15	SEWON	20.020	7.158	16.845	14.070	29.011	833	2896	8937	914	79
16	KASIHAN	18.859	8.172	15.780	15.949	31.960	724	2816	9786	1080	82
17	SEDAYU	9.516	3.487	8.525	6.870	15.217	346	1069	3234	243	28
JUMLAH		186.349	73.051	176.600	143.391	275.443	6.766	21.686	67.475	6.103	488
Persen (%)		19,47%	7,63%	18,45%	14,98%	28,77%	0,71%	2,27%	7,05%	0,64%	0,05%

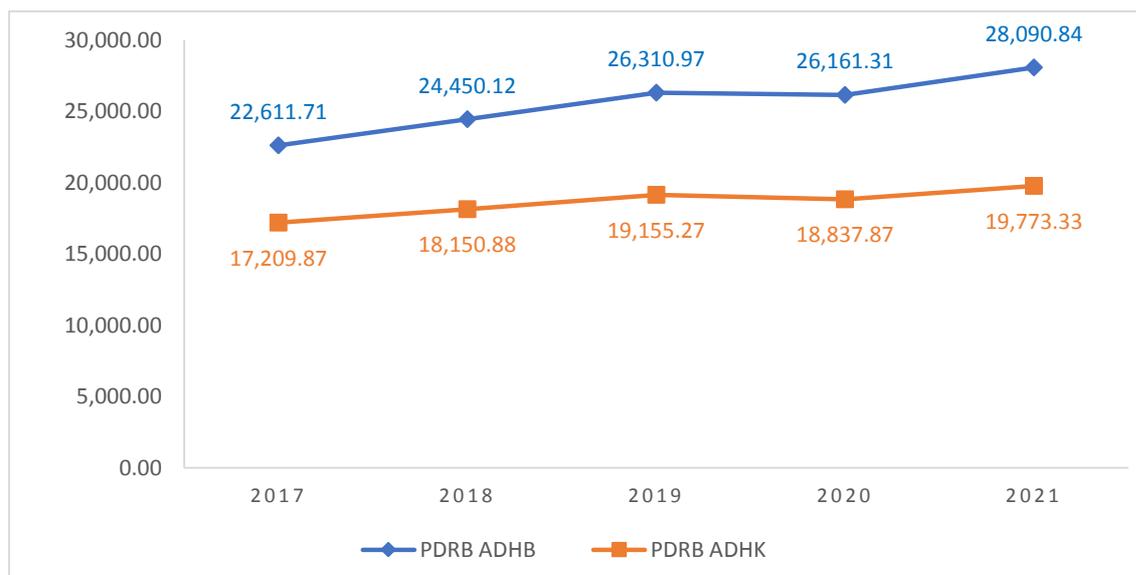
(Sumber : Agregat Kependudukan Semester 1 Tahun 2022, Disdukcapil Bantul 2022; Data Diolah)

2.3. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pembangunan terhadap masyarakat pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

2.3.1. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator makro ekonomi yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah setiap tahun adalah PDRB. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.



Grafik II.4 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021 (dalam miliar rupiah). (Sumber : Kabupaten Bantul dalam Angka 2022, BPS.2022)

PDRB Kabupaten Bantul menunjukkan trend peningkatan (Grafik II.4) dari tahun 2017 ke tahun 2019, kemudian mengalami penurunan dikarenakan dampak *Covid-19* yang mempengaruhi kontribusi pada beberapa sektor lapangan usaha secara signifikan. Pada tahun 2021 PDRB kembali mengalami peningkatan, baik pada ADHB maupun ADHK 2010, dan merupakan capaian peningkatan tertinggi selama kurun waktu 2017 – 2021.

Penghitungan PDRB ADHB disesuaikan dengan kontribusi dari 17 lapangan usaha. Hasil penghitungan PDRB ADHB disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.5 Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha (%) pada Tahun 2017 - 2021

	Lapangan Usaha/ Industry	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	13,85	13,65	13,10	14,08	13,64
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	0,57	0,54	0,51	0,47	0,42
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	15,25	15,21	15,16	14,87	14,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Lapangan Usaha/ Industry		2017	2018	2019	2020	2021
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	9,38	9,72	9,75	8,51	8,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	8,61	8,69	8,64	8,46	8,18
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	4,74	4,72	4,85	4,45	4,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	11,73	11,68	11,95	10,74	11,16
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	7,38	7,32	7,26	8,74	9,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,77	2,83	2,95	2,88	2,87
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	6,57	6,56	6,71	6,90	6,58
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,48	0,47	0,49	0,43	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	7,77	7,72	7,58	7,72	7,45
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	6,82	6,83	6,93	7,39	7,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1,85	1,81	1,85	2,29	2,27
R,S,T, U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2,01	2,04	2,05	1,86	1,97
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		100	100	100	100	100

(Sumber : Kabupaten Bantul dalam Angka 2022, BPS.2022)

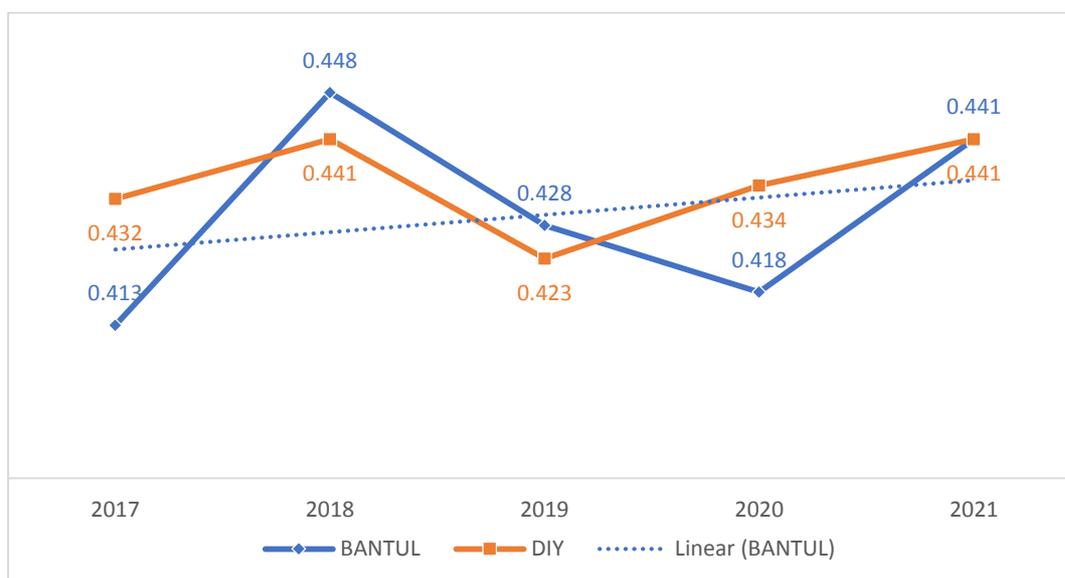
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan melakukan perhitungan kontribusi 17 lapangan usaha terhadap besarnya PDRB ADHB tahun 2017-2021 terlihat ada tiga lapangan usaha yang kontribusinya relatif besar dibanding dengan lapangan usaha yang lainnya. Ketiga lapangan usaha tersebut adalah pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; penyediaan akomodasi dan makan minum. Dalam lima tahun terakhir, tahun 2017-2021 pangsa sektor primer (pertanian dan pertambangan dan penggalan) cenderung menurun di tahun 2018 dan tahun 2019, meningkat di tahun 2020 saat pandemi Covid-19 dan menurun kembali di 2021. Sebaliknya pada sektor sekunder (industri pengolahan,

pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan konstruksi) cenderung meningkat di tahun 2018 dan tahun 2019, mengalami penurunan di tahun 2020 dan meningkat kembali di tahun 2021. Berbeda dengan kedua sektor di atas, sektor tersier (kategori lainnya) rata-rata mengalami kenaikan, kecuali tahun 2018 sedikit mengalami penurunan.

2.3.2. Indeks Gini

Distribusi pendapatan dapat diukur dengan Indeks Gini. Data tahun 2017-2021 tren perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Bantul mengalami perkembangan yang fluktuatif (Grafik II.5) sejak tahun 2017, meningkat kemudian menurun. Pada tahun 2020 Indeks Gini membaik pada 0,418, namun kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,441. Indeks Gini Bantul masuk dalam kategori ketimpangan “moderat” (0,3-0,5), namun perlu diwaspadai karena mendekati ambang batas ketimpangan “tinggi” (di atas 0,5).

Nilai Tingkat Ketimpangan Pendapatan penduduk Kabupaten Bantul berada pada tingkatan Moderat sejak tahun 2017. Hal ini perlu mendapat perhatian dan kebijakan khusus dari Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengatasi tingkat kesenjangan pendapatan yang memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.



Grafik II.5 Indeks Gini Ratio Kabupaten Bantul dan D.I. Yogyakarta Tahun 2017 – 2020 (Sumber BPS, data diolah)

Peningkatan Rasio Gini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan pada kelompok masyarakat lapisan terbawah yang lebih tajam apabila dibandingkan dengan kelompok lapisan atas. Penurunan terutama pada konsumsi dan daya beli masyarakat.

Pemulihan ekonomi masyarakat akibat Covid-19 membutuhkan waktu yang relatif lama.

2.3.3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

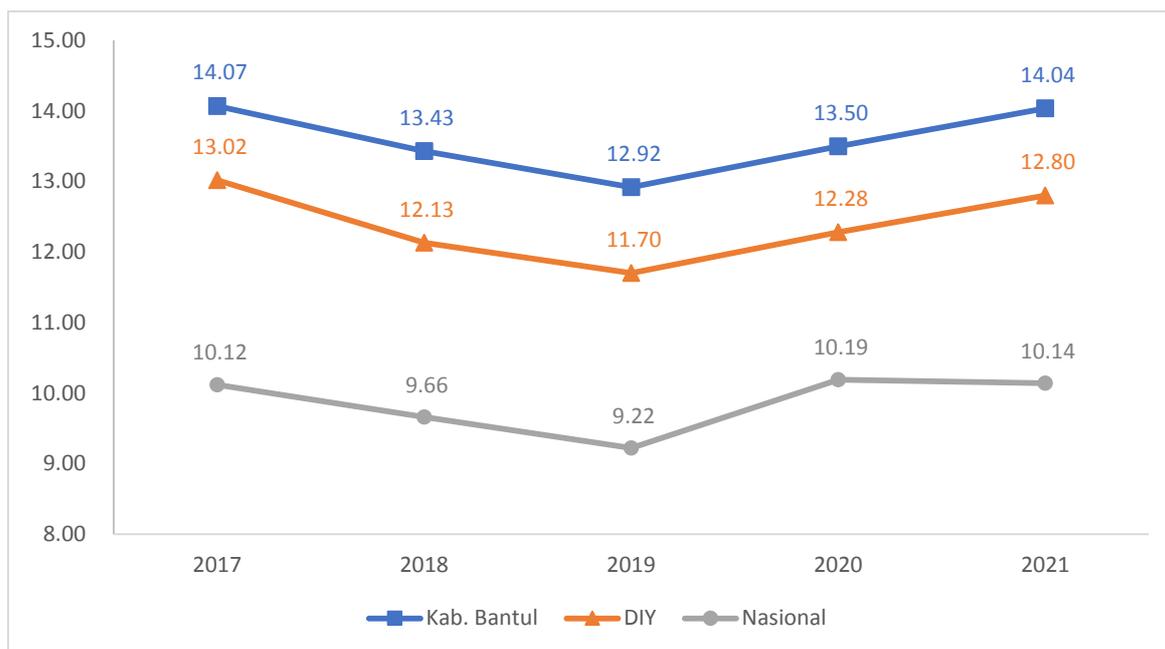
Kemiskinan bukan hanya masalah jumlah jiwa atau proporsi penduduk miskin (P0) tetapi juga menyangkut kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur sejauh mana perbedaan antara rerata pengeluaran miskin dari garis kemiskinannya. Semakin tinggi nilai P1, maka semakin jauh rerata pengeluaran masyarakat miskin dari garis kemiskinannya. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul sempat mengalami penurunan (Grafik II.6) pada tahun 2019 sebesar 12,92% dari tahun sebelumnya (tahun 2018) sebesar 13,43%, kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun berikutnya hingga tahun 2021 menjadi sebesar 14,04%.

Tabel II.6 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul pada Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	347.476	369.480	381.538	405.613	418.265
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	139,67	134,84	131,15	138,66	146,98
Tingkat Kemiskinan (%)	14,07	13,43	12,92	13,50	14,04
Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,21	2,17	1,87	1,85	2,24
Indeks Keparahannya Kemiskinan	0,56	0,46	0,43	0,43	0,54

Sumber : BPS, data diolah



Grafik II.6 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul, D.I.Y, dan Nasional Tahun 2017 – 2021 (Sumber : BPS 2022, Data Diolah)

Jumlah penduduk miskin (Tabel II.6) bertambah kurang lebih 8 ribu jiwa pada tahun 2021 atau naik 0,54% dari tahun 2020. Indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan tahun 2017 sampai 2020 semakin menurun akan tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2021. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul (Grafik II.6) apabila dibandingkan dengan dengan tingkat kemiskinan DIY dan Nasional, tingkat kemiskinan di Bantul relatif lebih tinggi.

2.3.4. Angka Pengangguran Terbuka

Terdapat dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (open unemployment) dan setengah pengangguran (disguised unemployment). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

Tabel II.7 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Bantul, 2018 - 2021

Jenis Kegiatan Utama	2017	2018	2019	2020	2021
I Angkatan Kerja	72,21	73,66	73,01	74,45	71,64

Jenis Kegiatan Utama	2017	2018	2019	2020	2021
1. Bekerja	96,88	97,24	96,93	95,94	95,96
2. Pengangguran	3,12	2,76	3,07	4,06	4,04
II Bukan Angkatan Kerja	27,79	26,34	26,99	25,55	28,36
1. Sekolah	29,92	27,51	30,96	31,97	28,93
2. Mengurus Rumah Tangga	60,46	59,71	57,58	57,41	57,08
3. Lainnya	9,62	12,78	11,46	10,62	14,00
Jumlah Total	100	100	100	100	100
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,21	73,66	73,01	74,45	71,64
Tingkat Pengangguran	3,12	2,76	3,07	4,06	4,04

Sumber : BPS 2022

Jumlah pengangguran di Kabupaten Bantul (Tabel II.8) sempat mengalami penurunan menjadi 16.188 jiwa pada 2018 kemudian meningkat kembali menjadi 18.080 orang pada tahun 2019, 24.783 orang pada tahun 2020 dan menurun menjadi 24.075 di tahun 2021.

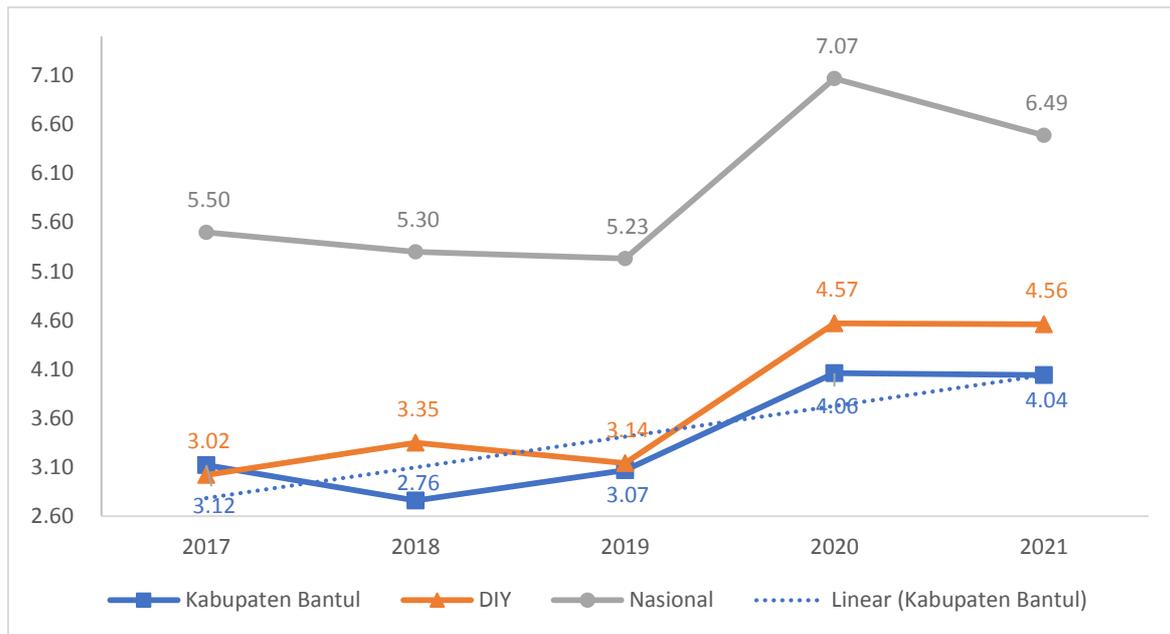
Kenaikan angka pengangguran yang signifikan pada tahun 2019 - 2020 dan lambatnya penurunan angka pengangguran disebabkan oleh:

1. Lonjakan pertumbuhan penduduk usia produktif yang belum dapat diimbangi dengan ketersediaan jumlah dan akses informasi lowongan kerja, kualifikasi yang sesuai serta daya saing SDM yang kompetitif;
2. Pandemi Covid 19 berdampak pada banyaknya tenaga kerja yang mengalami PHK dan dirumahkan oleh perusahaan;

Tabel II.8 Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Bantul	17.466	16.188	18.080	24.783	24.075
DIY	64.019	75.032	71.482	101.846	106.432
Nasional	7.040.320	7.073.390	7.104.420	9.767.750	9.102.050

Sumber : BPS 2022



Grafik II.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, D.I.Y, dan Nasional tahun 2017 – 2021 (Sumber : BPS, 2022)

Pengangguran di Kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan meskipun dengan laju yang lambat. Hal ini ditunjukkan oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Data menunjukkan (Tabel II.7 dan Grafik II.7) tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,06% di tahun 2020 menjadi 4,04% di tahun 2021. Setiap tahun TPT Kabupaten Bantul lebih rendah dibandingkan DIY, kecuali tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Nasional, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bantul lebih rendah sekitar 2 persen

2. 4. KONDISI PEMBANGUNAN MANUSIA

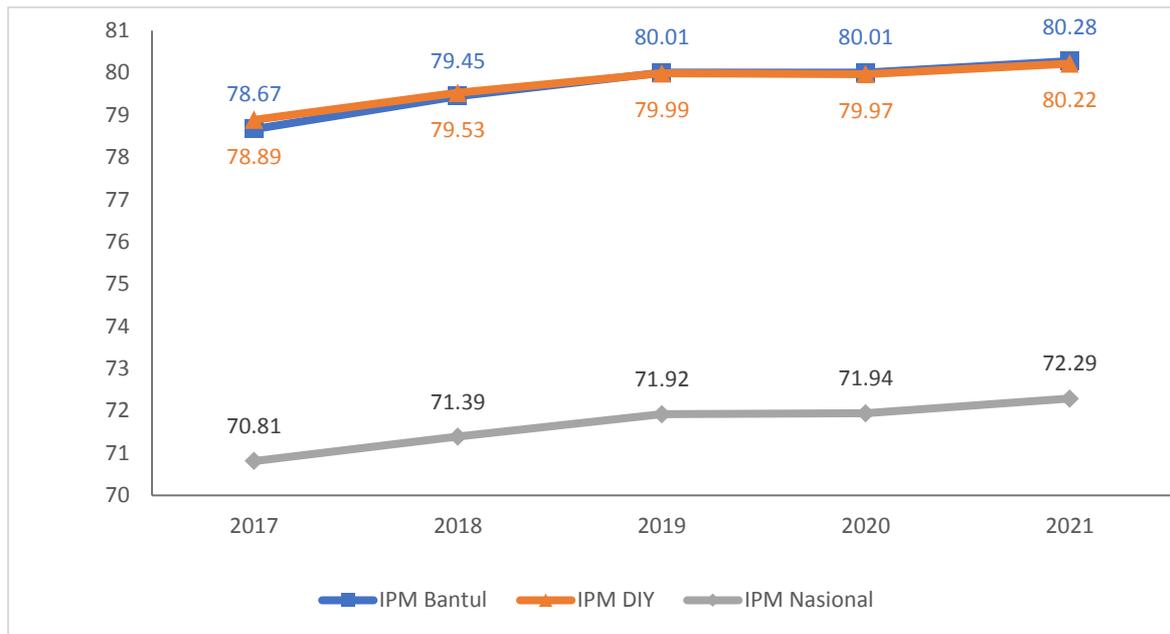
2. 4. 1. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan

Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS menggambarkan lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan/dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang.

Capaian Nilai IPM Kabupaten Bantul (Grafik II.8) selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dan terus mengalami peningkatan mulai dari 78,67 pada tahun 2017 hingga mencapai 80,28 atau berada pada capaian “sangat tinggi” (IPM>80; berdasarkan kriteria dari United Nations Development Programme (UNDP)) pada tahun 2021. Nilai capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,27 bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 dengan nilai 80,01. Dibandingkan dengan level IPM Provinsi D.I.Y yang pada tahun 2021 tercapai sebesar 80,22, nilai IPM Kabupaten Bantul tercapai lebih tinggi 0,06. Capaian IPM Kabupaten Bantul dan D.I.Y (Grafik II.8) selama periode 2017 – 2021 selalu berada di atas capaian IPM tingkat Nasional, hal ini menunjukkan kinerja pembangunan pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi semakin dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat.



Grafik II.8 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul, D.I.Y, dan Nasional Tahun 2017 – 2021 (Sumber : BPS, 2022)

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat ditentukan oleh ketiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi yang paling esensial tersebut secara bertahap semakin meningkat kualitasnya. Hal ini terlihat dari perkembangan empat indikator (Tabel II.9) yang mencirikan ketiga dimensi, yakni usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang secara rata-rata semakin membaik dari tahun ke tahun, meskipun pada capaian pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Bantul mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat terdampak pandemi Covid-19, namun pada tahun 2021 kembali meningkat seiring dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penanganan pandemi dan pemulihan perekonomian masyarakat.

Kegiatan vaksinasi yang gencar dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul diasumsikan memberikan dampak positif bagi kondisi psikologis masyarakat yaitu mengurangi kepanikan atau ketakutan masyarakat dan menimbulkan rasa optimis masyarakat terhadap tingkat kesembuhan dan kekebalan terhadap virus Covid-19 sehingga masyarakat kembali beraktivitas yang berdampak pada bangkitnya perekonomian di Kabupaten Bantul.

Tabel II.9 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul tahun 2017 - 2021

Komponen	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,56	73,66	73,77	73,86	73,89
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,74	15,03	15,15	15,17	15,38
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,2	9,35	9,54	9,55	9,57
Pengeluaran Riil per Kapita	Rp*1000/ orang/ tahun	14.995	15.386	15.636	15.517	15.545
IPM		78,67	79,45	80,01	80,01	80,28
Pertumbuhan IPM	%	0,32	0,99	0,70	0,00	0,34

(Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2022 (data diolah))

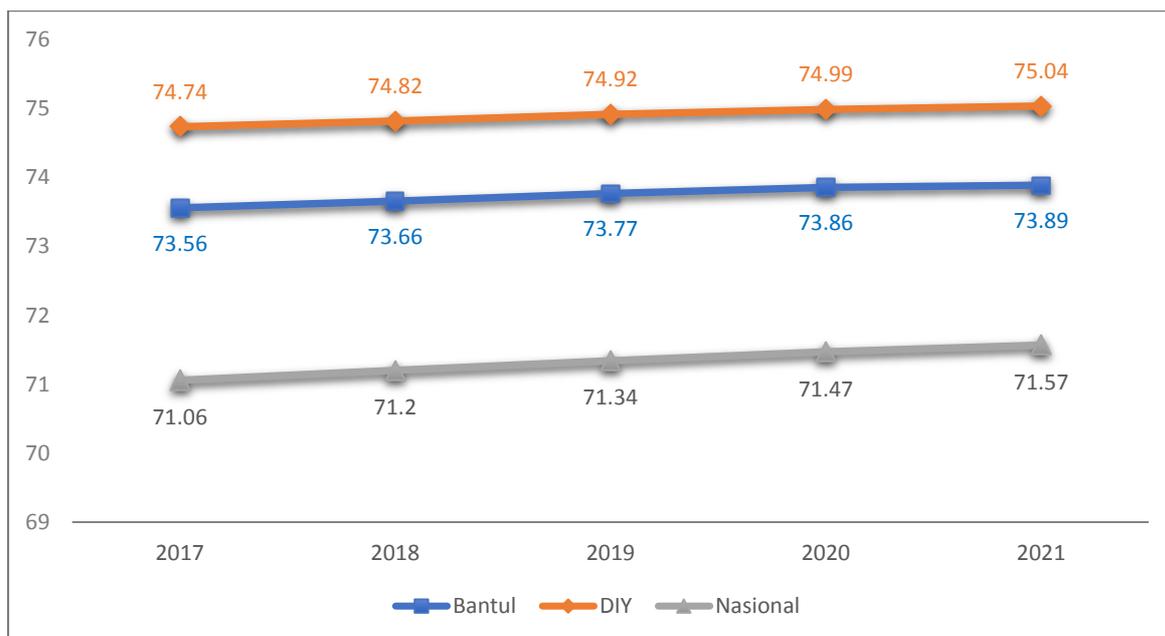
Perkembangan IPM ditinjau dari komponen penyusunnya (Tabel II.9) dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami perkembangan yang positif pada semua komponen penyusun IPM. Pada tahun 2021 dimensi umur yang panjang dan sehat mengalami kenaikan (UHH) sebesar 73,89 tahun, meningkat 0,03 tahun bila dibandingkan tahun 2020 yang tercapai sebesar 73,86. Pada dimensi pengetahuan, capaian pada tahun 2021 terhadap indikator HLS dan RLS masing-masing sebesar 15,38 tahun dan 9,57 tahun, meningkat sebesar 0,21 tahun pada indikator HLS dan 0,02 tahun pada indikator RLS bila dibandingkan dengan tahun 2020. Dimensi standar hidup layak yang diukur dengan indikator Pengeluaran Riil Perkapita juga mengalami kenaikan sebesar Rp 28.000,-/orang/tahun bila dibandingkan dengan tahun 2020 atau tercapai sebesar Rp 15.545.000,-/orang/tahun. Ditinjau dari laju Pertumbuhan IPM, sejak tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahun dan pertumbuhan nilai IPM mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 0,34% pada tahun 2021 dari tahun 2020.

2. 4. 2. Usia Harapan Hidup (UHH)

UHH (Expectation of Life/Eo) merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir hingga suatu tahun tertentu. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Tingginya pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan.

Peningkatan UHH menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat relatif membaik yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia.

Peningkatan UHH juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, peningkatan gizi masyarakat, dan akses serta mutu pelayanan kesehatan. Kepedulian tinggi dari pemerintah dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.



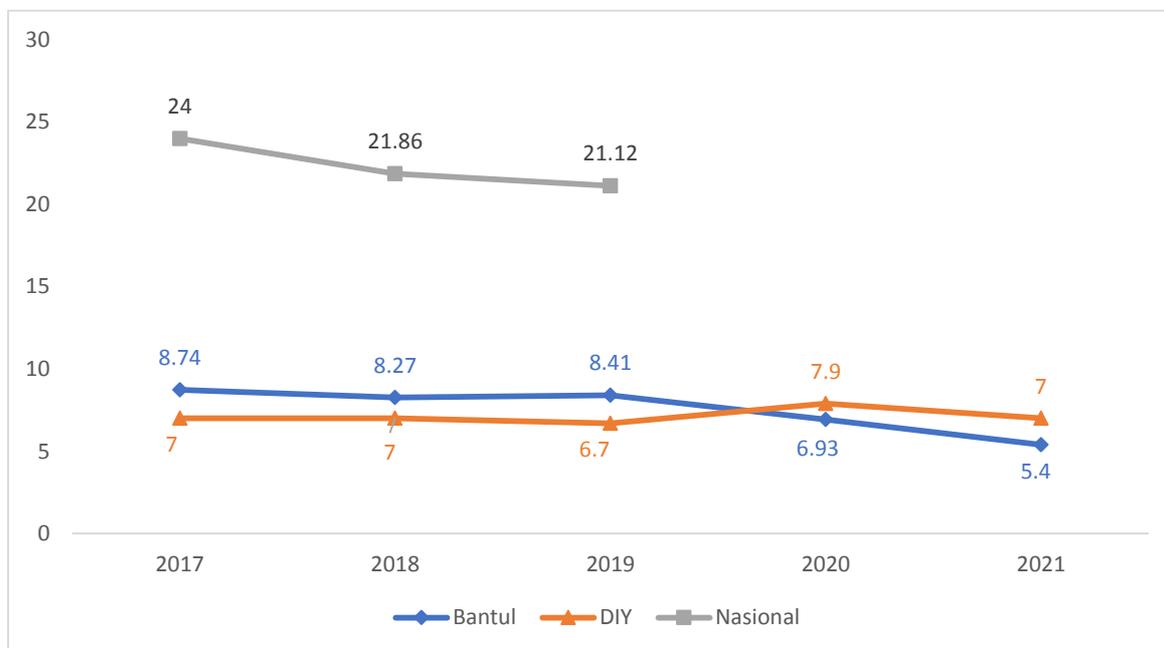
Grafik II.9 Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional tahun 2017 - 2021 (Sumber : BPS, 2022)

Trend Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bantul cenderung meningkat dari tahun ke tahun (Grafik II.9) UHH pada tahun 2017 sebesar 73,56, tahun 2018 sebesar 73,66 tahun, tahun 2019 sebesar 73,77 tahun, tahun 2020 sebesar 73,86 tahun, dan tahun 2021 sebesar 73,89 tahun. Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan menjadi salah satu yang berperan jangkauan atau akses pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bantul. Capaian UHH di Kabupaten Bantul pada Grafik II.9 menunjukkan berada di atas capaian tingkat Nasional dan berada di bawah rata-rata capaian D.I.Y.

2. 4. 3. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun dalam kurun waktu satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Pada tahun

2021 jumlah absolut kematian bayi sebesar 63 kasus menurun dibanding tahun 2020 sebesar 88 kasus Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2021 sebesar 5.35 per 1.000 kelahiran hidup, terjadi penurunan dibanding tahun 2020 sebesar 6.93 per 1.000 kelahiran hidup. Kecenderungan AKB pada tahun 2017-2021 di sajikan dalam Grafik II.10 berikut :



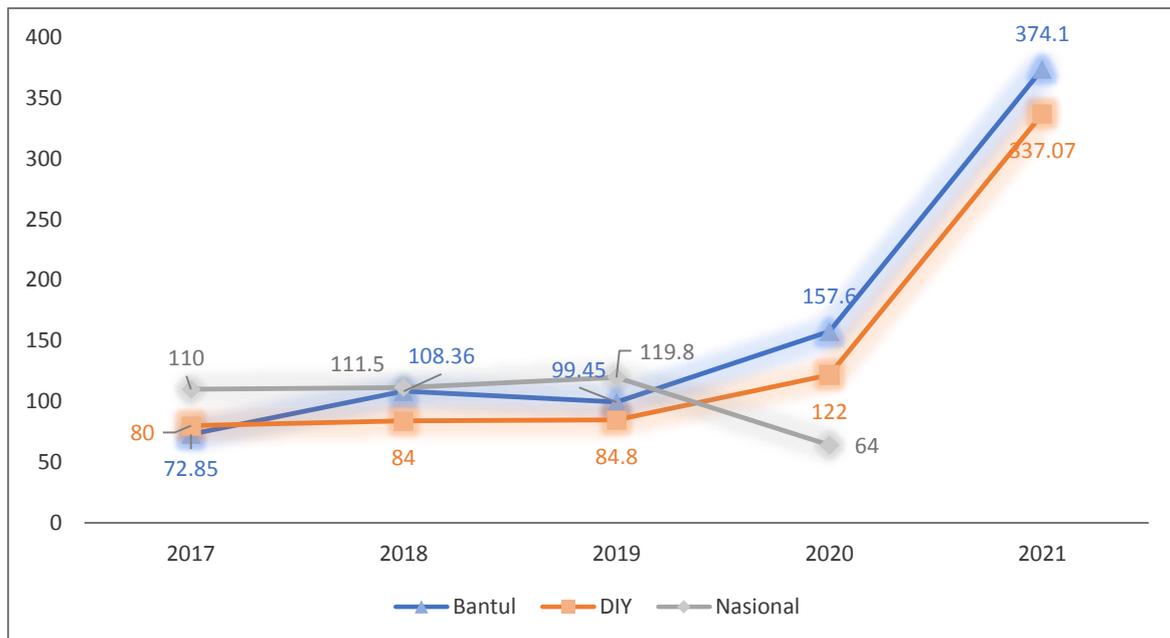
Grafik II.10 Angka Kematian Bayi Kabupaten Bantul, D.I.Y dan Nasional Tahun 2017 – 2021 (Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Bappeda D.I.Y, BPS; 2022)

Seluruh kasus kematian bayi telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) bayi. Penyebab kematian bayi tidak terlepas dari kondisi kesehatan ibu saat hamil. Untuk itu sangat terkait kualitas pelayanan kesehatan ibu dengan kejadian kematian bayi. Hasil audit penyebab kematian bayi antara lain Berat bayi lahir rendah (BBLR), asfiksia, kelainan bawaan dan penyebab lain seperti aspirasi, diare, perdarahan intrakanial).

2. 4. 4. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung dari jumlah kematian ibu maternal (hamil, melahirkan, dan nifas), bukan disebabkan oleh kecelakaan ataupun penyakit lainnya. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 mencapai 374,05 per 100.000 kelahiran hidup artinya di Kabupaten Bantul terdapat 44 kasus kematian ibu dari total 11.763 kelahiran hidup. Hal ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2020 sebesar 157,6 per 100.000 kelahiran hidup (20 kasus kematian ibu) terutama dikarenakan terpapar Covid-19 sebanyak 28 dari 44 kasus atau 63%.

Kecenderungan AKI pada lima tahun terakhir disajikan pada Grafik II.11 berikut :



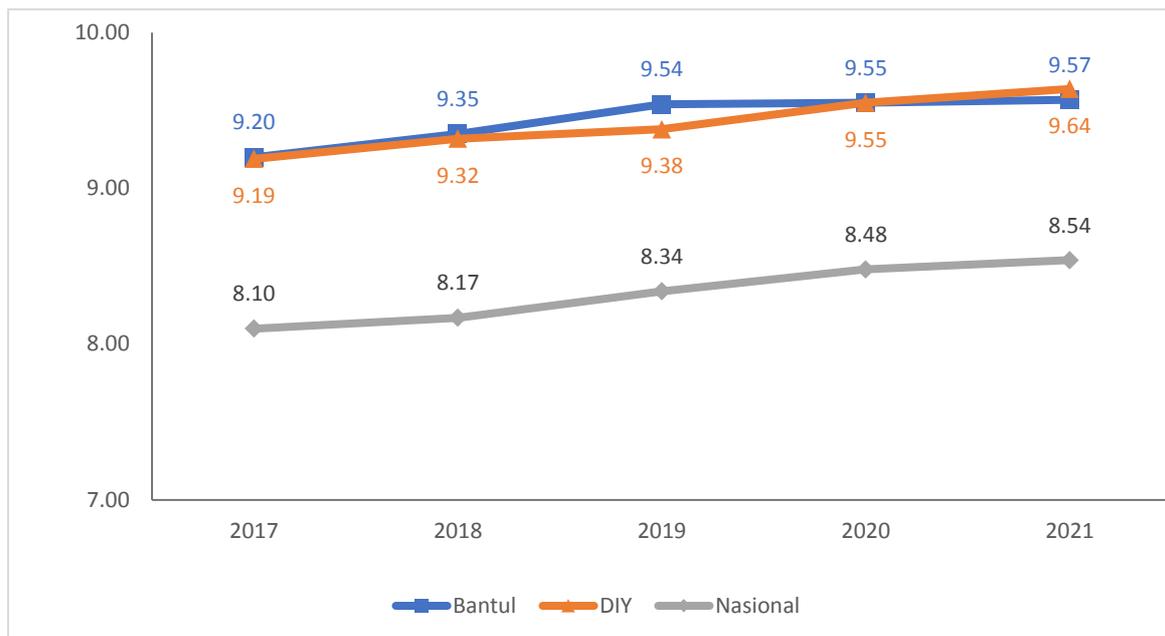
Grafik II.11 Angka Kematian Ibu Kabupaten Bantul, D.I.Y dan Nasional pada tahun 2017 – 2022 (Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Bappeda D.I.Y, BPS; 2022)

Dari Grafik II.11 terlihat bahwa terjadi tren kenaikan kematian ibu dengan berbagai penyebab antara lain : perdarahan (20,58%), PEB/Eklamsi (25%), Infeksi/Sepsis (10,29%), Lain-lain Penyakit penyerta (19,11%), Ileus paralitik (1,47%), Kanker (2,94%), Syok Septik/ Hypovolemik (2,94%), Covid-19 (2,94%).

2.4.5. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Grafik II.12 berikut :



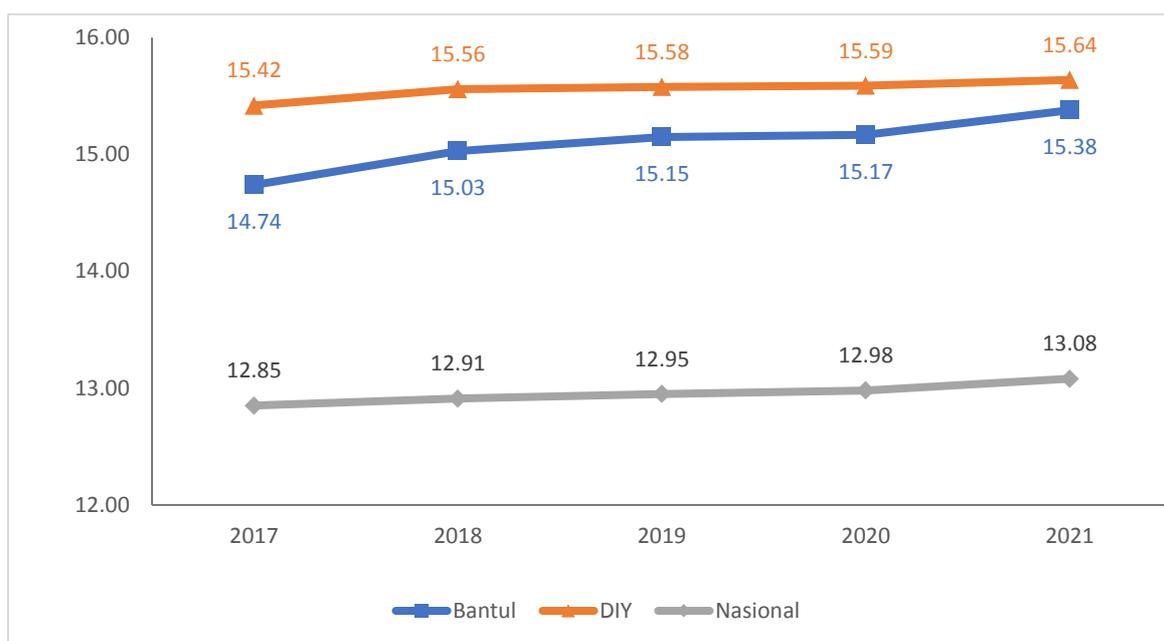
Grafik II.12 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021 (Sumber : BPS, 2022)

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan, dari 9,20 tahun pada tahun 2017 menjadi 9,57 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat, meskipun angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bantul bersekolah hanya setingkat SLTP.

2. 4. 6. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator kinerja daerah dalam bidang pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan bidang pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul tahun 2017 – 2020 dapat dilihat pada Grafik II.13 berikut :



Grafik II.13 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul, D.I.Y., dan Nasional (Sumber : BPS, 2022)

Grafik II.13 menunjukkan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul pada tahun 2020 sebesar 15,17 tahun. Capaian tersebut dapat diartikan bahwa lama sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (tujuh tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 15,17 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi jenjang Diploma III.

2. 4. 7. Pengeluaran Riil Per Kapita (PDRB ADHB per Kapita)

Perkembangan nilai PDRB per kapita dapat dipakai untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum. PDRB per kapita secara teoritis merupakan ketersediaan barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh setiap masyarakat di daerah tersebut. Semakin besar nilai PDRB per kapita, semakin banyak pula ketersediaan barang dan jasa yang dapat mereka nikmati. Dengan demikian semakin besar PDRB per kapita, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam rangka optimalisasi faktor produksi untuk meningkatkan output, juga diperlukan upaya pengendalian jumlah penduduk.

PDRB per kapita secara teoritis merupakan ketersediaan barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh setiap masyarakat di daerah tersebut. Semakin besar nilai PDRB per kapita, semakin banyak pula ketersediaan barang dan jasa yang dapat mereka nikmati. Dengan demikian semakin besar PDRB per kapita, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Tabel II.10 di bawah ini menunjukkan perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Bantul.

Tabel II.10 Perkembangan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bantul tahun 2017 - 2021

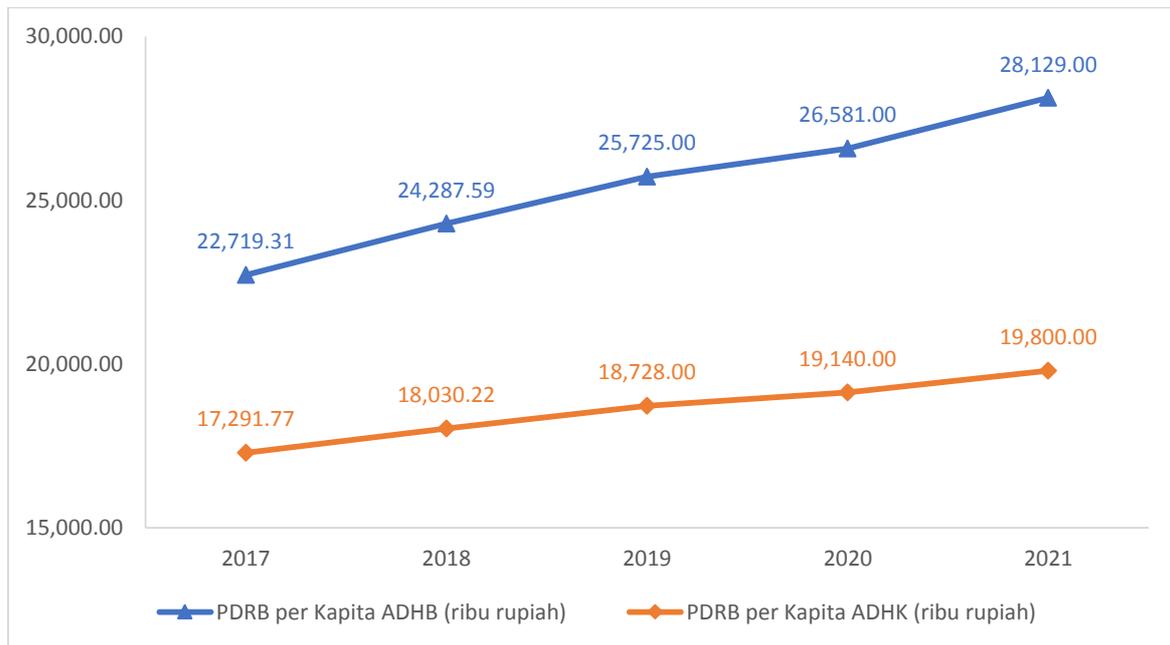
Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHB (miliar rupiah)	22.611,71	24.450,12	26.310,97	26.161,31	28.090,84
PDRB ADHK (miliar rupiah)	17.209,87	18.150,88	19.155,27	18.837,87	19.773,33
Jumlah Penduduk	995.264	1.006.692	1.018.402	985.770	998.647
PDRB per Kapita ADHB (ribu rupiah)	22.719,31	24.287,59	25.725,00	26.581,00	28.129,00
PDRB per Kapita ADHK (ribu rupiah)	17.291,77	18.030,22	18.728,00	19.140,00	19.800,00
Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHB (%)	6,79	6,90	5,92	3,33	5,82
Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK (%)	3,86	4,27	3,87	2,20	3,45

Sumber : BPS, data diolah

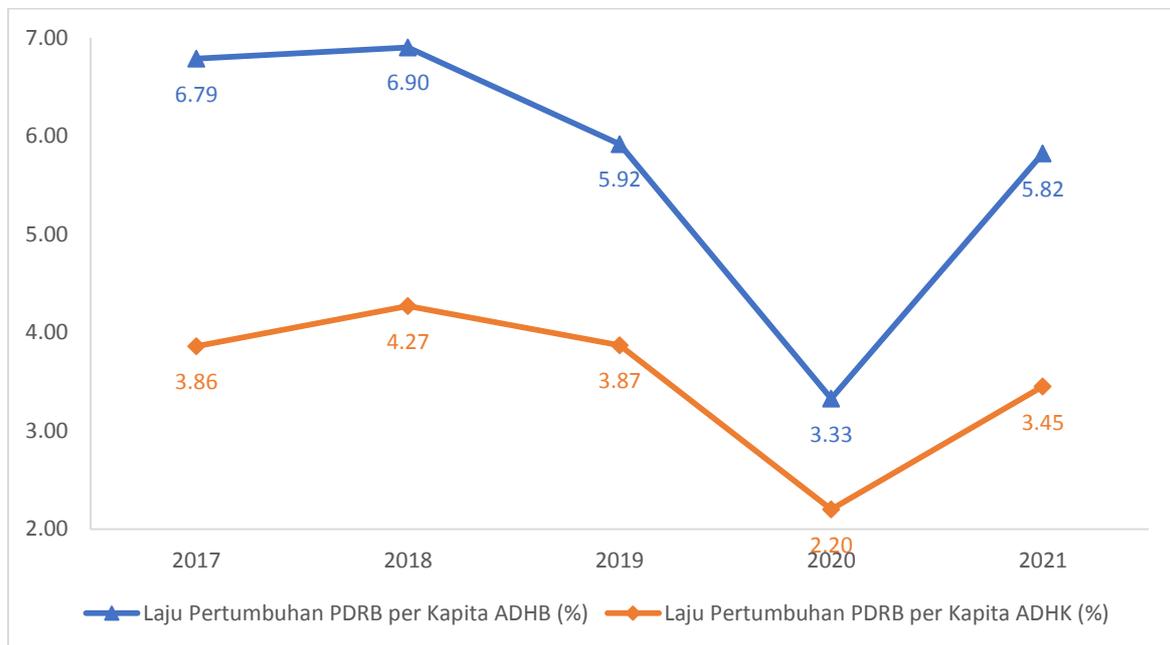
Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bantul sejak tahun 2017-2021 senantiasa mengalami kenaikan menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan penduduk Kabupaten Bantul. Pada tahun 2020 laju PDRB per kapita lebih rendah dibandingkan tahun tahun sebelumnya karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat serta terganggunya distribusi barang dan jasa akibat pembatasan kegiatan masyarakat. Kenaikan PDRB perkapita pada tahun 2020 karena data pembagiannya adalah jumlah penduduk dari hasil SP2020 yang jumlahnya lebih kecil daripada data jumlah penduduk pada tahun sebelumnya (menggunakan data proyeksi). Pada tahun 2021 PDRB per kapita mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat.

Nilai PDRB per Kapita ADHB pada tahun 2017 sebesar 22.719,31 (ribu rupiah) meningkat menjadi 28.129,00 (ribu rupiah) pada tahun 2021, sedangkan PDRB per Kapita

ADHK mengalami peningkatan dari 17.291,77 (ribu rupiah) pada tahun 2017 meningkat menjadi 19.800,00(ribu rupiah) pada tahun 2021 (Grafik II.14).



Grafik II.14 Perkembangan PDRB per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Bantul tahun 2017 – 2021 (Sumber : BPS, 2022)



Grafik II.15 Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021 (Sumber : BPS, 2022)



BAB. III

KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM

3. 1. KEBIJAKAN SPM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas diatur dalam pasal-pasal nya. Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Pasal 18 menyebutkan bahwa:

- (1) Penyelenggara Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 298 ayat (1) menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan, sub urusan Manajemen Pendidikan, yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Pengelolaan pendidikan dasar dan Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2. Bidang Kesehatan, kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Pengelolaan UKP Daerah Kabupaten/ Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Pengelolaan UKM Daerah Kabupaten/ Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dan Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sub bidang urusan Air Minum, yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/ kota; dan pada sub bidang urusan Air Limbah yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota
4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sub urusan Perumahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota adalah:
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/ kota
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
 - c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan

- d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)
5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - a. Sub bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota adalah Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota; Penegakan Perda kabupaten/ kota dan peraturan bupati/ walikota; dan pembinaan PPNS kabupaten/ kota.
 - b. Sub bidang urusan Bencana: Penanggulangan bencana kabupaten/ kota.
 - c. Sub bidang urusan Kebakaran: Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/ kota; Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; Investigasi kejadian kebakaran;
6. Bidang Sosial
 - a. Sub budang urusan Rehabilitasi Sosial: Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum
 - b. Sub bidang urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial: Pemeliharaan anak-anak terlantar, dan Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 - c. Sub bidang Penanganan Bencana meliputi: Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/ kota dan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/ kota

3. 2. KEBIJAKAN SPM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 130 ayat (1) menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 ayat (1) digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah.

Dalam Pasal 144 ayat (1) disebutkan bahwa Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal; dan Pasal 144 ayat (2) disebutkan bahwa Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3.3. KEBIJAKAN SPM DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup yang salah satunya menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. 4. KEBIJAKAN SPM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 (Permendagri 59/2021) merupakan ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan SPM secara umum sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 yang berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SPM diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Permendagri 59/2021 ini secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan.

Tujuan Permendagri 59/2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan minimal ini adalah untuk:

1. Menjadi Pedoman bagi Daerah dalam melaksanakan SPM.
2. Dasar penghitungan capaian SPM dengan menggunakan indeks capaian yang meliputi terhadap dua aspek yaitu aspek capaian mutu layanan dan aspek capaian penerima layanan dasar.
3. Menjadi acuan bagi daerah dalam melakukan pengumpulan data.
4. Menjadi dasar dalam menghitung kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar terhadap data yang telah dikumpulkan dengan beberapa perumusan berdasarkan standar teknis terkait.
5. Sebagai dasar penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan Daerah.
6. Sebagai acuan pemenuhan pelayanan dasar untuk mencapai target dan indikator layanan 100%.
7. Mempertegas penetapan Tim Penerapan SPM di Daerah dengan keputusan Kepala Daerah dan rencana aksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
8. Integrasi pelaporan Penerapan SPM kedalam dokumen LPPD dan pelaporan berbasis web melalui aplikasi SPM.

Permendagri 59/2021 ini juga mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 (Permendagri 100/2018) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, terdapat beberapa perbedaan antara Permendagri 59/2021 dengan Permendagri 18/2018 sebagai berikut :

Tabel III.1 Perbedaan Permendagri 18/ 2018 dengan Permendagri 59/ 2021

No	Item	Permendagri 18/2018	Permendagri 59/2021
1.	Jenis dan Mutu Layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan tentang jenis pelayanan dasar, indikator dan target capaian serta batas waktu capaian (hanya penerima layanan dasar) • Belum menggambarkan mutu 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan tentang jenis pelayanan dasar terhadap penerima dan mutu minimal layanan dasar atas indikator, target dan batas waktu capaian • Sudah menggambarkan mutu • dijelaskan dalam Lampiran A
2	Tahapan Penerapan SPM	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya menjelaskan tahapan penerapan SPM yaitu1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan 4 tahapan Penerapan SPM • Menjelaskan 4 tahapan kedalam bentuk

No	Item	Permendagri 18/2018	Permendagri 59/2021
		Pengumpulan data, 2) Penghitungan Kebutuhan, 3) Perencanaan, 4) Pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> • Belum terdapat pedoman teknis dalam 4 tahapan penerapan SPM. 	form yang dituangkan dalam lampiran1) Pengumpulan data, 2) Penghitungan Kebutuhan, 3) Perencanaan, 4) Pelaksanaan, 5) Rekapitulasi, sehingga Daerah mudah melaksanakannya <ul style="list-style-type: none"> • dijelaskan dalam Lampiran B
3	Pencapaian SPM	<ul style="list-style-type: none"> • Penghitungan pencapaian SPM diamanatkan untuk melayani semua warga Negara dengan target 100% • Tidak menjelaskan tata cara perhitungannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dirumuskan indeks pencapaian SPM dengan rumus IP_{SPM} sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran C
4	Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal pelaporan Daerah wajib melaporkan penerapan SPM kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Bangda paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir • Dijelaskan dalam Lampiran A 	<ul style="list-style-type: none"> • Daerah wajib melaporkan penerapan SPM kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Bangda paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir • Daerah wajib melaporkan penerapan SPM kepada Menteri Dalam Negeri setiap triwulan melalui aplikasi SPM • Dijelaskan dalam Lampiran D
5	Tim Penerapan SPM	<ul style="list-style-type: none"> • Tim penerapan SPM ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah • Dalam hal penyusunan Rencana Aksi hanya mengamatkan untuk menyusun dan tidak ada keharusan dasar hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Tim penerapan SPM ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah • Penyusunan Rencana Aksi berdasarkan penetapan Peraturan Kepala Daerah.
6	Koordinasi Penerapan SPM	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Bangda mengoordinasikan penerapan SPM secara Nasional dan belum ada Sekretariat Bersama di tingkat Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Bangda mengoordinasikan penerapan SPM secara Nasional • Tim Penerapan SPM Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat bersama SPM di tingkat Pusat • Sekretariat Bersama tingkat Pusat berkedudukan di Ditjen Bina Bangda
7	Lampiran	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam Permendagri 100/2018 hanya terdapat 1 lampiran, yaitu Lampiran tentang pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam Permendagri 59/ 2021 terdapat 4 lampiran yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Lampiran A : tentang Target dan Indikator Pencapaian SPM, adanya Penambahan Mutu minimal layanan Dasar - Lampiran B : tentang Format Tahapan Penerapan SPM : 1. Pengumpulan Data; 2. Penghitungan Kebutuhan; 3. Perencanaan; 4. Pelaksanaan; 5. Rekapitulasi baru. - Lampiran C : tentang Indeks

No	Item	Permendagri 18/2018	Permendagri 59/2021
			Penghitungan Pencapaian SPM
			- Lampiran D : tentang Pelaporan Penerapan SPM

Sumber : Permendagri 18/2018 dan Permendagri 59/2021, diolah

3. 5. KEBIJAKAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) di KABUPATEN BANTUL

3. 5. 1. Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kerangka Pendanaan dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

SPM merupakan salah satu indikator kondisi pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah yang menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, sementara urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM meliputi enam bidang yaitu:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Bidang Sosial

Pemenuhan SPM mengacu pada indikator dalam peraturan kementerian teknis masing- masing bidang yang mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima layanan dasar.

Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Bantul berisi skema dan asumsi kapasitas kemampuan pendanaan daerah dan program-program baik mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan PD dalam dalam hal pemenuhan SPM. Adapun pagu indikatif

sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan PD dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya

Pemenuhan SPM pada enam bidang diwujudkan dalam program-program pelayanan dasar selama periode RPJMD 2021- 2026 beserta pagu indikatif disajikan dalam *Tabel III.2* sebagai berikut:

Tabel III.2 Program Pelayanan Dasar RPJMD dalam Pemenuhan SPM

KODE	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
					x													
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	n/a	100 Persen	Rp 91.970.069.372	100 Persen	Rp 92.470.069.372	100 Persen	Rp 92.922.332.372	100 Persen	Rp 93.342.756.372	100 Persen	Rp 99.342.756.372	100 Persen	Rp 470.047.983.860	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	n/a	66 Persen	Rp 217.410.642.120	70 Persen	Rp 217.710.642.120	75 Persen	Rp 218.010.642.120	79 Persen	Rp 218.310.642.120	83 Persen	Rp 220.810.642.120	83 Persen	Rp 1.092.253.210.600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 indeks	1 indeks	Rp 21.022.955.117	1 indeks	Rp 24.842.065.331	1 indeks	Rp 22.369.095.882	1 indeks	Rp 26.822.863.349	1 indeks	Rp 22.196.026.290	1 indeks	Rp 117.253.005.969	DINAS KESEHATAN
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	indeks peningkatan kapasitas SDM	1 indeks	1 indeks	Rp 352.754.220	1 indeks	Rp 354.000.000	1 indeks	Rp 356.000.000	1 indeks	Rp 358.000.000	1 indeks	Rp 360.000.000	1 indeks	Rp 1.780.754.220	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp 645.000.000	1 indeks	Rp 665.000.000	1 indeks	Rp 670.000.000	1 indeks	Rp 675.000.000	1 indeks	Rp 680.000.000	1 indeks	Rp 3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp 645.000.000	1 indeks	Rp 665.000.000	1 indeks	Rp 670.000.000	1 indeks	Rp 675.000.000	1 indeks	Rp 680.000.000	1 indeks	Rp 3.335.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp725.00 0.000	1 indeks	Rp743.00 0.000	1 indeks	Rp750.00 0.000	1 indeks	Rp768.00 0.000	1 indeks	Rp785.00 0.000	1 indeks	Rp3.771.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.335.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp706.72 0.400	1 indeks	Rp725.00 0.000	1 indeks	Rp743.00 0.000	1 indeks	Rp761.00 0.000	1 indeks	Rp2.901.4 17.064	1 indeks	Rp5.837.1 37.464	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.325.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.325.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.325.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.335.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp845.00 0.000	1 indeks	Rp866.00 0.000	1 indeks	Rp870.00 0.000	1 indeks	Rp872.00 0.000	1 indeks	Rp875.00 0.000	1 indeks	Rp4.328.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp705.83 2.000	1 indeks	Rp725.00 0.000	1 indeks	Rp743.00 0.000	1 indeks	Rp750.00 0.000	1 indeks	Rp755.00 0.000	1 indeks	Rp3.678.8 32.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.00 0.000	1 indeks	Rp845.00 0.000	1 indeks	Rp850.00 0.000	1 indeks	Rp860.00 0.000	1 indeks	Rp865.00 0.000	1 indeks	Rp4.245.0 00.000	DINAS KESEHATAN



KODE	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp745.00 0.000	1 indeks	Rp765.00 0.000	1 indeks	Rp770.00 0.000	1 indeks	Rp775.00 0.000	1 indeks	Rp780.00 0.000	Rp3.835.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp650.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp687.00 0.000	Rp3.362.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.00 0.000	1 indeks	Rp845.00 0.000	1 indeks	Rp850.00 0.000	1 indeks	Rp860.00 0.000	1 indeks	Rp865.00 0.000	Rp4.245.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp700.00 0.000	1 indeks	Rp710.00 0.000	1 indeks	Rp715.00 0.000	1 indeks	Rp720.00 0.000	Rp3.520.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp877.00 0.000	1 indeks	Rp845.00 0.000	1 indeks	Rp850.00 0.000	1 indeks	Rp860.00 0.000	1 indeks	Rp865.00 0.000	Rp4.297.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp682.00 0.000	1 indeks	Rp699.00 0.000	1 indeks	Rp715.00 0.000	1 indeks	Rp720.00 0.000	Rp3.481.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp682.00 0.000	1 indeks	Rp699.00 0.000	1 indeks	Rp715.00 0.000	1 indeks	Rp720.00 0.000	Rp3.481.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp725.00 0.000	1 indeks	Rp743.00 0.000	1 indeks	Rp750.00 0.000	1 indeks	Rp755.00 0.000	1 indeks	Rp765.00 0.000	Rp3.738.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp803.84 4.080	1 indeks	Rp810.00 0.000	1 indeks	Rp815.00 0.000	1 indeks	Rp820.00 0.000	1 indeks	Rp825.00 0.000	Rp4.073.844.080	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.00 0.000	1 indeks	Rp845.00 0.000	1 indeks	Rp850.00 0.000	1 indeks	Rp861.00 0.000	1 indeks	Rp865.00 0.000	Rp4.246.000.000	DINAS KESEHATAN

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

KODE	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp695.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp730.000.000	1 indeks	Rp3.585.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp867.000.000	1 indeks	Rp4.247.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Occupation Rate (BOR)	57,29 Persen	-	-	67 Persen	55.000.000	69 Persen	59.950.000	71 Persen	64.746.000	73 Persen	69.279.000	73 Persen	248.975.000	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
				Turn Over Interval (TOI)	2,69 hari	-	-	2 hari	-	2 hari	-	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI						
				Bed Turn Over (BTO)	46,29 kali	-	-	50 kali	-	50 kali	-	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI						
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	82,36 Persen	83,56 Persen	Rp1.684.064.441	84,38 Persen	Rp8.744.242.764	85,19 Persen	Rp8.918.667.040	85,98 Persen	Rp9.489.533.744	86,76 Persen	Rp9.962.587.119	86,76 Persen	Rp38.799.095.108	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



KODE	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	84,83 Persen	87,86 Persen	Rp4.896.417.653	89,89 Persen	Rp5.351.716.994	91,92 Persen	Rp5.436.888.693	93,95 Persen	Rp5.500.577.563	95,98 Persen	Rp5.650.635.319	95,98 Persen	Rp26.836.236.222	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	100 Persen	Rp3.788.800.826	100 Persen	Rp4.784.865.801	100 Persen	Rp4.813.352.381	100 Persen	Rp4.984.687.619	100 Persen	Rp4.499.156.802	100 Persen	Rp22.870.863.429	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	100 Persen	Rp2.384.412.000	100 Persen	Rp2.479.788.771,20	100 Persen	Rp4.887.460.448	100 Persen	Rp2.541.472.297	100 Persen	Rp3.436.809.527,02	100 Persen	Rp15.729.943.044	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
0	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	20 Persen	25 Persen	Rp3.190.686.000	30 Persen	Rp2.855.000.000	35 Persen	Rp3.068.000.000	40 Persen	Rp3.160.800.000	45 Persen	Rp3.034.241.000	60 Persen	Rp15.308.727.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		(11) 100 Persen	(13) 100 Persen	(15) 100 Persen			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
				Indeks Pemulihan Pascabencana	n/a	n/a		45 Persen		55 Persen		60 Persen	65 Persen	75 Persen			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

KODE	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	14,48 Menit	< 15 Menit	Rp393.930.000	< 15 Menit	Rp690.000.000	< 15 Menit	Rp495.000.000		Rp666.000.000	< 15 Menit	Rp732.600.000	< 15 Menit	Rp2.977.530.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	n/a	60 Persen	Rp673.959.448	70 Persen	Rp523.959.448	75 Persen	Rp523.959.448	80 Persen	Rp523.959.448	85 Persen	Rp523.959.448	85 Persen	Rp2.769.797.240	DINAS SOSIAL
01	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	80 Persen	75 Persen	Rp8.938.751.920	75 Persen	Rp9.188.751.920	75 Persen	Rp9.788.924.104	80 Persen	Rp9.788.751.920	80 Persen	Rp10.288.751.920	80 Persen	Rp47.993.931.784	DINAS SOSIAL
				Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	n/a	70 Persen		70 Persen		70 Persen		80 Persen		80 Persen		80 Persen		80 Persen
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	50 persen	55 Persen	Rp4.074.365.740	60 Persen	Rp4.141.265.740	70 Persen	Rp4.141.265.740	75 Persen	Rp4.341.265.740	80 Persen	Rp5.004.080.834	80 Persen	Rp21.702.243.794	DINAS SOSIAL
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	57 Persen	100 Persen	Rp250.582.500	100 Persen	Rp250.582.500	100 Persen	Rp518.608.626	100 Persen	Rp518.608.626	100 Persen	Rp918.608.626	100 Persen	Rp2.456.990.878	DINAS SOSIAL



3.5.2. Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Untuk mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Kabupaten Bantul, sejak Tahun 2019 telah dibentuk Tim Penerapan SPM di Kabupaten Bantul melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 316 Tahun 2019. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 pada akhir tahun 2021 maka dilakukan penyesuaian atas Tim Penerapan SPM Kabupaten Bantul sehingga diterbitkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul pada tanggal 04 Januari 2022, yang dalam perjalanannya dilakukan dua kali perubahan, yaitu diubah dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul, dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 348 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul.

Perubahan Keputusan Bupati tentang Tim Penerapan SPM Kabupaten Bantul tersebut menyesuaikan dengan susunan keanggotaan tim berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 serta untuk mengakomodir penjelasan dari Direktorat Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri dalam acara sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, bahwa untuk dimasukkan dalam keanggotaan tim yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan serta Dinas Komunikasi dan Informatika.

Adapun susunan dan personalia Tim Penerapan SPM Kabupaten Bantul berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 348 Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel III.3 Tim Penerapan SPM Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
A.	TIM PENERAPAN SPM	
1.	Penanggung Jawab	Bupati Bantul
2.	Wakul Penanggung Jawab	Wakil Bupati Bantul

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 4. Inspektur Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 9. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 16. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
		Kabupaten Bantul
		17. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul
		18. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul
B.	SEKRETARIAT	
1.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
2.	Anggota	1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bantul
		2. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
		3. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
		4. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul
		5. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul
		6. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kabupaten Bantul
		7. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
		8. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
		9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
		10. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
		11. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
		12. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
		13. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bantul
		14. Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
		15. Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul
		16. Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
		17. Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
		18. Subkoordinator Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
		19. Subkoordinator Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul
		20. Subkoordinator Kelompok Substansi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul
		21. Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
		Kabupaten Bantul
		22. Subkoordinator Kelompok Substansi Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul
		23. Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul
		24. Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul
		25. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 3 (tiga) orang

Tim Penerapan SPM Kabupaten Bantul mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
2. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
3. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah Pengampu SPM;
4. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
5. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
6. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
7. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM;
8. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM;

9. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
10. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
12. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
13. melakukan rapat secara berkala; dan
14. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.



BAB. IV
PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN
KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM DAN
PERMASALAHAN

4.1. PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM DENGAN MELAKUKAN TELAAH TERHADAP PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 memuat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, sebagai berikut

4.1.1. Bidang Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan suatu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia. Salah satu faktor penentu bagi kelestarian dan kemajuan bangsa adalah sektor pendidikan. Pendidikan bukan hanya sekedar media dalam menyampaikan dan meneruskan kebudayaan dari generasi ke generasi, melainkan dapat menghasilkan perubahan dan pengembangan kemajuan kehidupan bangsa. Pembangunan di bidang pendidikan terus dilaksanakan di Kabupaten Bantul dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Hal ini sejalan dengan visi Bupati tahun 2021 - 2026 yakni “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”. Berkaitan dengan visi tersebut maka pencapaian kinerja di bidang pendidikan terkait dengan Misi ke 2 Kabupaten Bantul yaitu “Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa”.

A. Capaian Kinerja Bidang Pendidikan

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 81 orang pegawai, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 44 orang dan pegawai perempuan sebanyak 37 orang. Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi pegawai:

Tabel IV.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1	S3	1	1,23
2	S2	10	12,35
3	S1	34	41,98
4	Diploma	4	4,94
5	SLTA	30	37,04
6	SMP	2	2,47
Jumlah		81	100

Sumber : Disdikpora Kab. Bantul, 2022

Berdasarkan Tabel IV.1 diatas jumlah pegawai dengan persentase tertinggi pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul tercatat berpendidikan S1. Dalam pemenuhan pelayanan bidang pendidikan kepada masyarakat, tersedianya satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan merupakan faktor yang mendukung dalam keberlangsungan pelayanan di bidang pendidikan. Jumlah satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan di Kabupaten Bantul sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel IV.2 Jumlah Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Jenis Pendidikan	Satuan Pendidikan (Unit)	Guru/ Pendidik (Orang)	Tenaga Kependidikan (Orang)					
				Kepala Sekolah	Tenaga Administrasi Sekolah	Petugas Perpustakaan	Laboran	Penjaga Sekolah	Lainnya
1	Pendidikan PAUD (TK dan RA)	560	2278	559	-	-	-	-	-
2	Pendidikan Dasar	518	8197	462	1059	261	19	365	92
	Pendidikan SD (SD/MI)	398	5276	354	522	195	5	272	70

No	Jenis Pendidikan	Satuan Pendidikan (Unit)	Guru/ Pendidik (Orang)	Tenaga Kependidikan (Orang)					
				Kepala Sekolah	Tenaga Administrasi Sekolah	Petugas Perpustakaan	Laboran	Penjaga Sekolah	Lainnya
	Pendidikan SMP (SMP/ MTS)	120	2921	108	537	66	14	93	22
3	Pendidikan Kesetaraan	130	403			70			

Sumber : Disdikpora Kab.Bantul, 2022

Tabel IV.3 Sebaran Satuan Pendidikan pada masing-masing Kapanewon/ Kecamatan

No	Kapanewon/ Kecamatan	Satuan Pendidikan (Negeri dan Swasta)			
		PAUD	SD/ MI	SMP/ MTS	Kesetaraan
1	Bambanglipuro	28	19	8	0
2	Banguntapan	65	33	10	5
3	Bantul	39	27	12	2
4	Dlingo	21	27	9	2
5	Imogiri	35	25	6	1
6	Jetis	30	22	5	4
7	Kasihan	51	36	10	3
8	Kretek	20	16	5	1
9	Pajangan	23	16	3	1
10	Pandak	38	24	7	0
11	Piyungan	34	21	7	2
12	Pleret	28	22	7	1
13	Pundong	25	20	4	1
14	Sanden	27	16	7	1
15	Sedayu	32	24	4	1
16	Sewon	44	33	11	2
17	Srandakan	20	16	3	1
	Jumlah	560	397	118	28

Sumber : Disdikpora Kab. Bantul, 2022

Fasilitas pendidikan di Kabupaten Bantul diluar pendidikan kesetraan secara umum tersebar merata pada masing-masing Kapanewon/ Kecamatan, sedangkan pada fasilitas pendidikan kesetaraan masih terdapat 2 Kapanewon yang belum memiliki layanan pendidikan kesetaraan. Jumlah satuan pendidikan tertinggi terdapat pada Kapanewon yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta, yaitu pada Kapanewon Banguntapan dengan jumlah total sebesar 108 unit fasilitas pendidikan yang terdiri atas 65 unit PAUD, 33 unit SD/ MI, 10 unit SMP/ MTS, dan 5 PKBM, sedangkan Kapanewon dengan Fasilitas pendidikan terendah berada pada Kapanewon Srandakan dengan jumlah total 39 unit fasilitas

pendidikan yang terdiri atas 20 unit PAUD, 16 unit SD/ MI, 3 unit SMP/ MTS dan 1 unit PKBM.

2. Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016 – 2021

Tabel IV.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul pada Urusan Pendidikan Tahun 2016 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Renstra Tahun 2016 – 2021					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	14,73	14,74	15,03	15,15	15,17	15,19
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,02	0,02	0,01	0,004	0,004	0,02
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
3	Persentase Kelulusan SD/ MI	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Kelulusan SMP/ MTs	%	100	100	100	100	100	100
5	Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI	%	4	4	4	3	0	1
6	Peringkat rata-rata nilai USM SMP/MTs	%	3	3	3	3	0	1
7	Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional	Buah	-	6	8	4	4	8
8	APK SD/MI	%	96,11	96,15	98,45	95,26	92,77	96,5
9	APK SMP/MTs	%	95,1	95,15	97,83	101,38	97,23	96
10	APM SD/MI	%	84,09	88,25	89,55	85,86	86,55	84,75
11	APM SMP/MTs	%	75,27	77,01	77,33	76,8	76,31	68,22
12	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	%	100	106,62	109,61	108,56	101,27	100
13	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	%	107,35	105,96	108,54	111,18	105,93	100
14	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,08	9,09	9,2	9,35	9,55	9
15	APK PAUD	%	98,8	108,68	107,11	106,24	97,7	98,95
B	Indikator Program							
1	Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan	%	95	95	95	95	95	97
2	Persentase peningkatan kompetensi guru/kepala sekolah SD/MI dalam pembelajaran	%	50	55	55	55	55	57
3	Persentase peningkatan kompetensi guru/kepala sekolah SMP/MTs dalam pembelajaran	%	48	53	53	53	53	54
4	Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD	%	95,22	95,72	95,72	95,72	95,72	97,72
5	Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP	%	94,45	95	95	95	95	97
6	Persentase penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI sesuai SPM	%	95,22	95,72	95,72	95,72	95,72	96,72

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Renstra Tahun 2016 – 2021					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Persentase penyelenggaraan pendidikan dasar SMP/MTs sesuai SPM	%	77,14	77,64	77,64	77,64	77,64	79,64
8	Persentase pengembangan bakat minat/prestasi siswa SD/MI, SMP/MTs	%	63,9	64,4	64,4	64,4	64,4	65,9
9	Persentase kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	%	65	67	67	67	67	70
10	Persentase SD sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	%	20	22	22	22	22	30
11	Persentase SMP sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	%	36	39	39	39	39	51
12	Peringkat rata-rata nilai US/M SD/MI	%	4	4	4	4	4	1
13	Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	%	4	4	4	4	4	1
14	Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan	%	90	90	90	90	90	92

Sumber : Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, 2021

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2016 – 2021 pada bidang urusan pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dapat dijelaskan beberapa faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung:
 - a. Optimalisasi kinerja SDM.
 - b. Kerjasama dengan mitra kerja sudah terjalin dengan baik.
 - c. Pendampingan lembaga yang internal maupun eksternal berjalan baik.
 - d. Kesiapan data dari sekolah (guru untuk pemetaan tenaga pendidik, siswa untuk Biaya Operasional Pendidikan) dengan satu Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).
2. Faktor Penghambat:
 - a. Faktor sosial dan budaya masyarakat, seperti adanya siswa yang tidak mau menyelesaikan sekolahnya dengan alasan bekerja membantu perekonomian orang tua.
 - b. Tidak semua orang tua siswa menyekolahkan anaknya di Bantul sehingga mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan PAUD, SD dan SMP belum optimal.



- c. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan non formal.
- d. Pelajar berprestasi sering memilih melanjutkan sekolah di lain daerah, karena Kabupaten Bantul tidak mampu memberikan fasilitas yang memadai kepada atlet berprestasi.

Disamping faktor pendukung dan penghambat terdapat pula potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Potensi

- a. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengalokasian anggaran pendidikan secara proporsional yaitu sebesar 20 % dari APBD.
- b. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat diakses secara mudah dan relatif murah.
- c. Adanya dukungan dari para pihak dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan.
- d. Adanya peran aktif organisasi kepemudaan dalam mendukung pembangunan.
- e. Adanya peran aktif organisasi keolahragaan dalam mendukung peningkatan prestasi olahraga.

2. Permasalahan

- a. Keterbatasan standar pembiayaan dalam layanan pendidikan sehingga Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum memenuhi unit cost dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan.
- b. Sarana dan prasarana teknologi pendukung pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan yang belum optimal.
- c. Keterbatasan dukungan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- d. Keterbatasan pembinaan terhadap pengembangan dan peningkatan kewirausahaan pemuda dan pemuda pelopor.
- e. Keterbatasan fasilitas latihan olahraga di Kabupaten Bantul.

B. Capaian Kinerja SPM Kabupaten Bantul Bidang Pendidikan Tahun 2020 – 2021

Tabel IV.5 Capaian Kinerja SPM Kabupaten Bantul Bidang Pendidikan Tahun 2020 - 2021

No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Kabupaten Bantul			
		2020		2021	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pendidikan Anak Usia Dini			24.933	100
	Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		100		100
	Σ anak usia 5 – 6 th yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	25.029		24.933	
	Σ anak usia 5 – 6 th di Kabupaten/Kota yang bersangkutan	26.653		26.066	
	1) Buku Gambar	300.348	100	24.933	100
	2) Alat Mewarnai	50.058	100	24.933	100
	3) Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	339	100	534	100
	4) Penyediaan biaya personil peserta didik	304	100	368	100
	5) Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	482	100	495	100
	6) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.835	100	1.842	100
	7) Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1.645	100	1.762	100
2	Pendidikan Dasar		100		100
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/ MI, SMP/ MTs)	123.172		119.858	
1	SD				
	Jumlah warga negara usia 7 – 12 th yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)				
	Σ anak usia 7 – 12 th yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	82.166		80.963	
	Σ anak usia 7 – 12 th di Kabupaten/Kota yang bersangkutan	86.597		85.631	
	1) Buku teks pelajaran	82.166		80.963	
	2) Perlengkapan belajar	164.332		80.963	
	3) Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	387		351	
	4) Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/ admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	254		789	
	5) Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	3.623		3.498	
	6) Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	394		394	
	7) Penyediaan biaya personil peserta didik	51.803		49.578	
	8) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	4.776		5.287	
2	SMP				
	Jumlah anak usia 13– 15 th yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/ MTs)				
	Σ anak usia 13 – 15 th yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	41.006		38.895	
	Σ anak usia 13 – 15 th di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan	41.692		43.624	
	1) Buku teks pelajaran	41.006		38.895	



No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Kabupaten Bantul			
		2020		2021	
		Jumlah	%	Jumlah	%
	2) Perlengkapan belajar	82.012		38.895	
	3) Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	116		107	
	4) Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/ admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	352		676	
	5) Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1.387		1.388	
	6) Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	113		113	
	7) Penyediaan biaya personil peserta didik	5.108		28.235	
	8) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	2.730		2.878	
3	Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah warga negara usia 7 – 18 th yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
	Σ anak usia 7 – 18 th yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	2.046		2.021	
	Σ anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan	15.076		18.947	
	1) Modul Belajar	2.046		2.021	
	2) Perlengkapan belajar	4.092		2.021	
	3) jumlah rombongan belajar di PKBM	207		130	
	4) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	245		271	
	5) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	316		345	
	6) Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	17		17	
	7) Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/ admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	45		40	
	8) PKBM Terakreditasi minimal C	15		16	

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 dan tahun 2021 diatas dapat dijelaskan terkait faktor pendukung dan Faktor penghambat sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung:
 - a. Adanya dukungan pendanaan diluar APBD Kabupaten Bantul melalui BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan dan Dana BOS.
 - b. Target pemerintah Kabupaten Bantul untuk mencapai peningkatan prestasi khususnya di bidang akademik setiap tahun dan Adanya peningkatan dan pengembangan kurikulum muatan lokal.
 - c. Sebagian besar pendidik dan tenaga kependidikan sudah memenuhi kualifikasi

S1/DIV.

d. Tersusunnya Dokumen Roadmap Pemenuhan SPM Dikdas Kabupaten Bantul.

2. Faktor Penghambat:

- a. Keterbatasan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam akses data warga kabupaten Bantul yang bersekolah di satuan pendidikan diluar wilayah administratif sehingga belum dapat dipastikan adanya selisih jumlah penduduk rentang usia pendidikan tertentu tersebut telah terlayani di luar Kabupaten Bantul atau belum.
- b. Keterbatasan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pembiayaan pemenuhan SPM bidang pendidikan melalui APBD, sehingga diperlukan pembiayaan yang bersumber dari luar APBD Kabupaten Bantul.

4. 1. 2. Bidang Kesehatan

A. Capaian Kinerja Bidang Kesehatan

1) Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan yang disertai dengan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini perlu diimbangi dengan regulasi agar tenaga kerja benar-benar kompeten di bidangnya, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelayanan yang dapat berakibat fatal. Regulasi tersebut antara lain dengan menerbitkan aturan bahwa setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisionis, analis, radiographer, fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki surat izin sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya.

Tabel IV.6 Jumlah Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Dokter Umum	127	154	238	307	417	617
2	Jumlah Dokter Spesialis	61	65	202	215	304	349
3	Jumlah Penduduk	928.676	931.356	939.718	949.325	954.706	956.513
4	Rasio Dokter Umum (per 1000 penduduk)	0,14	0,17	0,25	0,32	0,44	0,65
5	Rasio Dokter Spesialis (per 1000 penduduk)	0,066	0,070	0,21	0,23	0,32	0,36

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022



Pada Tahun 2021 rasio dokter umum per 1000 penduduk mencapai 0,65 artinya satu dokter melayani 1.550 penduduk. Hal ini menunjukkan masih kurangnya dokter di Kabupaten Bantul. Upaya pemenuhan kebutuhan dokter dengan cara rekrutmen tenaga dokter baik melalui tenaga kontrak maupun ASN.

2) Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum

Keberhasilan program pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan oleh pemerintah dan swasta. Fasilitas Pelayanan Kesehatan didirikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Berikut di sajikan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Bantul tahun 2016-2021.

Tabel IV.7 Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	2016 (unit)	2017 (unit)	2018 (unit)	2019 (unit)	2020 (unit)	2021 (unit)
1.	Rumah Sakit Umum	10	10	11	11	10	10
2.	Rumah Sakit Khusus	5	6	5	5	6	6
3.	Balai Pengobatan	62	-	-	-	-	-
4.	Rumah Bersalin	-	-	-	-	-	-
5.	Klinik Pratama		56	64	67	70	70
6.	Klinik Utama	2	3	2	-	2	5
7.	Klinik Rawat Inap Medik Dasar	5	1	-	-	-	-
8.	Apotek	123	134	140	157	175	210
9.	Toko Obat	4	5	6	8	10	11
10.	Laboratorium Kesehatan	3	3	4	4	3	3
11.	Optik	-	-	7	7	-	-
12.	Puskesmas Rawat Inap	16	16	16	16	16	16
13.	Puskesmas Non Rawat Inap	11	11	11	11	11	11
14.	Puskesmas Pembantu	67	67	67	67	67	57
15.	Puskesmas Keliling	27	27	27	27	27	21
16.	Posyandu Balita	1137	1141	1141	1139	1139	1148
17.	Industri Kecil Obat Tradisional	10	10	2	1	2	-
18.	Pengobat Tradisional	53	57	34	41	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 – 2021 fluktuatif. Jumlah yang fluktuatif ini dikarenakan menyesuaikan regulasi yang ada terkait fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

3) Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Data sepuluh besar penyakit rawat jalan di puskesmas dalam kurun waktu 2016-2021 disajikan pada Tabel IV.8 berikut:

Tabel IV.8 Distribusi 10 Besar Penyakit Rawat Jalan di Puskesmas Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus pada Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nasofaringitis akut (common cold)	55.470	47.249	59.707	84.142	57.157	18.375
2	Hipertensi esensial (primer)	44.954	37.682	65.211	106.659	83.932	102,807
3	Myalgia	43.046	14.193	26.680	20.280	17.400	16.963
4	Diabetes mellitus nondependen insulin	20.969	1.859	4.944	10.569	13.542	18.645
5	Dyspepsia	18.971	14.287	25.852	34.627	25.517	18.363
6	Dermatitis (asma)	5.954	2.489			1.162	41
7	Artitis lainnya/ faringitis akut	5.848	1.958	4.815	11.181	585	2
	Demam tanpa sebab jelas	6.164					
8	Diare dan gastroenteritis yang diduga berasal dari infeksi	7.084	5.208	10.966	10.294	3.338	40
9	Skizofrenia		4.402	54.46.00	4.466	4661	53
10	Acute pharyngitis Conjunctivitas, unspeccified		6.910	9629	12.265		
	Diabetes mellitus YTT (Non Insulin dependent diabetes mllitus)	5.782			5.356	10.482	18.645

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

Berdasarkan Tabel IV.8 diatas terlihat bahwa jumlah penderita hipertensi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menduduki peringkat pertama, disusul dengan nasofaringitis akut, dyspepsia dan Diabetes mellitus.

Tabel IV.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Indikator Perangkat Daerah					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Indikator Tujuan								
1	Usia harapan hidup (UHH)	tahun	73,5	73,56	73,66	73,77	73,86	73,89
B. Indikator Sasaran								



No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Indikator Perangkat Daerah					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 Kelahiran Hidup	87,5	72,8	108,3	99,49	157,6	374,05
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	/1000 Kelahiran Hidup	8,35	8,74	8,28	8,33	6,93	5,35
3	Prevalensi gizi buruk	%	0,38	0,41	0,41	0,41	0,31	0,12
4	Prevalensi HIV AIDS	%	0,05	0,09	0,19	0,12	0,01	<0,1
5	Angka kesakitan DBD	100.000 penduduk	266,49	57,98	19,52	140	128	42,89
C. Indikator Program								
1	Jumlah Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)	Puskesmas	27	27	27	27	27	27
2	Cakupan Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP	Puskesmas	27	27	27	27	27	27
3	Presentase Peserta PKP mendapatkan sertifikat PIRT	Persen	80	80	80	80	80	80
4	Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)	desa	NA	3	35	56	56	75
5	Presentase Cakupan Balita Ditimbang	presentase	80,1	80,9	80,8	81,47	71,57	85
6	Prevalensi Balita Stunting	presentase	NA	10,98	11,09	7,73	9,74	9
7	Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)	desa	71	72	73	74	74	75
8	Jumlah Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	puskesmas	NA	27	27	27	27	27
9	Angka bebas jentik (ABJ)	presentase	83,79	87,25	87,58	83	85	85
10	Cakupan Ibu hamil melakukan tes HIV	presentase	NA	47,9	48,38	118,26	88,91	75
11	Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	posbindu	NA	63	63,63	226	178	178

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Indikator Perangkat Daerah					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	Jumlah peserta PBI Jamkesda	orang	NA	758.131	771.128	862.338	838.108	846.807
13	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang bermitra dengan UPTD Jaminan Kesehatan Daerah	institusi	35	35	35	35	36	36
14	Jumlah instansi pendidikan yang menyampaikan laporan hasil kemitraan	institusi	NA	74	74	91	91	100
15	Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	presentase	100	100	100	100	100	100
16	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	presentase	100	100	100	100	100	100
17	Penggunaan Obat Rasional (POR)	presentase	95	97	97,97	95,36	96,39	95
18	Cakupan tindak lanjut hasil pemeriksaan BBPOM	presentase	100	100	100	100	100	100
19	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK)	Puskesmas	NA	5	27	27	27	27
20	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Puskesmas	NA	15	27	27	27	27
21	Jumlah penyusunan data dan informasi puskesmas	Puskesmas	27	27	27	27	27	27
22	Jumlah Akreditasi Rumah Sakit	Rumah Sakit	8	9	10	11	12	13
23	Cakupan Puskesmas Santun Lansia	Puskesmas	17	27	27	27	27	27
24	Persentase Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022



Beberapa hal yang perlu digaris bawahi terkait data pada Tabel IV.9 diatas adalah:

1. Umur Harapan Hidup secara umum meningkat setiap tahun dan sudah melebihi angka yang ditargetkan.
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan yang sangat menjadi perhatian adalah Angka Kematian Ibu. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Keterlambatan deteksi dini karena kurangnya kecermatan petugas dalam deteksi dini penyakit pada saat ANC (jantung, Asma, TB, hipertiroid).
 - b. Kurangnya kesadaran ibu dan keluarga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada masa hamil dan nifas.
 - c. Kurangnya pemantauan dari lingkungan (kader, masyarakat) pada ibu hamil dan nifas pada masa pandemic.
 - d. Keterlambatan Penanganan karena menunggu status positif Covid pasien.
 - e. Kesadaran dalam berKB yang masih kurang karena masih ada pasien G9.
 - f. Terdapat beberapa pasien dengan positif covid.
 - g. Terdapat beberapa pasien dengan resiko tinggi karena umur lebih dari 35 tahun.
3. IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
 - a. Angka Kematian Bayi, dapat memenuhi target karena adanya faktor pendukung sebagai berikut:
 - 1) Pemberian PMT ibu hamil KEK dan anemia.
 - 2) Pemberdayaan masyarakat dalam pendampingan ibu hamil .
 - 3) Pemberdayaan masyarakat dalam orientasi pendampingan Balita stunting.
 - 4) Penguatan peran bidan desa dalam pemantauan neonates dan bayi beresiko.
 - 5) Peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen asfiksia pada neonatal.
 - b. Prevalensi Balita Gizi Buruk, dapat memenuhi target karena adanya faktor pendukung sebagai berikut:
 - 1) Adanya Pendampingan balita gizi buruk oleh kader.
 - 2) Adanya Pelatihan PMBA bagi petugas dan kader.
 - 3) Menerapkan hasil pelatihan PMBA di posyandu.
 - 4) PMT penyuluhan pada usia pra sekolah.
 - 5) Pemantauan pemberian Tablet tambah darah pada ibu hamil minimal 90 tablet selama hamil (Fe3).

- 6) Koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program untuk *hygiene* sanitasi lingkungan.
 - 7) PMT Ibu Hamil KEK.
 - 8) Adanya Konseling sejak caten.
 - 9) Pendampingan ASI Eksklusif oleh kader pada bayi.
 - 10) Adanya konvergensi dengan lintas program.
- c. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue, dapat memenuhi target karena adanya faktor pendukung sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk sehingga penularan bisa ditekan.
 - 2) Adanya pandemi Covid menyebabkan mobilitas penduduk terbatas sehingga penularan DBD berkurang.
- d. Prevalensi HIV, dapat memenuhi target karena adanya faktor pendukung sebagai berikut:
- 1) Peningkatan akses pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko (Bumil, TBC dan IMS) dengan pengadaan rapid HIV 1 dan Sifilis yang didistribusikan ke seluruh fasyankes yang sudah mampu melaksanakan pemeriksaan HIV (27 Puskesmas dan 8 Rumah Sakit).
 - 2) Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada kelompok kunci dan pada kelompok potensial serta kelompok berisiko rendah (Bumil dan penderita TB) dengan cara intensifikasi konseling, penemuan dan pengobatan kasus melalui VCT di Puskesmas.
 - 3) Terdapat Klinik layanan Infeksi Menular Seksual (IMS) di 6 (enam) puskesmas yaitu Puskesmas Kretek, Imogiri I, Srandakan, Kasihan II, Dlingo I dan Sedayu I yang intensif melaksanakan penyuluhan, pelayanan Voluntary Counseling and Testing (VCT).
 - 4) Terdapat Klinik layanan Harm Reduction di Puskesmas Banguntapan II. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) yang ditujukan bagi Pengguna Narkoba Suntik (Penasun). Sedangkan bagi penasun yang sulit untuk terapi metadone, akan diberikan Layanan Alat Suntik Steril (LASS).
 - 5) Terdapat Klinik pelayanan Voluntary Consulting and Testing (VCT) di 27

Puskesmas dan 8 RS (RS PKU, RS Elizabeth, RS Nur Hidayah, RS Rahma Husada, RS Rajawali Citra, RSK Paru Respira, RSPAU Harjolukito, RS Panembahan Senopati). Layanan Care Support and Treatment (CST) atau Pengobatan Dukungan Perawatan (PDP) di dua (2) RS dan 1 Puskesmas, yaitu RSUD Panembahan Senopati, RSPAU Hardjo Lukitodan Puskesmas Kretek.

- 6) Adanya Penambahan layanan PDP dengan melatih puskesmas (Puskesmas Kasihan II, Puskesmas Banguntapan I, Puskesmas Srandakan, Puskesmas Piyungan dan Puskesmas Sedayu II) untuk memudahkan akses pengobatan Orang dengan HIV AIDS (ODHA).
- 7) Peningkatan penemuan penderita melalui Pengendalian Penularan Ibu dan Anak (PPIA) dengan cara tes HIV pada semua ibu hamil.

B. Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Bantul tahun 2020 – 2021

Tabel IV.10 Capaian Kinerja SPM Kabupaten Bantul Bidang Kesehatan Tahun 2020 - 2021

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi Capaian Kinerja SPM Kesehatan			
		2020		2021	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil.		100		98,22
Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Σ ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	12.088		11.569	
	Σ sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	12.708		11.779	
	1) Vaksin Tetanus Difetri (Td)	6.767	100	11.779	100
	2) Tablet Tambah Darah	577.045	100	11.779	100
	3) Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil:	18.805	100	11.779	100
	a. Test Kehamilan				
	b. Pemeriksaan HB				
	c. Pemeriksaan Golongan Darah				
	d. Pemeriksaan Glukoprotein Urin				
	4) Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	16.729	100	11.779	100
	5) Buku KIA	12.226	100	11.779	100
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin		100		99,81

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi Capaian Kinerja SPM Kesehatan			
		2020		2021	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Σ ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	12.697		11.757	
	Σ sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	12.708		11.779	
	1) Formulir Fotograf	3.582	100	11.778	99,9
	2) Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	16.729	100	11.779	100
	3) Buku KIA	12.226	100	11.779	100
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir			100		81,92
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Σ bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	10.680		9.595	
	Σ sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	12.624		11.713	
	1) Vaksin Hepatitis BO	7.560	100	11.713	100
	2) Vitamin K1 Injeksi	2.799	100	11.713	100
	3) Salep/Tetes Mata Antibiotik	2.919	100	11.713	100
	4) Formulir Bayi Baru Lahir	3.515	100	11.713	100
	5) Formulir MTBM	5.686	100	11.713	100
	6) Buku KIA	12.226	100	11.713	100
4. Pelayanan kesehatan balita			100		74,08
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	(Σ bayi baru lahir usia 12-23 + Σ balita usia 24-35 + Σ balita usia 36-59 bulan) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	39.055		41.713	
	Σ sasaran balita usia 12-59 di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	53.647		56.311	
	1) Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	19.194	100	56.311	100
	2) Formulir DDTK	26.799	100	56.311	100
	3) Buku KIA	12.226	100	56.311	100
	4) Vitamin A Biru	17.477	100	56.311	100

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi Capaian Kinerja SPM Kesehatan			
		2020		2021	
		Jumlah	%	Jumlah	%
	5) Vitamin A Merah	74.014	100	56.311	100
	6) Vaksin Imunisasi Dasar: a. HBO; b. BCG; c. Polio; d. IPV; e. DPT-HB –Hib; f. Campak Rubell	63.856	100	56.311	100
	7) Vaksin Imunisasi Lanjutan: a. DPT -HB –Hib; b. Campak Rubella	48.199	100	56.311	100
	8) Jarum Suntik dan BHP	72.328	100	56.311	100
	9) Peralatan Anafilaktik	104	100	56.311	100
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			100		90,44
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Σ anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	108.659		103.409	
	Σ semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	113.650		114.343	
	1) Buku Raport Kesehatanku	5.637	100	114.343	100
	2) Buku Pemantauan Kesehatan	4.713	100	114.343	100
	3) Kuesioner Skrining Kesehatan	36.764	100	114.343	100
	4) Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	532	100	114.343	100
	5) Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	0	100	114.343	100
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif			100		37,95
Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Σ orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	407.090		252.244	
	Σ orang usia 15-59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	584.084		664.592	

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi Capaian Kinerja SPM Kesehatan			
		2020		2021	
		Jumlah	%	Jumlah	%
	1) Pedoman dan Media KIE: a. Alat Ukur Berat Badan; b. Alat Ukur Tinggi Badan; c. Alat Ukur Lingkar Perut; d. Tensimeter; e. Glukometer; f. Tes Strip Gula Darah; g. Lancet; h. Kapas Alkohol; i. KIT IVA Tes	57.368	100	252.244	37,95
	2) Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	4.590	100	252.244	37,95
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		100		42,43
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Σ orang usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)	29.086		61.680	
	Σ semua warga negara usia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)	132.562		145.380	
	1) Strip Uji Pemeriksaan: a. Gula Darah; b. Kolesterol	14.494	100	61.680	42,43
	2) Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	29.346	100	61.680	42,43
	3) Buku Kesehatan Lansia	3.095	100	61.680	42,43
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		100		38,37
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Σ penderita hipertensi usia \geq 15 th di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	36.777		23.757	
	Σ estimasi penderita hipertensi usia \geq 15 th yang berada didalam wilayah	60.204		61.916	

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi Capaian Kinerja SPM Kesehatan			
		2020		2021	
		Jumlah	%	Jumlah	%
	kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama				
	1) Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	5.617	100	23.757	100
	2) Tensimeter	60	100	23.757	100
	3) Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	27	100	23.757	100
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus		100		54,10
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Σ penderita diabetes mellitus usia \geq 15 th di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	13.584		12.252	
	Σ estimasi penderita diabetes mellitus usia \geq 15 th yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	21.138		22.646	
	1) a. Glukometer; b. Strip Tes Gula Darah; c. Kapas Alkohol; d. Lancet	33.728	100	12.252	54,10
	2) Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	1.765	100	21.463	100
	3) Pedoman dan Media KIE	2.354	100	21.463	100
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		100		90,32
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Σ ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.178		2.248	
	Σ ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	2.353		2.489	
	1) Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	4	100	2.489	14,81

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi Capaian Kinerja SPM Kesehatan			
		2020		2021	
		Jumlah	%	Jumlah	%
	2) Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	2	100	2.489	7,41
	3) Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	955	100	2.489	100
	4) Media KIE	1.202	100	2.489	100
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis			100		100
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Σ orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	4.885		3.370	
	Σ orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun	4.885		3.370	
	1) Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	2.243	100	3.370	100
	2) Reagen Zn TB	185	100	3.370	100
	3) Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	21.342	100	3.370	100
	4) Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	3.657	100	3.370	100
	5) Catridge Tes Cepat Molekuler	4.100	100	3.370	100
	6) Formulir Pencatatan dan Pelaporan	27	100	3.370	100
	7) Pedoman/Standar Operasional Prosedur	27	100	3.370	100
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV			100		95,99
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Σ orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	12.011		13.660	
	Σ orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	12.562		14.231	
	1) Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner	2.263	100	14.231	100
	2) Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	7.143	100	13.660	95,99
	3) a. Bahan Medis Habis Pakai: b. Handschoen; c. Alkohol Swab; d. Plester; e. Lancet/ Jarum Steril;	10.238	100	13.660	95,99

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi Capaian Kinerja SPM Kesehatan			
		2020		2021	
		Jumlah	%	Jumlah	%
	f. Jarum Sduit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai				
	4) a. Alat tulis	12.101	100	14.231	100
	b. Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, nomor KTP/NIK				

Sumber : Laporan SPM Kab. Bantul tahun 2020 dan tahun 2021

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan belum semuanya mencapai 100 % pada tahun 2021. Hal dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan akses pelayanan kesehatan masyarakat terbatas. Capaian SPM terendah yaitu pelayanan kesehatan pada usia lanjut (hanya mencapai 28,98%).

4. 1. 3. Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP)

1) Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas PUPKP

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya dan sebaran pegawai sebagai berikut:

Tabel IV.11 Data Sebaran Pegawai pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

No	Bidang	Jumlah	Golongan			
			I	II	III	IV
1	Kepala Dinas	1	0	0	0	1
2	Sekretariat	27	3	14	9	1
3	Bidang Bina Marga	12	1	3	6	2
4	Bidang Cipta Karya	10	0	0	8	2
5	Bidang Sumber Daya Air	11	0	0	7	1
6	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	8	0	2	5	1
7	Bidang Bina Konstruksi	12	0	3	8	1
8	UPT Pengamatan Pengairan Winongo	8	1	3	4	0
9	UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo	7	0	6	0	1
10	UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman	3	0	1	2	0

11	JFT	1	0	1	0	0
Total		100	5	33	49	10

Sumber : DPUPKP, 2022

2) Capaian Kinerja Pelayanan Dinas PUPKP

Tingkat capaian kinerja Dinas PUPKP Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran/target tahun sebelumnya menurut urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya:

Tabel IV.12 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Perubahan Renstra					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	82,79	74,18	74,58	75,1	75,58	75,66
2	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	80	80	84	84	84	84,5
3	Persentase kecukupan air irigasi (%)	81,12	81,16	80,44	82,19	82,66	81,05
4	Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani (%)	50,13	79,69	92,06	92,49	92,49	100
5	Persentase penanganan banjir (%)	20,3	24,9	28,84	34	40,9	44,6

Sumber : DPUPKP, 2022

a. Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 265 Tahun 2017 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul, jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 376 ruas, dengan panjang 624,47 Km. Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021 tercantum pada Tabel IV.13 berikut:

Tabel IV.13 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2017 - 2021

Tahun	Panjang (Km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
2017	624,47	463,23	74,18	161,24	25,82
2018	624,47	465,73	74,58	158,74	25,42
2019	624,47	468,97	75,1	156,64	24,9



Tahun	Panjang (Km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
2020	624,47	470,98	75,42	153,49	24,58
2021	624,47	472,47	75,66	151	24,34

Sumber : DPUPKP, 2022

Jalan kondisi mantap yaitu jalan aspal kondisi baik dan sedang, sebaliknya kondisi belum mantap yaitu kondisi jalan rusak dan rusak berat. Pada Tahun 2021 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 472,47 km (75,66%) naik dari tahun sebelumnya sepanjang 470,98 km (75,42%) pada Tahun 2020. Kabupaten Bantul masih memiliki jalan dalam kondisi belum mantap dengan panjang 151 km, sehingga untuk memperlancar transportasi dan mendukung perekonomian dan pelayanan dasar masih diperlukan penangan jalan agar semua Jalan di kabupaten Bantul bisa dalam kondisi mantap.

b. Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik

Secara umum kondisi infrastruktur gedung pemerintah di Kabupaten Bantul dalam kondisi baik. Namun demikian perlu adanya peningkatan infrastruktur gedung pemerintah terutama rehabilitasi beberapa gedung yang kondisinya masih kurang memadai. Gedung yang dimaksud adalah gedung kantor seluruh OPD di Kabupaten Bantul, tidak termasuk gedung sekolah maupun puskesmas.

Jumlah bangunan Gedung dan bukan Gedung di Kabupaten Bantul mencapai 388.841 unit dengan rincian seperti Tabel berikut:

Tabel IV.14 Jumlah Bangunan Rumah dan Gedung Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Kapanewon	Jumlah Bangunan Rumah	Jumlah Bangunan Gedung	Total
1	Srandakan	10.820	588	11.408
2	Sanden	13.657	963	14620
3	Kretek	13.466	731	14.197
4	Pundong	13.083	411	13.494
5	Bambanglipuro	18.273	663	18.936
6	Pandak	12.613	591	13.204
7	Bantul	23.060	1.110	24.170
8	Jetis	23.715	744	24.459
9	Imogiri	29.736	705	30.441
10	Dlingo	17.060	711	17.771
11	Pleret	20.076	675	20.751
12	Piyungan	20.024	976	21.000

13	Banguntapan	38.187	1.682	39.869
14	Sewon	41.789	1.334	43.123
15	Kasih	43.412	1.384	44.796
16	Pajangan	18.998	961	19.959
17	Sedayu	15.924	719	16.643
Total		373.893	14.948	388.841

Sumber : DPUPKP, 2022

c. Kecukupan Air Irigasi

Secara umum jaringan irigasi yang terdapat dalam Daerah Irigasi dimanfaatkan untuk pengairan sawah dalam mendukung produksi pertanian. Air irigasi yang dimanfaatkan untuk mengairi sawah selama ini sebagian besar mengambil dari DAS Progo dan DAS Opak. Pada akhir tahun 2021 luas areal sawah yang dilayani jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Bantul seluas 6.997,86 Ha, dengan rincian seperti Tabel IV.15 dibawah ini:

Tabel IV.15 Luas Areal Sawah Yang Dilayani Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021

Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik			
	Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
2016	6.820,86	79,00	7.004,00	81,12
2017	6.907,20	80,00	7.007,35	81,16
2018	7.050,52	81,16	6.945,19	80,44
2019	7.093,69	82,16	7.096,28	82,19
2020	7.136,86	82,66	6.908,06	80,01
2021	7.180,03	83,16	6.997,86	81,05

Sumber : DPUPKP, 2022

Berdasarkan Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa kewenangan Kabupaten Bantul meliputi 118 DI terdiri dari 100 DI Permukaan dan 18 DI Air Tanah dengan luas total 9.368 Ha. Kondisi jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi baik tahun 2020 yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul adalah 82,89% (193.125,6m) melebihi dari target yang ditetapkan 82% (192.773m). Data target dan capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada

Tabel IV.16 berikut:

Tabel IV.16 Target Dan Capaian Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020

Tahun	Saluran irigasi (Primer dan Sekunder) dalam kondisi baik			
	Target (m)	%	Realisasi (m)	%

2016	190.422,09	81,00	193.957,00	82,50
2017	188.071,20	80,00	188.541,38	80,20
2018	189.247,65	80,50	190.422,09	81,00
2019	192.773,00	82,00	193.125,60	82,15
2020	193.644,82	81,50	194.761,54	81,97
2021	194.833,82	82,00	196.947,47	82,89

Sumber : DPUPKP, 2022

d. Drainase Dalam Kondisi Baik

Kondisi sistem drainase di Kabupaten Bantul masih merupakan drainase gabungan dengan sistem drainase terbuka, di mana pembuangan air limbah dan air hujan serta air kotor disalurkan dalam satu saluran. Presentase kinerja penanganan banjir mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kejadian bencana cuaca ekstrem berupa siklon tropis yang menyebabkan banjir. Diperlukan perencanaan yang komperhensif dalam kurun waktu menengah dan panjang dalam dokumen Masterplan Drainase agar penanganan banjir di Kabupaten Bantul dapat terencana dengan baik.

Tabel IV.17 Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021

No	Tahun	Target		Realisasi		Kinerja
		%	Penanganan Banjir (ha)	%	Penanganan Banjir (ha)	
1	2016	13,78	123,13	20,30	181,43	147,71
2	2017	20,56	183,71	24,90	222,49	121,11
3	2018	27,34	244,30	28,84	257,70	105,49
4	2019	34,12	303,81	34,00	257,70	99,65
5	2020	40,90	365,47	40,90	365,47	100,00
6	2021	47,68	426,05	44,60	398,53	93,54

Sumber : DPUPKP, 2022

e. Tempat Pemakaman Umum

Tempat pemakaman umum tersebar di lingkungan permukiman penduduk, beberapa merupakan makam keluarga. Sampai saat ini belum ada permasalahan di lingkungan perkampungan warga terkait tempat pemakaman, tetapi dengan pesatnya pembangunan perumahan yang berdekatan dengan lokasi perkampungan menimbulkan potensi konflik sosial antara masyarakat sekitar dengan warga perumahan yang mayoritas merupakan penduduk luar daerah. Hal ini perlu disediakan tempat pemakaman umum (TPU) yang dapat menampung warga perumahan maupun masyarakat umum.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyediakan lahan seluas 4.6 Ha sebagai TPU

yang berada di dusun Tilaman Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri. TPU ini dikelola oleh UPT di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pengelolaan dan pelayanan pemakaman diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemakaman. Peraturan turunan dari Peraturan Daerah tersebut sedang masih dalam proses penyusunan seiring dengan penyiapan sarana dan prasarana TPU.

f. Kawasan Kumuh Perkotaan Yang Tertangani

Data kawasan kumuh perkotaan tertangani pada tahun 2020 adalah 92,49% dari target akhir RPJMD Perubahan 2016 – 2021 yaitu 100%, atau sekitar 73,29 Ha dari keseluruhan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bantul yaitu 79,61 Ha pada tahun 2018 (berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati No. 220 tahun 2016).

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan identifikasi Kawasan kumuh di Kabupaten Bantul yang menghasilkan Keputusan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul dengan total luas Kawasan kumuh sebesar 330,26 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.18 Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul

No	Kapanewon	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi)	Keterangan (Dusun)
1	Pajangan	31,15	12	Dukuh, Benyo, Ngincep
2	Bantul	73,54	34	Bantul Warung, Badegan, Geblag, Serayu, Soropaten, Gemahan, Deresan, Bogoran, Cepoko, Priyan, Kweden, Taskombang, Serut, Bolon, Neco
3	Banguntapan	75,75	43	Plumbon – Karangbendo, Wiyoro, Pamotan, Bodon, Singosaren 3, Grojogan, Dladan, Kragilan, Nglaren, Salakan, Sampangan
4	Piyungan	21,58	10	Ngablak, Wanujaya Kidul, Sandeyan
5	Sewon	59,74	28	Sawahan, Kaliputih, Banyon, Semail, Randubelang, Ngireng Ireng, Geneng, Jaranan, Pelemsewu, Glugo, Glondong, Cabean, Pandes, Ngentak

No	Kapanewon	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi)	Keterangan (Dusun)
6	Kasih	40,94	17	Kasongan, Jogonalan Lor, Jogonalan Kidul, Kembaran Jetis, Brajan, Kasihan, Ngewotan/Janten
7	Sedayu	27,56	15	Sungapan Dukuh, Bakal Dukuh, Sukoharjo, Pereng Wetan, Jaten Plawonan, Watu

Sumber : DPUPKP, 2022

Penanganan kawasan kumuh dengan gerakan nasional 100-0-100 diantaranya tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%. Tahun 2018, upaya penanganan kawasan kumuh Kabupaten Bantul telah mencapai 92,06%. Kemudian pada tahun 2019, terdapat penambahan penanganan di Dusun Jaranan Banguntapan sehingga total penanganan hingga tahun 2019 hingga 2021 mencapai 92,49%.

Tabel IV.19 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administratif		Penanganan	
			Kalurahan	Kapanewon	Tahun	%
1	Gandekan	1,27	Bantul	Bantul	2017-2018	100%
2	Deresan	2,76	Ringinharjo	Bantul	-	0%
3	Mandingan	2,31	Ringinharjo	Bantul	-	0%
4	Soropaten	0,71	Ringinharjo	Bantul	2017	100%
5	Karangmojo	2,96	Trirenggo	Bantul	2017	100%
6	Kweden	0,91	Trirenggo	Bantul	-	0%
7	Jaranan	0,34	Banguntapan	Banguntapan	2019	100%
8	Jomblang	3,6	Banguntapan	Banguntapan	2017	100%
9	Blado	15,77	Potorono	Banguntapan	2017-2018	100%
10	Semoyan	1,91	Singosaren	Banguntapan	2017	100%
11	Dladan	2,7	Tamanan	Banguntapan	2017	100%
12	Ngewotan	16,97	Ngestiharjo	Kasih	2018	100%
13	Gonjen	3,92	Tamantirto	Kasih	2018	100%
14	Kalipakis	1,11	Tirtonirmolo	Kasih	2017	100%
15	Salakan	2,45	Bangunharjo	Sewon	2017	100%
16	Glugo	4,37	Panggunharjo	Sewon	2017	100%
17	Cepit	11,71	Pendowoharjo	Sewon	2018	100%
18	Pacetan	2,18	Pendowoharjo	Sewon	2017	100%
19	Pendowo	1,66	Pendowoharjo	Sewon	2017	100%
Total		79,58				92,49%

Sumber : DPUPKP, 2022

Sedangkan penanganan Kawasan kumuh berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.20 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan SK Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2021

Kapanewon	Jumlah RT/ RW	Luas Kumuh (Ha)	Pengurangan Kumuh Akhir 2021 (Ha)	Sisa Kumuh 2021 (Ha)
Banguntapan	43	75,75	18,22	57,53
Bantul	34	73,54	55,54	18
Kasihlan	17	40,94	14,5	26,44
Pajangan	12	31,15		31,15
Piyungan	10	21,58		21,58
Sedayu	15	27,56	13,85	13,71
Sewon	28	59,74	24,46	35,28
Grand Total	159	330,26	126,57	203,69

Sumber : DPUPKP, 2022

g. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Pemenuhan layanan rehabilitasi RTLH di kabupaten Bantul dilaksanakan melalui Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya dengan anggaran dari pemerintah pusat/provinsi. Selain itu juga penanganan RTLH melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Data penanganan RTLH Tahun 2016-2021 seperti pada Tabel IV.21 berikut:

Tabel IV.21 Tabel Penanganan RTLH Tahun 2016 - 2021

Tahun	Penanganan RTLH dari Sumber Anggaran (unit)				Total Penanganan RTLH (unit)
	BSPS (Unit)	DAK	APBD I	APBD II	
2016	652	0	0	0	652
2017	365	0	582	0	947
2018	952	172	517	171	1812
2019	1515	178	443	83	2219
2020	1577	139	0	0	1716
2021	925	127	0	368	1420

Sumber : DPUPKP, 2022

h. Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman sederhana sehat, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan bantuan stimulan pembangunan sarana prasarana

lingkungan seperti jalan lingkungan, drainase dan jembatan. Pembangunan Rusunawa dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh perkotaan dan menyediakan perumahan yang layak bagi MBR.

Tabel IV.22 Pembangunan Rusunawa Dan Operasional Pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta Di Kabupaten Bantul Tahun 2008 - 2018

No.	Lokasi Rusunawa	Tahun		Kapasitas	
		Pembangunan	Operasional	Twin blok	Unit
1	Panggunharjo, Sewon	2008	2010	2	198
2	Tambak, Ngestiharjo, Kasihan	2011	2012	1	96
3	Pringgolayan, Banguntapan	2012	2013	1	198
4	Tamanan, Banguntapan (Rusunawa Pekerja)	2015 (Pematangan Lahan)	2017 2018	2	190 (66 pekerja keluarga, 104 pekerja lajang)

Sumber : DPUPKP, 2022

Pada tahun 2009 di wilayah Kapanewon Sewon telah dibangun rusunawa Panggunharjo sebanyak 2 Twin Blok (TB) atau 198 unit. Pada tahun 2011 di wilayah Kapanewon Kasihan dibangun Rusunawa di Dusun Tambak, Kalurahan Ngestiharjo sebanyak satu TB atau 98 unit. Selanjutnya di wilayah Kapanewon Banguntapan dibangun rusunawa di dua Kalurahan, yaitu pada tahun 2012 di Dusun Pringgolayan, Kalurahan Banguntapan sebanyak dua TB atau 198 unit, dan pada tahun 2016 di Kalurahan Tamanan dibangun rusunawa pekerja sebanyak dua TB atau 190 unit.

Tahun 2017 Operasional 4 unit rusunawa, yaitu Rusunawa Panggunharjo, Rusunawa Ngestiharjo, Rusunawa Banguntapan, dan Rusunawa Tamanan. Selain itu peningkatan sarana dan prasarana pendukung Rusunawa Banguntapan yaitu pembangunan pos satpam dan landsekap. Tahun 2018 masih dilakukan operasional empat unit rusunawa tersebut dan pembangunan tempat parkir Rusunawa Panggunharjo dan Tamanan.

i. Pemenuhan Layanan Air Bersih dan Sanitasi.

Pemenuhan terhadap akses air bersih dan sanitasi yang layak merupakan salah satu upaya dalam menurunkan prevalensi balita stunting. Prevalensi stunting Kabupaten Bantul berhasil diturunkan secara signifikan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 10,41% menurun pada

tahun 2018 menjadi sebesar 9,75% dan menurun lagi pada tahun 2019 menjadi 7,73%. Angka prevalensi kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%. Data jumlah dan prevalensi Balita Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel IV.23 Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Tahun	Jumlah Balita yang Diukur	Jumlah Balita Stunting	Prevalensi Balita Stunting (%)
2016	48.479	5.325	10,98
2017	47.899	4.987	10,41
2018	48.553	4.733	9,75
2019	48.181	3.725	7,73
2020	18.638	1.816	9,74
2021	47.786	3.996	8,36

Sumber : Bappeda, 2021

Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di daerah yang rawan air bersih. Proporsi jumlah penduduk yang mendapat air layak pada tahun 2020 mencapai 82,36% dari target 100%. Hal ini menunjukkan belum tercapainya nilai target pemenuhan akses air layak di Kabupaten Bantul. Layanan sambungan rumah yang telah dipasang oleh PDAM hingga bulan Juli 2021 sebanyak 38.807 SR dengan pengelolaan 15 SPAM. Pada beberapa rumah tangga di Kapanewon Dlingo, Imogiri, dan Pandak, tidak semua air memenuhi syarat secara kualitas karena terjadi kesulitan mendapatkan air pada musim kemarau.

Jumlah penduduk berakses air bersih sampai tahun 2020 mencapai 100% meliputi Jaringan perpipaan 23% dan jaringan non perpipaan 72%. Jaringan perpipaan adalah jaringan air minum yang disediakan oleh PDAM dan PAMDES. Jaringan non perpipaan dapat terdiri dari: mata air terlindung, sistem pengolahan air sederhana (SIPAS), sumur (sumur gali atau bor) maupun penampungan air hujan.

Dalam upaya mendukung percepatan Kabupaten Bantul 100 % akses air minum yang aman, maka DPUPKP Kabupaten Bantul setiap tahunnya mengalokasikan anggaran

untuk program pengembangan kinerja air minum sampai dengan sambungan rumah (SR) dalam bentuk: Akses air minum/air bersih yang dikelola PDAM dan Akses air minum yang dikelola oleh kelompok masyarakat (PAMDES). Sekarang ini telah direncanakan pembangunan beberapa titik SPAM di Pleret, Dlingo, Srandakan, dan SPAM Regional Kamijoro. Data penduduk dengan akses air minum pada 17 Kecamatan/ Kapanewon tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel IV.24 Data Penduduk Dengan Akses Air Minum Tahun 2021

Kapanewon	Jumlah Rumah Tangga	Penduduk	Penduduk dengan Akses Air Minum			
			Memenuhi 4K	Persentase Memenuhi 4K	Belum Memenuhi 4K	Persentase Belum Memenuhi 4K
Srandakan	10.929	31.218	24.010	76,91	7.208	23,09
Sanden	11.524	31.972	27.622	86,39	4.350	13,61
Kretek	11.083	30.863	23.036	74,64	7.827	25,36
Pundong	12.648	35.908	33.507	93,31	2.401	6,69
Bambanglipuro	15.023	41.880	27.579	65,85	14.301	34,15
Pandak	18.261	52.013	39.692	76,31	12.321	23,69
Bantul	12.161	64.365	54.255	84,29	10.110	15,71
Jetis	22.709	58.549	38.409	65,6	20.140	34,4
Imogiri	20.596	63.542	47.732	75,12	15.810	24,88
Dlingo	22.358	39.537	38.446	97,24	1.091	2,76
Pleret	37.647	52.333	38.720	73,99	13.613	26,01
Piyungan	13.984	48.170	45.978	95,45	2.192	4,55
Banguntapan	16.252	111.955	101.995	91,1	9.960	8,9
Sewon	17.940	99.807	86.092	86,26	13.715	13,74
Kasih	34.409	103.527	90.525	87,44	13.002	12,56
Pajangan	35.548	36.040	26.452	73,4	9.588	26,6
Sedayu	16.544	47.646	37.831	79,4	9.815	20,6

Sumber : DPUPKP, 2021

Selain akses terhadap air minum, akses terhadap sanitasi atau sistem pembuangan air limbah domestik juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas Kawasan kumuh. Sistem pembuangan air limbah di Kabupaten Bantul pada kegiatan domestik/rumah tangga maupun home industry saat ini masih dikelola secara individual/sendiri-sendiri (*on site sanitation*) yang dialirkan ke saluran pembuangan umum ke dalam tanah. Kenyataan tersebut dapat menimbulkan terjadinya pencemaran terhadap tanah dan air yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Untuk itu pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pembuangan air limbah yang memadai sebagai salah satu kebutuhan masyarakat.

Sampai dengan tahun 2021 telah terbangun sanitasi komunal (IPAL Komunal)

sebanyak 144 unit dari dana DAK/APBD dan dari dana pusat (USRI/PNPM). Sedang untuk sambungan rumah terpusat di APY telah tersambung 3124 SR atau 52,07% dari target akhir 6000 unit (SR) ke IPAL komunal terpusat di Sewon. Data IPAL Komunal dan akses sanitasi sampai dengan tahun 2021 seperti pada Tabel IV.25 berikut.

Tabel IV.25 Data IPAL Komunal Dan Jumlah Pengguna (KK) Menurut Kapanewon Di Kabupaten Bantul Tahun 2021

Kapanewon	Jumlah IPAL Komunal	Jumlah Pengguna (KK)
Srandakan	10	814
Sanden	2	181
Kretek	2	143
Pundong	8	677
Bambanglipuro	3	247
Pandak	7	583
Bantul	20	1.929
Jetis	18	1.424
Imogiri	12	877
Dlingo	1	32
Pleret	15	1.260
Piyungan	2	127
Banguntapan	16	1315
Sewon	13	1.102
Kasih	5	391
Pajangan	0	0
Sedayu	10	817
Total	144	11.919

Sumber : DPUPKP Kab. Bantul, 2021

Tabel IV.26 Data Penduduk Dengan Akses Sanitasi Tahun 2021

No	Kapanewon	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Sambungan Rumah			Jumlah Rumah Tangga dengan SPALD-S	Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi
			SPALD-T Regional	SPALD-T Pemukiman	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Srandakan	11,059		770	770	10,289	11,059
2	Sanden	11,600		181	181	11,419	11,600
3	Kretek	11,172		136	136	11,036	11,172
4	Pundong	12,664		677	677	11,987	12,664
5	Bambanglipuro	15,120	170	247	417	14,873	15,120
6	Pandak	18,376		501	501	17,875	18,376
7	Pajangan	12,361				12,361	12,361
8	Bantul	22,969		1,929	1,929	21,040	22,969
9	Jetis	20,804		1,424	1,424	19,380	20,804
10	Imogiri	22,513		862	862	21,651	22,513
11	Dlingo	14,019		32	32	13,987	14,019
12	Banguntapan	18,147	456	1,378	1,834	16,313	18,147
13	Pleret	16,394		1,682	1,682	14,712	16,394
14	Piyungan	38,229		110	110	38,119	38,229
15	Sewon	34,875	1,416	969	2,385	32,490	34,875
16	Kasih	36,020	1,252	391	1,643	34,377	36,020
17	Sedayu	16,808		817	817	15,991	16,808
Total		333,130	3,294	12,106	15,230	317,900	333,130

Sumber : DPUPKP, 2021

B. Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020 – 2021

Tabel IV.27 Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2021

Jenis Pelayanan	Mutu Pelayanan	Realisasi Pencapaian SPM Pekerjaan Umum			
		2020		2021	
Indikator		Jumlah	%	Jumlah	%
1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari			100		
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	Σ rumah tangga terlayani air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	329.616		333.130	
	Σ rumah tangga di kabupaten/kota	329.616		333.130	
	1) Pelayanan SPAM jaringan perpipaan;	46.445	100	53.037	
	2) Pelayanan SPAM bukan jaringan perpipaan	283.171	100	280.093	

Jenis Pelayanan	Mutu Pelayanan	Realisasi Pencapaian SPM Pekerjaan Umum			
		2020		2021	
Indikator		Jumlah	%	Jumlah	%
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik			100		
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	Σ rumah tangga terlayani pengolahan air limbah melalui SPALD-S dan SPALD-T	329.616		333.130	
	Σ rumah tangga di kabupaten/kota	329.616		333.130	
	1) Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	314.755	100	129	
	2) Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	112	100	317.900	
	3) Pelayanan penyediaan prasarana dan/atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	14.749	100	15.230	

Sumber : Laporan SPM Kab. Bantul tahun 2020 dan tahun 2021

Dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang urusan Pekerjaan umum yang telah dilaksanakan terkait dengan penerapan SPM berdasarkan telaah pada dokumen Renstra

Perubahan 2021 – 2026 yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat faktor pendorong dan penghambat, diantaranya sebagai berikut:

Tabel IV.28 Faktor Pendorong dan Penghambat Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bantul

No	Telaah Renstra DPUPKP terkait penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya pemenuhan akses air minum	Cakupan dan kualitas air minum layak belum terpenuhi
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya pemenuhan akses sanitasi	Cakupan dan kualitas penyediaan akses sanitasi layak yang belum terpenuhi

C. Capaian Kinerja SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2020 – 2021

Tabel IV.29 Capaian Kinerja SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bantul tahun 2020 – 2021

Jenis Pelayanan	Indikator/Mutu Pelayanan	Realisasi Capaian Kinerja SPM Bidang Perumahan Rakyat			
		2020		2021	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	10	100	0	0
Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	Σ unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	10		0	
	Σ total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	10		0	
	1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana;	0	100	0	0
	2) Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana;	0	100	0	0
	3) Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana;	10	100	0	0
	4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	100	0	0
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	0	100	5	100

Jenis Pelayanan	Indikator/Mutu Pelayanan	Realisasi Capaian Kinerja SPM Bidang Perumahan Rakyat			
		2020		2021	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi	Σ rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	0	0	0	
	Σ total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	0		0	
program pemerintah daerah	1) Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan;	0	100	0	0
	2) Subsidi uang sewa;	0	100	0	0
	3) Penyediaan rumah layak huni	0	100	5	100

Sumber : Laporan SPM Kab. Bantul tahun 2020 dan tahun 2021

Dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang urusan Perumahan Rakyat yang telah dilaksanakan terkait dengan penerapan SPM berdasarkan telaah pada dokumen Renstra Perubahan 2021 – 2026 yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat faktor pendorong dan penghambat, diantaranya sebagai berikut:

Tabel IV.30 Faktor Pendorong dan Penghambat Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bantul

No	Telaah Renstra DPUPKP terkait penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Perpindahan pengampu SPM bidang Perumahan Rakyat dari BPBD ke DPUPKP
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Perpindahan pengampu SPM bidang Perumahan Rakyat dari BPBD ke DPUPKP

4. 1. 4. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah pengampu Sub Urusan Ketentraman dan



Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja)

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM Aparatur di Lingkungan Satpol PP terdiri dari PNS/CPNS dan Pegawai Non PNS. Jumlah SDM di lingkungan Satpol PP disajikan pada Tabel IV.31 berikut:

Tabel IV.31 Jumlah SDM di Lingkungan Satpol PP

No	Sekretariat/ Bidang	Golongan				Jenis Kelamin			Pendidikan				Status Kepegawaian		Jumlah (orang)	
		I	II	III	IV	L	P	SD	SMP	SMA	D III	S1	S2	PNS/CPNS		NON PNS
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja				1	1							1	1		1
2	Sekretariat			7	1	8	7			9	2	3	1	8	7	15
3	Bidang Penegakan Peraturan Daerah			1		5	2			6		1		1	6	7
4	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	4	12	1	80	2	1	1	76	1	1	2	18	64	82
5	Bidang Perlindungan Masyarakat			4	1	7	1			5		3	2	5	5	10
6	Jabatan Fungsional Tertentu		2	5		4	3			4		3		7		7
TOTAL		1	6	29	4	105	15	1	1	100	3	11	6	40	82	122

Sumber : Satpol PP, 2022

Dari Tabel IV.31 diatas dapat diketahui bahwa aparatur di Satpol PP sebanyak 122 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 40 orang dan tenaga kontrak sebanyak 82 orang. Berdasarkan data tersebut, aparatur Satpol PP didominasi oleh tenaga kontrak yang bertugas sebagai Petugas Keamanan : 8 Orang; Patugas Patroli : 8 Orang; Petugas Penanganan Kendaraan : 6 Orang; Petugas Kebersihan : 2 Orang; Petugas Pelayanan Umum : 8 Orang; Petugas Intel : 8 Orang; Petugas Pengendali Operasi : 7 Orang; Petugas Penertiban : 8 Orang; Petugas Pengelola Perlengkapan Kantor : 3 Orang; Petugas Sarana Perkantoran : 8 Orang; Petugas Linmas : 8 Orang; Petugas Penegakan Perda : 8 Orang.

2) Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagai pengampu sub urusan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam melaksanakan tugas Penegakan Perda melalui operasi Yustisi dan Non Yustisi serta melaksanakan patroli

wilayah untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Operasi Yustisi dan non yustisi dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah untuk meminimalisir penyakit masyarakat dan pelanggaran peraturan daerah dengan tujuan akhir menurunnya Pelanggaran Perda.

Kinerja pelayanan Satpol PP selama kurun waktu Tahun 2016-2021 sesuai Perubahan Perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel IV.32 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Perangkat Daerah					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Penegakan Perda	Persen	78	78	69	70	70	72
2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	100	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul, 2021

Hasil presentase penegakan perda didapatkan dari jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul terhadap jumlah peraturan Daerah yang memuat sanksi dengan rincian jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan. Pada tahun 2021 sejumlah 18 Perda dari 25 Perda yang memuat sanksi ditegakkan. Pencapaian kinerja Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 dilaksanakan dengan adanya penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), Anak Jalanan, dan penyelesaian terhadap adanya aduan masyarakat yang telah diselesaikan dengan sosialisasi, pembinaan dan penertiban.

Faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja Satpol PP dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dan terbatas terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti Intelijen, PPNS, maupun Pengadaan barang/ Jasa.
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Trantibumlinmas untuk menunjang ketugasan personil.
3. Koordinasi dan kerjasama antar instansi, kabupaten/kota, masyarakat dan stakeholders

masih belum dapat optimal dan kurang sinergitas.

4. Pengawasan, pengendalian dan penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah belum optimal.
5. Pemetaan Wilayah perbatasan rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang masih belum mendapat perhatian khusus.
6. Belum optimalnya penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Sedangkan faktor-faktor yang mendukung kinerja pelayanan Satpol PP antara lain:

1. Mekanisme budaya kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur baik dari kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai.
3. Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang ketugasan kantor dan di lapangan.
4. Adanya Regulasi atau produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Terjalannya Solidaritas hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi.
6. Dukungan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja instansi baik melalui APBD Murni maupun APBD Perubahan.

B. Capaian Kinerja Perangkat Daerah pengampu Sub Urusan Bencana dan Pemadam Kebakaran (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

1) Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya manusia sejumlah 188 personil dengan rincian 32 orang berstatus ASN dan 156 personil Non ASN.



Grafik IV.1 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Sehubungan dengan ketugasan BPBD yang melaksanakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang hampir seluruh kegiatannya membutuhkan dukungan fisik, sebagian besar personil BPBD Kabupaten Bantul adalah laki-laki atau sebesar 85,11% atau 160 orang dan sisanya perempuan sebanyak 28 orang atau 14,89% dari total seluruh personil.

Pemenuhan kebutuhan ideal kuantitas dan kualitas SDM pada BPBD di Kabupaten Bantul masih perlu ditingkatkan, rincian kuantitas dan kualitas SDM BPBD Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel IV.33 berikut:

Tabel IV.33 Analisis SDM Aparatur berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Rincian Jabatan	Kebutuhan Ideal	Kondisi Saat Ini	Deviasi
1	Jabatan Struktural	8	8	0
a	Kepala Badan	1	1	0
b	Kepala Pelaksana	1	1	0
c	Sekretaris	1	1	0
d	Kepala Bidang	3	3	0
e	Kepala Subbagian	2	2	0
2	Jabatan Fungsional (JF)	213	10	-203
a	Analisis Kebencanaan	15	0	-15
b	Penata Penanggulangan Bencana	27	5	-22
c	Analisis Kebakaran	18	3	-15
d	Pemadam Kebakaran	148	0	-148
e	Perencana	2	1	-1
f	Analisis Kepegawaian	1	0	-1
g	Arsiparis	1	1	0
h	Pranata Komputer	1	0	-1
3	Jabatan Pelaksana	46	18	-28
a	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	-1
b	Analisis Data dan Informasi	1	0	-1
c	Analisis Perbendaharaan	1	0	-1
d	Analisis Mitigasi Bencana	3	1	-2
f	Analisis Bencana	4	2	-2
e	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	1	0	-1
f	Konselor	1	0	-1
g	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	1	0	-1
h	Bendahara	1	1	0
i	Penyusun Bahan Sistem Jaminan Mutu	1	0	-1
j	Pengelola Gudang	2	0	-2
k	Teknisi Sarana dan Prasarana	2	0	-2
l	Teknisi Peralatan dan Mesin	3	0	-3
m	Pengelola Data	6	1	-5
n	Verifikator Keuangan	1	0	-1
o	Pengadministrasi Umum	9	4	-5

No	Rincian Jabatan	Kebutuhan Ideal	Kondisi Saat Ini	Deviasi
p	Pengadministrasi Keuangan	1	1	0
q	Pengadministrasi Kepegawaian	1	0	-1
r	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2	1	-1
s	Pengemudi	1	0	-1
t	Pramu Bakti	3	7	4
Total		267	36	-231

Sumber : BPBD Kab. Bantul, 2022

Berdasarkan pada Tabel IV.33 masih terdapat deviasi yang tinggi antara kondisi ideal dengan kondisi saat ini. Tingkat keterisian kebutuhan personil ASN dari jumlah 267 hanya 36 personil atau 13,48%. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mengoptimalkan Tenaga Non ASN sehingga dapat meningkatkan tingkat keterisian menjadi 71,16% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.34 Optimalisasi Tenaga Non ASN dalam Peningkatan Cakupan SDM

No	Kelompok Jabatan	Kebutuhan	Pengisian		Jumlah	Tingkat Keterisian
			ASN	Non ASN		
1	Jabatan Struktural	8	8	0	8	100,00%
2	Jabatan Fungsional	213	10	100	110	51,64%
3	Jabatan Pelaksana	46	18	54	72	156,52%
	Jumlah	267	36	154	190	71,16%

Sumber : BPBD, 2022

2) Trend Kejadian Bencana dan Kebakaran

Tabel IV.35 Kejadian Bencana dan Kebakaran di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021

No	Jenis Ancaman	Satuan	Jumlah Kejadian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kebakaran	Kali	58	111	209	227	130	124
2	Banjir	Kali	7	4	0	8	0	5
3	Tsunami	Kali	0	0	0	0	0	0
4	Gempa (dirasakan)	Kali	11	27	7	6	13	11
5	Tanah Longsor	Kali	77	319	23	176	85	93
6	Kekeringan	Desa	0	0	0	0	0	0
7	Gelombang Ekstrim	Kali	0	1	2	0	1	0
8	Cuaca Ekstrim	Kali	39	3	22	16	22	18
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	Kali	0	0	0	0	1	1

Sumber : BPBD, 2022

Tren kejadian bencana khususnya bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bantul semakin meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan adanya perubahan iklim karena pemanasan global. Pemanfaatan ruang di wilayah rawan bencana menambah tingginya angka risiko terjadinya bencana dan kerugian ekonomi serta korban yang diakibatkan oleh bencana tersebut.

3) Indeks Resiko Bencana dan Ketahanan Daerah

Tabel IV.36 Perkembangan Indeks Risiko Bencana wilayah DIY tahun 2015-2021

No	Kabupaten/Kota	Tahun							Kelas Risiko 2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kulon Progo	203,2	203,2	203,2	203,2	203,2	203,2	180,8	Tinggi
2	Bantul	187,2	187,2	187,2	187,2	187,2	187,2	157,3	Tinggi
3	Gunungkidul	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	142,09	Sedang
4	Sleman	153,6	105,45	99,46	90,17	83,72	83,72	78,96	Sedang
5	Kota Yogyakarta	124,8	80,88	78,46	73	72,86	72,86	72,57	Sedang

Sumber : BPBD, 2022

Selama periode 7 tahun, nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten termasuk dalam wilayah Kategori Risiko Tinggi. Hal tersebut disebabkan masih belum optimalnya Kapasitas Daerah yang diukur dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai bagian dari komponen perhitungan Indeks Risiko Bencana. Pada tahun 2022 dilaksanakan penilaian IKD tahun 2021 sebagai baseline yang dapat dimasukkan dalam penilaian IRB tahun 2022. Berdasarkan penilaian terhadap 71 Indikator, diperoleh nilai IKD Kabupaten Bantul sebesar 0,89 atau masuk dalam kategori tinggi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.37 Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2021

No	Prioritas	Nilai
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	1,00
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,97
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,83
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,78
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,91
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,92
Indeks Kapasitas Daerah (IKD)		0,89 (Tinggi)

Sumber : BPBD, 2021

Berdasarkan hasil pengukuran IKD tersebut, terdapat 5 Prioritas yang masih harus ditingkatkan sebagai usaha mencapai Bantul Tangguh Bencana.

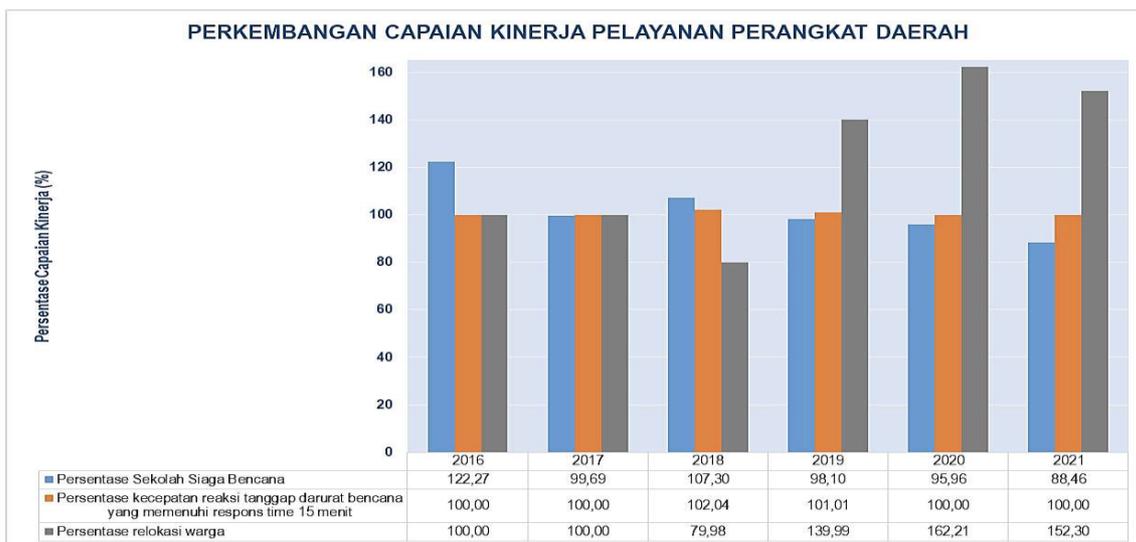


Grafik IV.2 Komposisi Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2019

4) Capaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kinerja pelayanan selama 5 tahun secara umum sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, yaitu: Persentase Sekolah Siaga Bencana mencapai 88,46%; Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi response time 15 menit mencapai 100%; dan Persentase relokasi warga mencapai 152,30%.

Persentase Sekolah Siaga Bencana sampai dengan akhir periode perencanaan belum dapat tercapai disebabkan adanya kebijakan penundaan kegiatan saat pandemi COVID-19. Perkembangan capaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Grafik IV.3 berikut:



Grafik IV.3 Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

C. Capaian Kinerja SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2020 – 2021

Tabel IV.38 Capaian Kinerja SPM Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Bantul tahun 2020 – 2021

Sub Urusan		Mutu Layanan	Realisasi Capaian Kinerja SPM Trantibumlinmas			
			2020		2021	
Jenis Indikator	Layanan Dasar		Jumlah	%	Jumlah	%
1. Sub urusan ketentraman dan ketertiban						
a.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi			100		100
	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi		0	100	0	100
	1)	warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	100	0	100
	2)	warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	100	0	100
b.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu			100		100
	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu		32	100	18	100
	1)	Penegakan Perda sesuai SOP	32	100	18	100
	2)	Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	32	100	18	100
	3)	Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	32	100	18	100
2. Sub urusan bencana						
a.	Pelayanan informasi rawan bencana			100		100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		954.706	100	897.306	100
	1)	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	9	100	9	100
	2)	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	954.706	100	956.513	100
	3)	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana Test Kehamilan;	954.706	100	956.513	100

Sub Urusan		Mutu Layanan	Realisasi Capaian Kinerja SPM Trantibumlinmas			
			2020		2021	
Jenis Indikator	Layanan Dasar		Jumlah	%	Jumlah	%
		4) Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	26	100	109	100
		5) Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	80	100	109	100
b.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		954.706	100	956.513	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		954.706	100	956.513	100
c.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			100		100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		3.159	100	56.696	100
		1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3.159	100	56.696	100
		2) Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	3.159	100	56.696	100
		3) Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	4	100	12	100
		4) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	2	100	1	100
		5) Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	3.159	100	56.696	100
		6) Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas	0	100	0	100
3.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			100		
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran		130	100	390	100
		1) Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak;	130	100	390	100
		2) Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	0	0	0	100

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Sub Urusan		Mutu Layanan	Realisasi Capaian Kinerja SPM Trantibumlinmas			
			2020		2021	
Jenis Indikator	Layanan Dasar		Jumlah	%	Jumlah	%

Sumber : Laporan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2021, 2022



4.1.5. Bidang Sosial

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial

1) Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Keseluruhan jumlah SDM pada Dinas Sosial berjumlah 31 pegawai. Dilihat dari komposisi gender, pegawai perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pegawai laki-laki. Jumlah pegawai perempuan adalah sebanyak 19 orang atau 61,3% dari total keseluruhan pegawai, sedangkan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 12 orang atau 38,7%. Kualifikasi SDM dari sisi pendidikan memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan SDM yang dimiliki relatif baik. Hal ini ditunjukkan dengan sebanyak 20 pegawai memiliki kualifikasi pendidikan tinggi atau 64,5% dari keseluruhan, dan sebanyak 11 pegawai atau 35,5% berpendidikan SMA/SMK.

Tabel IV.39 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan

No	Gol/ Ruang	Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah
		L	P	SD	SMP	SMA/ K	DIPLOMA	S1	S2	
1	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	II/c	3	-	-	-	3	-	-	-	3
4	II/d	3	-	-	-	1	2	-	-	3
5	III/a	2	1	-	-	1	1	1	-	3
6	III/b	2	7	-	-	5	1	3	-	9
7	III/c	1	-	-	-	-	-	1	-	1
8	III/d	1	6	-	-	1	-	5	1	7
9	IV/a	2	2	-	-	-	-	1	3	4
10	IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	IV/c	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Jumlah		15	16	-	-	11	4	11	5	31

Sumber : Dinas Sosial Kab. Bantul, 2022

2) Sarana Sosial

Sarana sosial yang dimiliki Kabupaten Bantul adalah panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi. Jumlah sarana sosial sampai tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada

Tabel IV.40:

Tabel IV.40 Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah
1	2016	27
2	2017	26
3	2018	26
4	2019	43
5	2020	52

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Bantul, 2021

3) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh Bantuan Sosial

PMKS adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Kondisi tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dari kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Data jenis PMKS di Kabupaten Bantul selama tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel IV.41 berikut:

Tabel IV.41 Data PMKS di Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2021

No	Jenis PMKS	Tahun (orang)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Anak Balita Terlantar	n/a	110	74	65	34	31
2	Anak Terlantar	n/a	2.094	1.862	1.731	1.475	1.277
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	n/a	63	87	124	121	74
4	Anak Jalanan	n/a	56	14	12	5	6
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	n/a	625	446	450	353	352
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	n/a	54	81	115	114	2
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	n/a	54	81	115	114	74
8	Lanjut Usia Terlantar	n/a	9.278	8.971	8.085	7.684	7.208
9	Penyandang Cacat/ disabilitas	n/a	5.900	6.324	6.137	6.535	6.264
10	Tuna Susila	n/a	83	71	46	24	35
11	Gelandangan	n/a	29	38	35	12	32



No	Jenis PMKS	Tahun (orang)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	Pengemis	n/a	25	25	22	25	21
13	Pemulung	n/a	153	156	154	66	133
14	Korban Minoritas	n/a	0	0	0	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLP)	n/a	107	155	151	47	105
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	n/a	n/a	184	127	103	77
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	n/a	101	100	97	21	71
18	Korban Trafficking	n/a	1	2	1	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	n/a	163	210	229	231	113
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	n/a	54	69	57	30	49
21	Korban Bencana Alam	n/a	n/a	61	21	405	533
22	Korban Bencana Sosial	n/a					
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	n/a	2.771	3.068	2.991	2.865	2.714
24	Fakir Miskin	n/a	57.210	57.022	52.509	50.609	57.299
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	n/a	1.185	1.329	1.319	1.228	1.198
26	Komunitas Adat Terpencil	n/a					
	Jumlah	n/a	80.116	80.430	74.593	72.101	77.668

Sumber : Dinas Sosial Kab. Bantul, 2022

Data Tabel IV.41 menunjukkan jenis PMKS terbesar adalah fakir miskin, lanjut usia terlantar, Penyandang Disabilitas, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dan anak terlantar. Upaya penanganan yang dilakukan terhadap PMKS berupa pelayanan rehabilitasi antara lain : meningkatkan mentalitas anak yatim, meningkatkan keterlibatan lanjut usia potensial dalam usaha kesejahteraan sosial, Penyelenggaraan penanganan jenazah terlantar, Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian bagi PMKS anak, mengurangi permasalahan anak putus sekolah dan anak berhadapan dengan hukum melalui pelayanan jamkesus dengan bekerjasama dengan Bapeljamkesus DIY, pemberian fasilitas konsumsi (perumahan) ke 19 panti, perawatan dan pemakaman jenazah terlantar, dan sosialisasi peduli PMKS

B. Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Sosial

Tabel IV.42 Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Bantul tahun 2020 - 2021

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi Capaian Kinerja SPM Bidang Sosial			
		2020		2021	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti		86,67		100
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	6.535	100	6.264	100
	Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	6.535		6.264	100
	1. layanan data dan pengaduan	3.158	100	3.249	100
	2. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	30	100	21	100
	3. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	100
	4. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	100
	5. penyediaan permakanan	125	100	287	100
	6. penyediaan sandang	105	100	30	100
7. penyediaan alat bantu	17	100	133	100	

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi Capaian Kinerja SPM Bidang Sosial			
		2020		2021	
		Jumlah	%	Jumlah	%
	8. penyediaan perbekalan kesehatan	135	100	28	100
	9. pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	105	100	127	100
	10. pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang	105	100	93	100
	11. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat menikah, dan/atau kartu identitas anak	10	100	24	100
	12. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	3.818	100	5.485	100
	13. pemberian penelusuran keluarga	30	100	4	100
	14. pemberian reunifikasi dan/atau reintegrasi keluarga	38	100	1	100
	15. layanan rujukan	30	100	65	100
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti			86,67		100
Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	1.475	100	1.308	100
	Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	1.475		1.308	
	1. layanan data dan pengaduan	809	100	734	100
	2. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	111	100	1	100
	3. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah	0	0	0	100

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi Capaian Kinerja SPM Bidang Sosial			
		2020		2021	
		Jumlah	%	Jumlah	%
	yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru				
4.	penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	100
5.	penyediaan permakanan	1.475	100	130	100
6.	penyediaan sandang	1.475	100	74	100
7.	penyediaan alat bantu	1	100	57	100
8.	penyediaan perbekalan kesehatan	1.475	100	130	100
9.	pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	1.475	100	88	100
10.	pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang	1.475	100	111	100
11.	fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat menikah, dan/atau kartu identitas anak	30	100	31	100
12.	akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	933	100	1.140	100
13.	pemberian penelusuran keluarga	3	100	5	100
14.	pemberian reunifikasi dan/atau reintegrasi keluarga	27	100	1	100
15.	layanan rujukan	3	100	4	100

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi Capaian Kinerja SPM Bidang Sosial			
		2020		2021	
		Jumlah	%	Jumlah	%
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti			86,67		100
Persentase warga lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	Jumlah warga lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	7.684	100	7.208	100
	Populasi warga lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	7.684		7.208	
	1. layanan data dan pengaduan	3.676	100	3.490	100
	2. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	2	100
	3. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	8	100	0	100
	4. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	100
	5. penyediaan permakanan	1.411	100	1.292	100
	6. penyediaan sandang	110	100	96	100
	7. penyediaan alat bantu	9	100	14	100
	8. penyediaan perbekalan kesehatan	370	100	1.292	100

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi Capaian Kinerja SPM Bidang Sosial			
		2020		2021	
		Jumlah	%	Jumlah	%
	9. pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	370	100	200	100
	10. pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang	370	100	824	100
	11. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat menikah, dan/atau kartu identitas anak	3	100	38	100
	12. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	4.564	100	6.498	100
	13. pemberian penelusuran keluarga	5	100	4	100
	14. pemberian reunifikasi dan/atau reintegrasi keluarga	5	100	4	100
	15. layanan rujukan	8	100	8	100
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		86,67		100
Persentase gelandangan dan pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	40	100	53	100
	Populasi gelandangan dan pengemis terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	40		53	
	1. layanan data dan pengaduan	14	100	22	100
	2. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	4	100
	3. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki	3	100	0	100

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi Capaian Kinerja SPM Bidang Sosial			
		2020		2021	
		Jumlah	%	Jumlah	%
	kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru				
4.	penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	100	0	100
5.	penyediaan permakanan	3	100	53	100
6.	penyediaan sandang	3	100	53	100
7.	penyediaan alat bantu	3	100	0	100
8.	penyediaan perbekalan kesehatan	40	100	53	100
9.	pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	40	100	2	100
10.	pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang	40	100	2	100
11.	fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat menikah, dan/atau kartu identitas anak	3	100	53	100
12.	akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	19	100	45	100
13.	pemberian penelusuran keluarga	40	100	1	100
14.	pemberian reunifikasi dan/atau reintegrasi keluarga	37	100	8	100
15.	layanan rujukan	3	100	15	100

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi Capaian Kinerja SPM Bidang Sosial			
		2020		2021	
		Jumlah	%	Jumlah	%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota		100		100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	405	100	1.201	100
	Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	405		1.201	
	1. Permakanan	200	100	706	100
	2. Sandang	21	100	113	100
	3. Tempat penampungan pengungsi	75	100	75	100
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	200	100	495	100
	5. Dukungan psikososial	12	10	495	100

Sumber : Laporan SPM Kabupaten Bantul tahun 2020 dan tahun 2021

Dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang urusan Sosial yang telah dilaksanakan terkait dengan penerapan SPM berdasarkan telaah pada dokumen Renstra Perubahan 2021 – 2026 yang diampu oleh Dinas Sosial terdapat faktor pendorong dan penghambat, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Faktor Penghambat:
 - a. Masih terdapat PMKS yang belum terlayani SPM.
 - b. Pemenuhan dasar belum dapat terakomodir secara keseluruhan, terutama yang melibatkan peranan sosial untuk papan.
 - c. Operasional shelter masih harus dioptimalkan terkait penanganan PMKS secara teknis.
- 2) Faktor Pendorong:
 - a. Jumlah PSKS yang terus dikembangkan dan diberdayakan dalam penanganan PMKS.
 - b. Kerjasama dengan mitra LKS.

4. 2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penerapan SPM di Kabupaten Bantul diketahui kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM, yaitu:

4. 2. 1. Bidang Pendidikan

1. Adanya siswa pendidikan dasar yang putus sekolah.
2. Kualitas pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal/kesetaraan belum memadai/merata.
3. Sarana prasarana pendidikan baik formal maupun non formal belum memadai/merata.
4. Ketersediaan data pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal/kesetaraan belum memadai.

4. 2. 2. Bidang Kesehatan

1. Ketersediaan data bidang kesehatan belum memadai.
2. Belum maksimalnya kerja sama dengan jejaring swasta dalam pelaporan SPM, sehingga penduduk yang mengakses fasyankes swasta belum terdata.
3. Adanya irisan capaian beberapa indikator yang belum mampu tertangkap oleh sistem, misalnya ibu hamil yang termasuk usia produktif, hanya tercatat pada SPM ibu hamil.
4. Kurangnya kesadaran sebagian ibu hamil dan bersalin akan pentingnya kunjungan ke fasyankes bagi kesehatan dan keselamatan mereka.
5. Masih adanya kegagalan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) pada bayi baru lahir.
6. Kurangnya kesadaran ibu untuk membawa balitanya ke Posyandu.
7. Kurang optimalnya kerjasama antara wali murid dan guru dalam pemanfaatan aplikasi mobscreen penjarkes bagi pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar mengakibatkan aplikasi ini belum dimanfaatkan dengan baik.
8. Belum optimalnya pengendalian penyakit menular. Terjadi kenaikan kasus penyakit menular terutama diare dan kasus TB.
9. Belum optimalnya edukasi kesehatan dan skrinning usia produktif.
10. Kurangnya pendampingan bagi lansia dalam pengisian instrumen deteksi gangguan mental emosional dan perilaku termasuk kepikunan.
11. Kerja sama dengan jejaring swasta untuk pelaporan kasus belum maksimal, sehingga penderita hipertensi dan diabetes melitus, yang mengakses fasyankes swasta belum

terdata.

12. Rendahnya kesadaran pasien dengan gangguan jiwa berat dan keluarganya untuk melakukan pengobatan secara rutin.
13. Penderita TB tidak taat minum obat secara rutin.

4. 2. 3. Bidang Pekerjaan Umum

1. Ketersediaan data bidang pekerjaan umum belum memadai.
2. Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau kotoran ke saluran irigasi.
3. Belum adanya Masterplan Drainase.
4. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung penyediaan air minum yang layak.
5. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung penyediaan sanitasi yang layak.

4. 2. 4. Bidang Perumahan Rakyat

1. Ketersediaan data bidang perumahan rakyat belum memadai.
2. Masih terdapat masyarakat yang tinggal di kawasan rawan longsor.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana untuk direlokasi oleh pemerintah.
4. Proses penyediaan lokasi relokasi membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar.

4. 2. 5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Belum tersedianya data warga negara terdampak penegakan Perda dan Perkada yang berhak mendapat layanan.
2. Perlindungan masyarakat belum optimal.
3. Ketersediaan data warga terdampak bencana belum memadai.
4. Kajian Risiko Bencana, dokumen RPB, dan dokumen Rencana Kontijensi, belum dilegalkan sehingga belum dapat dijadikan acuan resmi dalam implementasi kebijakan pembangunan.
5. Cakupan dan kualitas sarana kesiapsiagaan, serta Sarana Penyelamatan dan Evakuasi Korban masih perlu ditingkatkan.
6. Koordinasi lintas sektor terkait kebencanaan masih belum optimal.

7. Tingkat risiko bencana tinggi.
8. Belum optimalnya kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
9. Belum Optimalnya Sistem dan Pelaksanaan Pemulihan Pasca Bencana.
10. Belum semua Kalurahan ditetapkan sebagai Kalurahan Tanggap Bencana.
11. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran.
12. Belum optimalnya layanan pemadam kebakaran.

4. 2. 6. Bidang Sosial

1. Ketersediaan data penerima layanan sosial belum memadai.
2. Kurangnya sarana dan prasarana rehabilitasi PPKS.
3. Belum optimalnya peran pendamping PPKS dan PSKS.
4. Belum diberdayakannya lansia produktif terlantar.
5. Banyaknya kasus kekerasan, penelantaran dan eksploitasi pada anak.
6. Kurangnya sinergi, koordinasi dan pengawasan kebijakan lintas sektor dalam penanganan permasalahan sosial.
7. Belum sinerginya kesiap-siagaan kedaruratan kebencanaan dan penanganan korban bencana.

BAB. V

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENERAPAN SPM

Dalam penerapan SPM, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM di Kabupaten Bantul. Strategi dan arah kebijakan untuk masing-masing bidang SPM adalah sebagai berikut:

5.1.1. Bidang Pendidikan

Strategi dan arah kebijakan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel V.1 Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Pendidikan

Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pengelolaan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal/kesetaraan.	1. Peningkatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah.
2. Meningkatkan dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan PAUD, dasar, dan non formal/kesetaraan.	1. Peningkatan Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan non formal/kesetaraan.

5.1.2. Bidang Kesehatan

Strategi dan arah kebijakan pemenuhan SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel V.2 Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Kesehatan

Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat	1. Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat 2. Optimalisasi peran posyandu untuk layanan Kesehatan
2. Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	1. Penyediaan Layanan dan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP

Strategi	Arah Kebijakan
	2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 3. Penerbitan dan perpanjangan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Peningkatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor 2. Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan dalam Rangka Promotif Preventif 3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

5.1.3. Bidang Pekerjaan Umum

Strategi dan arah kebijakan pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel V.3 Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Pekerjaan Umum

Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata 2. Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan

5.1.4. Bidang Perumahan Rakyat

Strategi dan arah kebijakan pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel V.4 Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Perumahan Rakyat

Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	1. Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman sesuai

Strategi	Arah Kebijakan
	peraturan perundang-undangan yang berlaku

5.1.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Strategi dan arah kebijakan pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel V.5 Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Strategi	Arah Kebijakan
1. Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya	1. Peningkatan operasi yustisi dan non yustisi
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1. Reviu berkala peta bahaya, kerentanan dan kapasitas 2. Penguatan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontinjensi (Renkon) dalam Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	1. Penguatan sistem pendataan bencana daerah 2. Peningkatan kapasitas personil 3. Peningkatan cakupan dan kapasitas pengelolaan logistik dan peralatan
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	1. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana 2. Penguatan kapasitas Kawasan melalui peningkatan Desa/Kalurahan Tangguh Bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana; Rumah Sakit/Puskesmas Aman Bencana 3. Optimalisasi peran Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1. Optimalisasi pelaksanaan mitigasi struktural dan non struktural

Strategi	Arah Kebijakan
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Dokumen Rencana Kontinjensi dalam Peraturan Kepala Daerah 2. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana 3. Peningkatan Kapasitas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) 4. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Sistem Komando Terintegrasi melalui peningkatan cakupan dan kualitas gladi posko dan gladi lapang
7. Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standarisasi prasarana dan sarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri 2. Pengadaan prasarana dan sarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
8. Pemenuhan Standar Kuantitas dan Kualitas SDM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas personil melalui sertifikasi kompetensi 2. Pelaksanaan gladi Rencana Operasi (RenOps) secara berkala dan berkesinambungan
9. Penguatan Sistem Komunikasi, Operasi, Data dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) sampai tingkat Desa/Kalurahan dan bangunan obyek vital lainnya 2. Implementasi <i>Incident Command System</i> (ICS)
10. Perkuatan Sistem Pencegahan Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu berkala peta bahaya kebakaran 2. Peningkatan cakupan sosialisasi dan literasi pencegahan kebakaran 3. Penguatan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dalam Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah

Strategi	Arah Kebijakan
	4. Peningkatan cakupan dan kualitas inspeksi peralatan proteksi kebakaran
	5. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan
	6. Peningkatan peran dan kapasitas Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)
	7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran melalui Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)

5.1.6. Bidang Sosial

Strategi dan arah kebijakan pemenuhan SPM Bidang adalah sebagai berikut:

Tabel V.6 Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Sosial

Strategi	Arah Kebijakan
1. Pengoptimalan Pemberdayaan Sosial	1. Mengoptimalkan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
2. Pengoptimalan Penanganan Bencana	1. Mengoptimalkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

5.2. RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

5.2.1. Bidang Pendidikan

Tabel V.7 Rencana Aksi Bidang Pendidikan

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
			Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan														
			Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui peningkatan peran orangtua siswa dan masyarakat,														
			Perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah														
			Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal														
			Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa														
1			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Presentase Capaian SPM Pendidikan													
				Persentase capaian SPM Pendidikan	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100			
1.1			<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</i>	<i>Meningkatnya Capaian SPM Bidang SD</i>													
				<i>Persentase capaian SPM Pendidikan SD</i>	<i>Persen</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>100</i>	<i>36.892.340.097</i>	<i>100</i>	<i>37.667.720.640</i>	<i>100</i>	<i>40.293.533.444,00</i>	<i>100</i>	<i>40.713.957.444,00</i>		
			Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Baru	paket		3	n/a	-								
				Ruang Kelas Baru bertambah	Ruang					3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	100.000.000,00		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	paket		4	n/a	-								
				Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	Ruang					4	799.987.700	4	10.000.000,00	4	100.000.000,00		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	paket		2	n/a	-								
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/ Berat	Unit					2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	100.000.000,00		
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	Perlengkapan Siswa	paket		1	1									
				Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa	Unit					1	49.560.000	1	93.000.000,00	1	93.000.000,00		
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Peserta Didik			58590	36.892.340.097,00	58590	36.797.172.940,00	58590	38.885.765.000,00	58590	39.248.277.916,00		

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja								
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.2			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Laporan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	dokumen		1	n/a	-									
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang						1	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
				<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>Meningkatnya Capaian SPM Bidang SMP</i>													
					<i>Persentase capaian SPM Pendidikan SMP</i>	<i>persen</i>		n/a	100	20.578.136.700,00	100	21.579.448.960,00	100	21.961.358.448,00	100	21.961.358.448,00	100	24.327.358.448,00
				Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Baru	paket		n/a	n/a	-								
					Ruang Kelas Baru Bertambah	Ruang					n/a	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	paket		1	n/a	-								
					Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/ Berat	Ruang					1	359.750.000,00	1	62.960.000,00	1	62.960.000,00	1	62.960.000,00
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	Perlengkapan Siswa	paket		n/a	n/a	-								
					Perlengkapan Siswa yang Tersedia	paket					1	126.270.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	993.000.000,00
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Peserta Didik			24790	20.578.136.700,00	24790	21.070.678.960	24790	20.648.888.208,00	24790	20.648.888.208,00	24790	21.148.888.208,00
				Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	paket		n/a	n/a	-								
					Perlengkapan Belajar Peserta Didik yang Tersedia	paket					1	10.750.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
				Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Alat Praktikum dan Peraga Siswa	paket		96	n/a	-								
					Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	paket					1	10.750.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Laporan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	dokumen		1	n/a	-											
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang					1	1.250.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00			
1.3			<i>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i>	<i>Meningkatnya Presentase Capaian SPM Pendidikan PAUD</i>														
				<i>Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD</i>	<i>persen</i>		n/a	100	397.500.000,00	100	538.399.950,00	100	25.799.870.240,00	100	25.799.870.240,00	100	28.165.870.240,00	
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	paket		4	n/a	-									
				Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Terbangun	Unit					1	19.500.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00			



No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	paket		2	n/a	-								
				Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Unit					1	19.500.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	paket		1	n/a	-								
				Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Terehabilitasi Sedang/ Berat	Unit					1	19.500.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
			Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Perlengkapan Siswa PAUD	paket		n/a	n/a	-								
				Perlengkapan Siswa PAUD yang Tersedia	paket			1	262.515.600,00	1	205.000.000,00	1	60.000.000,00	1	993.000.000,00		
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Laporan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	paket		1	1	134.984.400,00								
				Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Peserta Didik					450	261.900.000,00	450	135.000.000,00	450	635.000.000,00		
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Laporan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	dokumen		1	n/a	-								
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Orang					1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Laporan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	dokumen												
				Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan					1295	12.999.950	1295	497.470.240,00	1295	497.470.240,00		
1.4			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Meningkatnya Capaian SPM Kesetaraan													
				Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	persen			100	266.865.000,00	100	-	100	4.867.570.240,00	100	6.319.057.324,00		
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	paket			n/a	-								
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Terbangun	Unit					1	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	paket			n/a	-								
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Terehabilitasi Sedang/ Berat	Unit					1	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
			Pengadaan perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	paket			n/a	-								
				Perlengkapan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	paket			1	266.865.000,00	1	-	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	1.061.487.084,00
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Peserta Didik					259	-	259	4.677.570.240,00	259	4.677.570.240,00	259	5.177.570.240,00
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	paket			n/a	-								
				Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	paket					1	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
2			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM													
				Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	persen			66		70		75		79		83	
2.1			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Meningkatnya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal													
				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	guru		8339	8339	43.765.350.000,00	8339	38.950.200.000,00	8339	218.010.642.120,00	8339	218.310.642.120,00	8339	220.810.642.120,00
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	guru		8339	8339	43.765.350.000,00								
				Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Dokumen					1	38.950.200.000,00	1	217.834.407.000,00	1	218.134.407.000,00	1	220.634.407.000,00
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	guru												
				Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Laporan					1	176.235.120,00	1	176.235.120,00	1	176.235.120,00	1	176.235.120,00



5.2.2. Bidang Kesehatan

Tabel V.8 Rencana Aksi Bidang Kesehatan

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
	1. Menguatkan sistem kesehatan																
			1.1. Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan	Net Death Rate (NDR)	permil	21,7		21,5		21		20,5		20		19,5	
			1.2. Peningkatan jaminan perlindungan Kesehatan bagi seluruh warga	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	157	85	88,7		80,7		72,6		64,5		56,5	
				Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	6,93	8	7,7		7,3		6,9		6,5		6,3	
	2. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat																
			2. Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan	Case Fatalilty Rate Covid 19	Persen	6,93	2,75	2,75		2,5		2,25		2		1,75	
	3. Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat																
			3.1. Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat	Insiden Rate DBD	per 100.000 penduduk	128	125	120		115		110		105		100	
			3.2. Optimalisasi peran posyandu untuk layanan Kesehatan	Prevalensi stunting	persen	9,74	9	9		8,5		8		7,5		7	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	indeks	n/a	1	1		1		1		1		1	
				Bed Occupation Rate (BOR)	persen	57,29	57,29	65	-	67		69		71		73	
				Turn Over Interval (TOI)	hari	2,69	2,69	2		2		2		2		2	
				Bed Turn Over (BTO)	kali	46,29	46,29	50		50		50		50		50	
				Cakupan Pelayanan Jamkesda	persen	100	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan Pelayanan Labkesda	persen	100	100	100		100		100		100		100	
				Indeks capaian SPM	indeks	n/a	1	1		1		1		1		1	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan	indeks	n/a	1	1	19.565.411.017	1	16.966.656.980	1	16.931.378.480	1	16.822.434.399	1	16.975.733.645

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
			UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	untuk UKM dan UKP													
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	12.088	14.265	13.958	85.500.000	14.656	187.519.900	15.388	3.359.871.986	16.156	3.360.038.654	16.964	3.360.205.320
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	12.697	13.599	13.958	20.000.000	14.656	25.000.000	15.388	98.066.666	16.156	99.633.334	16.964	101.500.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	10.680	12.959	12.689	20.000.000	15958	31.831.000	14.656	78.866.666	15.388	79.833.334	16.156	81.000.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	39.055	60.739	56.531	92.000.000	56954	52.473.500	57.381	114.766.666	57.811	116.733.334	58.244	118.800.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	108.659	121.590	121.590	80.000.000	121590	114.492.500	121.590	272.166.667	121.590	273.333.333	121.590	274.500.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	407.090	510.405	583.788	113.400.000	665519	75.000.000	758.691	174.166.667	864.908	174.833.333	985.995	175.500.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	29.086	132.562	133.887	37.766.000	135226	184.693.500	136.579	177.166.667	137.945	178.333.333	139.324	179.500.000



No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
				Sesuai Standar													
				Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	36.777	60.570	69.050	25.000.000	78717	75.000.000	89.737	130.166.667	102.300	131.333.333	116.622	132.500.000
				Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	13.587	20.563	23.440	25.000.000	26722	75.000.000	30.463	130.166.667	34.728	131.333.333	39.590	132.500.000
				Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2.178	2.018	2.301	50.000.000	2623	75.000.000	2.990	160.166.667	3.408	161.333.333	3.885	162.500.000
				Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	4.885	8.243	11.815	31.000.000	11800	94.700.000	11.786	159.166.667	11.786	160.333.333	11.786	161.500.000
				Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	12.011	15.528	16.201	18.800.000	16491	85.387.500	16.787	147.166.667	17.090	148.333.333	17.398	149.500.000

5.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel V.9 Rencana Aksi Bidang Pekerjaan Umum

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM																
	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur			Penduduk berakses air minum layak	Persen	82,36	82,36	83,56		84,38		85,19		85,98		86,76	
	Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman																
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Persen		82,36	83,56		84,38		85,19		85,98		86,76	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Persen		n/a	100	1.811.822.032	100	1.673.421.960	100	8.918.667.040	100	9.489.533.744	100	9.962.587.119
			Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	n/a	n/a	6	536.797.032	4	297.151.960	4	322.655.057	4	375.000.000	4	400.000.000
			Supervisi pembangunan/ peningkatan/ perluasan/ perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Optimalisasi sasi SPAM	Dokumen	n/a	n/a	2	1.300.000	2	250.000.000	3	330.000.000	3	350.000.000	3	380.000.000
			Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/ Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/ Detik	n/a	n/a	n/a	10.800.000	25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000
			Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/ SPAM Berbasis Masyarakat	SR	n/a	n/a		n/a	50	5.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000
			Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/ Detik	n/a	n/a		n/a	30	5.000.000	30	1.202.165.000	30	1.454.302.062	30	1.601.332.269
			Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan	Liter/ Detik	n/a	n/a	n/a	237.450.000	5	5.000.000	5	448.176.983	5	492.994.682	5	542.294.150
			Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM	SR	n/a	n/a	882	15.800.000	100	299.250.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM																
				IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu													
			Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM yang diperbaiki	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
			Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	Penyelenggara SPAM	n/a	n/a	n/a	n/a	1	5.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
			Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Badan Usaha	n/a	n/a	n/a	n/a	1	5.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
			Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Kelompok Masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	20	50.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000
			Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1	5.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000
			Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1	5.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000
			Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkatkan kinerjanya	Penyelenggara SPAM	n/a	n/a	2	204.875.000	5	88.270.000	5	197.835.000	5	217.618.500	5	239.380.350
			Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1	5.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000
			Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1	5.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000
			Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan	Rumah Tangga	n/a	n/a	n/a	n/a	5	5.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM																
				Jaringan Perpipaan													
			Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Jumlah Peningkatan Kapasitas SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	2	5.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000
			Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM Perdesaan	SR	n/a	n/a	400	804.800.000	320	917.000.000	330	1.620.000.000	430	1.782.000.000	450	1.960.200.000
			Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000
			Perbaiki SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000
	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur			Penduduk berakses sanitasi yang layak	Persen	84,83	84,83	87,86		90,89		93,92		96,95		100	
	Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Persen	84,83	84,83	87,86		89,89		91,92		93,95		95,98	
			<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak</i>	<i>Persen</i>		84,83	87,86	3.934.842.612	89,89	3.942.288.417	91,92	5.436.888.693	93,95	5.500.577.563	95,98	5.650.635.319
			Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	n/a	n/a	7	249.800.000	1	633.851.960	1	317.670.240	1	317.670.240	1	317.670.240
			Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen	n/a	n/a	3	56.950.000	1	121.950.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000
			Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan	Rumah Tangga	n/a	n/a	n/a	n/a	100	3.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja								
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM																	
					Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota													
				Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	Rumah Tangga Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	100	1.428.900.000	100	2.006.271.040	100	2.069.959.910	100	2.220.017.666
				Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Rumah Tangga	n/a	n/a	275	1.224.300.000	50	3.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000
				Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	n/a	n/a	172	610.100.000	60	540.000.000	60	644.000.000	60	644.000.000	60	644.000.000
				Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	60	14.750.000	60	10.000.000	60	10.000.000	60	10.000.000
				Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok	n/a	n/a	11	144.467.500	10	197.502.500	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000
				Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	n/a	n/a	180	557.982.000	150	50.000.000	150	399.980.000	150	399.980.000	150	399.980.000
				Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit	n/a	n/a	1	634.618.112	2	928.333.957	2	659.967.413	2	659.967.413	2	659.967.413
				Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1	3.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
				Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	n/a	n/a	345	456.625.000	60	3.000.000	60	450.000.000	60	450.000.000	60	450.000.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja								
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM																	
				Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1	3.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
				Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	n/a	n/a	n/a	n/a	100	3.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000
				Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	M ³ /Hari	n/a	n/a	n/a	n/a	20	3.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000
				Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	M ³ /Hari	n/a	n/a	n/a	n/a	5	3.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000
				Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1	3.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000

5.2.4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel V.10 Rencana Aksi Bidang Perumahan Rakyat

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT																
	Meningkatkan kualitas rumah dan kawasan permukiman			Penanganan kawasan kumuh	persen	92,49	92,49	10,59		21,18		31,77		42,36		52,95	
	Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	persen	100	100	100		100		100		100		100	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	<i>Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/ relokasi</i>	<i>jenis</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>1</i>	<i>328.300.000</i>	<i>6</i>	<i>28.476.250</i>	<i>5</i>	<i>33.000.000</i>	<i>5</i>	<i>33.000.000</i>	<i>5</i>	<i>33.000.000</i>
			<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>														
			Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Dokumen	n/a	n/a	2	328.300.000	1	3.476.250	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
			Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
			Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
			Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/ Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
			Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
			Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1	5.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT																
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	20	337.387.500	10	1.020.000.000	10	1.020.000.000	10	600.000.000
			Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah		n/a	n/a	n/a	10	213.137.500	10	200.000.000	10	200.000.000	4	80.000.000
			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen		n/a	n/a	n/a	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
			Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Ha M		n/a	n/a	n/a	1000	5.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000
			Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terbangun Jumlah Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Unit Rumah Unit		n/a	n/a	n/a	10	104.250.000	10	500.000.000	10	500.000.000	4	200.000.000
			Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terbangun	Unit Rumah Unit		n/a	n/a	n/a	5	5.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000
			Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah			n/a	n/a	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000



5.2.5. Bidang Trantibumlinmas

Tabel V.11 Rencana Aksi Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS																
	A. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Peningkatan penegakan perda 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan munculnya gangguan keamanan dan ketertiban		Persentase gangguan trantribum yang dapat di selesaikan	persen	100	100	100		100		100		100		100	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen		100	100		100		100		100		100	
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	persen		100	100	2.272.595.030	100	2,810,910,540	100	4.328.280.135	100	1.976.423.909	100	2.760.306.301
			Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kasus		300		1.159.279.480	300	1,091,397,840	300	3.338.274.954	300	1.087.418.211	300	1.562.400.034
			Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus		300		357.501.800	300	668,976,800	300	416.526.928	300	358.329.620	300	504.312.582
			Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Dokumen		12			12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000
			Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		12		340.304.250	12	281,575,450	12	443.405.803	12	407.796.383	12	536.626.021

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS																
	A. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum																
			Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang		100		414.547.000	100	761,335,450	100	113.552.450	100	104.907.695	100	137.398.464
			Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen		12			12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000
			Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit		30	962.500	30	5,625,000	30	14.520.000	30	15.972.000	30	17.569.200	
			Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen		12		12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	
			Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan		12		12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	
			<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota</i>	<i>Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti</i>	<i>persen</i>		100	100	832.231.759	100	972,415,727	100	558.680.353	100	564.548.388	100	676.003.226
			Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/ Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	Laporan		12	35.407.000	12	97,550,000	12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	



No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS																
	A. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum																
			Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan		12		222.130.000	12	423,717,500	12	104.439.250	12	105.683.175	12	128.051.492
			Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan		12		416.481.808 (tanpa DBH- CHT)	12	451,148,227	12	437.241.103	12	441.865.213	12	530.951.734
			<i>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota</i>	<i>Capaian kegiatan pembinaan PPNS</i>	<i>persen</i>		100			100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000
			Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan		12			12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000

Tabel V.12 Rencana Aksi Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS																
	B. Sub Urusan Bencana																
	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana	1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan; 2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu; 3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik; 4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; 5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; 6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; 7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,89	0,9	0,91		0,92		0,93		0,94		0,95		
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	20	20	25		30		35		40		45		
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100	100	100		100		100		100		100		
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	100		100		100		100		100		
			Indeks Pemulihan Pascabencana	Angka	n/a	n/a	n/a		45		55		60		65		
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Capaian Kinerja Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	persen	n/a	30	50	828.565.000	60	1.557.312.659	65	110.000.000	66	551.000.000	70	121.000.000	
		Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0		0	-	0	-	1	430.000.000	0	-	
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jenis	3	3	3	828.565.000									



No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang					3.000	1.557.312.659	1.700	110.000.000	1.800	121.000.000	1.800	121.000.000
			<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	<i>Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	<i>persen</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>59</i>	<i>1.699.254.000</i>	<i>65</i>	<i>1.794.892.260</i>	<i>70</i>	<i>2.270.000.000</i>	<i>75</i>	<i>1.960.000.000</i>	<i>80</i>	<i>2.261.000.000</i>
			Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	n/a	n/a	n/a	-	0	-	0	-	0	-	1	400.000.000
			Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana meningkat 80% dari jumlah peserta	Orang	n/a	n/a	272	447.995.000								
				Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang					650	412.065.700	400	600.000.000	400	600.000.000	400	600.000.000
			Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	n/a	n/a		12	15.950.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000
			Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyediaan Peralatan Penanganan Bencana	Jenis	n/a	n/a	4	776.330.000								
				Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit					48	800.000.000	55	850.000.000	34	600.000.000	28	450.000.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	n/a	n/a	2	87.450.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
			Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	n/a	n/a	17	125.677.000	5	265.000.000	16	150.000.000	16	150.000.000	16	150.000.000
			Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen Inventarisasi, Pemulihan Pasca Bencana	Dokumen	n/a	0	1	10.235.000								
				Rekonstruksi Pasca Bencana	lokasi	24	26	0									
			Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	n/a	n/a	30	29.992.000	20	59.976.680	28	100.000.000	28	100.000.000	28	100.000.000
			Penyusunan rencana kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	n/a	n/a	1	100.650.000	1	91.550.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
			Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Simulasi Penanganan Bencana	Lokasi	n/a	n/a	14	120.925.000								
				Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang				250	100.349.880	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200
			Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	n/a	n/a	n/a	-	0	-	1	100.000.000	0	-	0	-
			Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	n/a	n/a	n/a	-	0	-	20	20.000.000	40	40.000.000	80	80.000.000
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	persen	100	100	100	167.314.170	100	241.439.150	100	273.000.000	100	280.500.000	100	291.050.000
			Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	n/a	n/a	-	-	2	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Respon cepat darurat bencana Kabupaten/ Kota	Laporan Koordinasi Teknis Respon Cepat Darurat Bencana SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	2	2	4	28.350.000	2	18.000.000	1	33.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
			Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kecamatan Orang	17	17	17	69.400.000	950	106.237.500	950	100.000.000	950	100.000.000	1.000	110.000.000
			Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jenis Orang	3	3	3	54.564.170	950	30.200.650	950	100.000.000	950	100.000.000	1000	100.000.000
			Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	n/a	n/a	n/a	-	1	77.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000
			Respon cepat bencana non alam epidemi/ wabah penyakit	Laporan Koordinasi Teknis Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	1	1	1	15.000.000	2	5.001.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	persen	n/a	n/a	75	179.504.500	82	283.630.000	85	415.000.000	87	369.300.000	90	361.191.000
			Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	n/a	n/a	0030	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	11.000.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	n/a	n/a	2	179.504.500	1	59.700.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000
			Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	n/a	n/a	n/a	-	0	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
			Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	n/a	n/a	n/a	-	12	8.400.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000
			Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	n/a	n/a	n/a	-	12	45.530.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000
			Penanganan pasca bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	n/a	n/a	n/a	-	2	160.000.000	2	270.000.000	2	217.300.000	2	200.491.000



Tabel V.13 Rencana Aksi Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS																
	C. Sub Urusan Pemadam Kebakaran																
	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana			Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	menit	14,48	14,46	< 15		< 15		< 15		< 15		< 15	
		1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan; 2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu; 3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik; 4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; 5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; 6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; 7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.															
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	100	100	100		100		100		100		100	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	persen	n/a	85	86	403.930.000	86	426.125.000	87	315.000.000	87	366.500.000	89	403.150.000
		Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		Simulasi Penanganan Kebakaran	Kali	n/a	n/a	1	10.000.000								
				Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen					1	99.950.000	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000
		Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	Kali	n/a	130	150	48.180.000								
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan					84	42.000.000	150	80.000.000	150	88.000.000	150	96.800.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS																
	C. Sub Urusan Pemadam Kebakaran																
			Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kali	n/a	n/a	150	17.500.000								
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen					12	17.900.000	12	19.500.000	12	19.500.000	12	19.500.000
			Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	n/a	n/a	n/a	-	3	350.000	3	500.000	3	500.000	3	500.000
			Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Peserta Workshop Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kali	n/a	n/a	25	15.000.000								
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen					1	155.925.000	1	-	1	20.000.000	1	22.000.000
			Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran	Jenis	3	1	4	228.250.000								
				Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit					287	378.030.750	5	90.000.000	4	100.000.000	3	111.000.000



No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS																
	C. Sub Urusan Pemadam Kebakaran																
			Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran meningkat 80% dari jumlah peserta Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang Orang	n/a n/a	n/a n/a	120 80.000.000	80.000.000 -	120 -	110.000.000 -	120 5	100.000.000 5.000.000	120 5	110.000.000 5.000.000	120 5	121.000.000 5.000.000
			Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/ Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/ Kelurahan	n/a	n/a	0	-	0	-	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000
			Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Perjanjian Kerja Sama Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	n/a	n/a	1	5.000.000	0	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Capaian Kinerja Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	persen	n/a	n/a	65	25.000.000	66	30.599.970	67	35.000.000	70	35.000.000	75	35.000.000
			Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	n/a	n/a	n/a	-	1	3.600.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
			Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran meningkat 80% dari jumlah peserta	Orang	n/a	n/a	24	25.000.000								

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS																
	C. Sub Urusan Pemadam Kebakaran																
				Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen					30	26.999.970	60	30.000.000	60	30.000.000	60	30.000.000
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	persen	n/a	n/a	80	125.000.000	82	737.750.000	84	85.000.000	86	202.500.000	88	220.250.000
			Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Lokasi Orang	5	3	10	10.000.000	30	17.750.000	50	20.000.000	50	27.500.000	50	30.250.000
			Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Meningkat 80% dari Jumlah Peserta Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Orang Desa/ Kelurahan	n/a	20	48	110.000.000	67	660.000.000	3	5.000.000	10	105.000.000	10	110.000.000
			Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/ Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar	Jenis Dokumen	n/a	2	1	5.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	70.000.000	5	80.000.000
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	persen	n/a	n/a	100	20.000.000	100	88,675,000	100	60.000.000	100	62.000.000	100	74.200.000



No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja								
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS																	
	C. Sub Urusan Pemadam Kebakaran																	
				Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	n/a	n/a	n/a	-	10	1.750.000	10	2.000.000	10	2.000.000	10	2.000.000
				Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	n/a	n/a	n/a	-	1	2.475.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
				Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Jenis Unit	n/a	n/a	1	5.000.000	2	49.450.000	2	38.000.000	2	38.000.000	2	48.500.000
				Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi meningkat 80% dari jumlah peserta Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Orang Laporan	n/a	n/a	28	15.000.000	1	35.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000	1	18.700.000

5.2.6. Bidang Sosial

Tabel V.14 Rencana Aksi Bidang Urusan Sosial

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
6	Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar secara inklusif	1. Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga; 2. Peningkatan sarana prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial; 3. Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan; 4. Fasilitasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial kelompok difabel; 5. Pembangunan infrastruktur ramah difabel.		PPKS yang dilayani dan ditangani	persen	100	100	100		100		100		100		100	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti;	persen	80	80	75		75		75		80		80	
				Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani.	persen	n/a	n/a	70		70		70		80		80	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	persen		70	70	8.311.015.365	62	7.884.299.053	65	9.723.217.454	68	9.723.046.426	68	10.219.690.253
			Penyediaan Permakanan	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		900	900	6.663.755.037	900	6.531.540.880	900	6.938.225.874	900	6.938.054.846	900	7.216.557.436



No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
			Penyediaan Sandang	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang		20	20	153.000.000	50	7.000.000	50	7.435.854	50	7.435.854	50	7.734.148
			Penyediaan Alat Bantu	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis terdata di luar panti yang menerima alat bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang			5	14.125.000	10	5.000.000	10	5.311.324	10	5.311.324	10	5.524.391
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang		15	15	21.575.000	5	15125500	5	16.067.286	5	16.067.286	5	16.711.836
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Masyarakat yang diberikan pemahaman narkoba melalui sosialisasi dan workshop Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang			400	594.415.080	100	355615400	100	303.399.182	100	303.399.182	100	315.570.242
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga	Bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Kasus		5	5	2.000.000								

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
				Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang				20	12487500	20	13.265.032	20	13.265.032	20	13.797.167
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Kasus		5	78.633.048								
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang			50	86.691.940	50	92.089.795	50	92.089.795	50	95.784.039	
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Kasus		10	78.633.048								
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang			50	76681940	50	81.456.525	50	81.456.525	50	84.724.207	
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu fakir miskin dan rawan miskin	PMKS		20	63.350.000								
					jenis layanan data dan pengaduan yang dimiliki	layanan		3									



No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang					50	91.336.250	50	97.023.282	50	97.023.282	50	100.915.436
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Pembangunan lanjutan shelter kesejahteraan sosial Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Unit Orang		1	502.507.120		20	547.342.683	20	2.003.785.602	20	2.003.785.602	20	2.190.588.240
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	persen Orang		100	100	129.272.032	20	149.315.023	20	157.057.931	20	157.057.931	20	163.358.414
			Pemberian Layanan Rujukan	Koordinasi lintas sektor penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kali Orang Orang		2	9750000		10	7625000	10	8.099.769	10	8.099.769	10	8.424.697
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	persen		100	100	134.391.500	80	332824750	85	178.810.626	85	178.810.626	85	316.725.626
			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				95.991.500	100	167649850	100	36.182.962	100	36.182.962	100	64.148.619
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang				12.275.000	50	30550000	50	6.593.441	50	6.593.441	50	11.689.485

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja SPM pada awal perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja							
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota	Unit			5075000	75	55075000	75	118.865.398	75	118.865.398	75	210.448.984
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang			5550000	4	42050000	4	9.075.424	4	9.075.424	4	16.089.781
				Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang			15500000	15	37499900	15	8.093.401	15	8.093.401	15	14.348.756

5.3. INTEGRASI RENCANA AKSI PENERAPAN SPM KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM di Kabupaten Bantul ke dalam dokumen perencanaan daerah dilakukan melalui integrasi penerapan SPM ke dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Integrasi rencana penerapan SPM tersebut dilakukan pada saat perumusan:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Secara khusus rencana penerapan SPM di dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

5.3.1. SPM Bidang Pendidikan

Rencana penerapan SPM Bidang Pendidikan yang tertuang di dalam Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 meliputi:

1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM Bidang Pendidikan berupa:

Tabel V.15 Kinerja Penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan

Indikator	Capaian Kinerja 2021	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
Persentase capaian SPM Pendidikan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase capaian SPM Pendidikan SD	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase capaian SPM Pendidikan SMP	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%

2. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan berupa:

Tabel V.16 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	Persen	n/a	100	91.970.069.372,0 0	100	92.470.069.372,0 0	100	92.922.332.372,0 0	100	93.342.756.372,0 0	100	99.342.756.372,0 0
1.01.02.2. 01	<i>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</i>	<i>Persentase capaian SPM Pendidikan SD</i>	Persen	n/a	100	39.983.230.444,0 0	100	40.096.270.444,0 0	100	40.293.533.444,0 0	100	40.713.957.444,0 0	100	40.530.470.360,0 0
1.01.02.2. 01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru	paket	3	n/a	-								
		Ruang Kelas Baru bertambah	Ruang				3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	100.000.000,00	3	10.000.000,00
1.01.02.2. 01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	paket	4	n/a	-								
		Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	Ruang				4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	100.000.000,00	4	10.000.000,00
1.01.02.2. 01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	paket	2	n/a	-								
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/ Berat	Unit				2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	100.000.000,00	2	10.000.000,00

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.02.2. 01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Perlengkapan Siswa	paket	1	1									
		Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa	Unit				1	15.000.000,00	1	93.000.000,00	1	93.000.000,00	1	10.000.000,00
1.01.02.20 1.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Peserta Didik		5859 0	38.885.765.000,0 0	5859 0	38.885.765.000,0 0	5859 0	38.885.765.000,0 0	5859 0	38.885.765.000,0 0	5859 0	39.248.277.916,0 0
1.01.02.2. 01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Laporan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	dokumen	1	n/a	-								
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang				1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00



Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.02.2. 02	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase capaian SPM Pendidikan SMP	persen	n/a	100	21.655.398.448,0 0	100	21.876.358.448,0 0	100	21.961.358.448,0 0	100	21.961.358.448,0 0	100	24.327.358.448,0 0
1.01.02.2. 02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru	paket	n/a	n/a	-								
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Ruang				n/a	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
1.01.02.2. 02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	paket	1	n/a	-								
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/ Berat	Ruang				1	92.960.000,00	1	62.960.000,00	1	62.960.000,00	1	62.960.000,00
1.01.02.2. 02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Perlengkapan Siswa	paket	n/a	n/a	-								
		Perlengkapan Siswa yang Tersedia	paket				1	15.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	993.000.000,00
1.01.02.20 2.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Peserta Didik		2479 0	20.648.888.208,0 0	2479 0	20.648.888.208,0 0	2479 0	20.648.888.208,0 0	2479 0	20.648.888.208,0 0	2479 0	21.148.888.208,0 0
1.01.02.2. 02.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	paket	n/a	n/a	-								

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Perlengkapan Belajar Peserta Didik yang Tersedia	paket				1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
1.01.02.2. 02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa	paket	96	n/a	-								
		Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	paket				1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
1.01.02.2. 02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Laporan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	dokumen	1	n/a	-								
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang				1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
1.01.02.2. 03	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD	persen	n/a	100	25.636.870.240,00	100	25.714.870.240,00	100	25.799.870.240,00	100	25.799.870.240,00	100	28.165.870.240,00
1.01.02.2. 03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	paket	4	n/a	-								



Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Terbangun	Unit				1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
1.01.02.2. 03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	paket	2	n/a	-								
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Unit				1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
1.01.02.2. 03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	paket	1	n/a	-								
		Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Terehabilitasi Sedang/ Berat	Unit				1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
1.01.02.20 3.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Perlengkapan Siswa PAUD	paket	n/a	n/a	-								
		Perlengkapan Siswa PAUD yang Tersedia	paket				1	15.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	993.000.000,00
1.01.02.2. 03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Laporan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	paket	1	n/a	-								

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Peserta Didik				450	135.000.000,00	450	135.000.000,00	450	135.000.000,00	450	635.000.000,00
1.01.02.2. 03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Laporan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	dokumen	1	n/a	-								
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Orang				1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
1.01.02.2. 03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Laporan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	dokumen		1	497.470.240,00								
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan				1295	497.470.240,00	1295	497.470.240,00	1295	497.470.240,00	1295	497.470.240,00
1.01.02.2. 04	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	persen		100	4.694.570.240,00	100	4.782.570.240,00	100	4.867.570.240,00	100	4.867.570.240,00	100	6.319.057.324,00



Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.02.2. 04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	paket		n/a	-								
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Terbangun	Unit				1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
1.01.02.2. 04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	paket		n/a	-								
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Terehabilitasi Sedang/ Berat	Unit				1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
1.01.02.2. 04.09	Pengadaan perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	paket		n/a	-								
		Perlengkapan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	paket				1	20.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	1.061.487.084,00

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.02.20 4.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Peserta Didik				2592	4.677.570.240,00	2592	4.677.570.240,00	2592	4.677.570.240,00	2592	5.177.570.240,00
1.01.02.20 4.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	paket		n/a	-								
		Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	paket				1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	persen		66	217.410.642.120,00	70	217.710.642.120,00	75	218.010.642.120,00	79	218.310.642.120,00	83	220.810.642.120,00
1.01.04.2. 01	<i>Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</i>	<i>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal</i>	<i>guru</i>	8339	8339	217.410.642.120,00	8339	217.710.642.120,00	8339	218.010.642.120,00	8339	218.310.642.120,00	8339	220.810.642.120,00



Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.04.2. 01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	guru	8339	8339	217.234.407.000, 00								
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Dokumen				1	217.534.407.000, 00	1	217.834.407.000, 00	1	218.134.407.000, 00	1	220.634.407.000, 00
1.01.04.2. 01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	Penataan Pendistribusian PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	guru	8339	8339	176.235.120,00								

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp								
	Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Laporan			1	176.235.120,00	1	176.235.120,00	1	176.235.120,00	1	176.235.120,00	



5.3.2. SPM Bidang Kesehatan

Rencana penerapan SPM Bidang Kesehatan yang tertuang di dalam Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 meliputi:

1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kesehatan dalam rangka pemenuhan SPM Bidang Kesehatan berupa:

Tabel V.17 Kinerja Penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan

Indikator	Capaian Kinerja 2021	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan kesehatan balita	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Palayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Palayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Palayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Palayanan kesehatan orang denga tuberkulosis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIS	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan berupa :

Tabel V.18 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	indeks	1	1	21.022.955.117	1	24.842.065.331	1	22.369.095.882	1	26.822.863.349	1	22.196.026.290
1.2.2.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	indeks	1	1	19.565.411.017	1	16.966.656.980	1	16.931.378.480	1	16.822.434.399	1	16.975.733.645
1.2.2.2.02.1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14.265	13.958	3.359.647.470	14656	3.359.705.320	15.388	3.359.871.986	16.156	3.360.038.654	16.964	3.360.205.320
1.2.2.2.02.2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	13.599	13.958	95.142.150	14656	96.400.000	15.388	98.066.666	16.156	99.633.334	16.964	101.500.000



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.2.2.2.02.3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	12.959	12.689	76.817.150	15958	77.800.000	14.656	78.866.666	15.388	79.833.334	16.156	81.000.000
1.2.2.2.02.4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	60.739	56.531	111.122.150	56954	112.850.000	57.381	114.766.666	57.811	116.733.334	58.244	118.800.000
1.2.2.2.02.5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	121.590	121.590	270.504.650	121590	271.000.000	121.590	272.166.667	121.590	273.333.333	121.590	274.500.000
1.2.2.2.02.6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	510.405	583.788	173.067.150	665519	173.500.000	758.691	174.166.667	864.908	174.833.333	985.995	175.500.000
1.2.2.2.02.7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	132.562	133.887	175.892.150	135226	176.000.000	136.579	177.166.667	137.945	178.333.333	139.324	179.500.000

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Sesuai Standar												
1.2.2.2.02.8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	60.570	69.050	127.942.150	78717	129.000.000	89.737	130.166.667	102.300	131.333.333	116.622	132.500.000
1.2.2.2.02.9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	20.563	23.440	127.942.150	26722	129.000.000	30.463	130.166.667	34.728	131.333.333	39.590	132.500.000
1.2.2.2.02.10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	2.018	2.301	158.442.150	2623	159.000.000	2.990	160.166.667	3.408	161.333.333	3.885	162.500.000



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.2.2.2.02.11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	8.243	11.815	157.642.150	11800	158.000.000	11.786	159.166.667	11.786	160.333.333	11.786	161.500.000
1.2.2.2.02.12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	15.528	16.201	145.742.150	16491	146.000.000	16.787	147.166.667	17.090	148.333.333	17.398	149.500.000



5.3.3. SPM Bidang Pekerjaan Umum

Rencana penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum yang tertuang di dalam Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 meliputi:

1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dalam rangka pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum berupa :

Tabel V.19 Kinerja Penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum

Indikator	Capaian Kinerja 2021	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
Persentase rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan bukan jaringan perpipaan terlindungi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum berupa:

Tabel V.20 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Persen	82,36	83,56	1.684.064.441	84,38	8.744.242.764	85,19	8.918.667.040	85,98	9.489.533.744	86,76	9.962.587.119
1.03.03.2.01	<i>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase rumah tangga dengan akses air bersih</i>	Persen	n/a	100	1.684.064.441	100	8.744.242.764	100	8.918.667.040	100	9.489.533.744	100	9.962.587.119
1.03.03.2.01.01	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum	Dokumen	n/a	12	97.670.240								
		Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Air Minum	Dokumen	n/a	1									
		Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Penyediaan Air Minum	Dokumen	n/a	1									

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	n/a	n/a		4	306.959.143	4	322.655.057	4	375.000.000	4	400.000.000
1.03.03.2.01.02	Supervisi pembangunan/ peningkatan/ perluasan/ perbaikan SPAM	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Minum	Dokumen	n/a	1	100.000.000								
		Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Optimasi SPAM	Dokumen	n/a	n/a		2	250.000.000	3	330.000.000	3	350.000.000	3	380.000.000
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/ Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/Detik	n/a	n/a		25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/ SPAM Berbasis Masyarakat	SR	n/a	n/a		50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dokumen	n/a	2	8.500.000								
		Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	n/a	2									
		Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan	Liter/Detik	n/a	n/a		30	1.220.150.000	30	1.202.165.000	30	1.454.302.062	30	1.601.332.269



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		atau SPAM Tematik Tertentu												
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit	n/a	75	370.394.201								
		Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan	Liter/Detik	n/a	n/a		5	407.433.621	5	448.176.983	5	492.994.682	5	542.294.150
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	n/a	n/a		100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000
1.03.03.2.01.08	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM yang diperbaiki	unit	n/a	n/a		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
1.03.03.2.01.09	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	Penyelenggara SPAM	n/a			1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.03.03.2.01.10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Badan Usaha	n/a			1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Kelompok Masyarakat	n/a			20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000
1.03.03.2.01.12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitas kerjasama	Unit	n/a			1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000
1.03.03.2.01.13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama	Unit	n/a			1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000
1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum	Dokumen	n/a	5	163.500.000								
		Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	Penyelenggara SPAM	n/a	n/a			5	179.850.000	5	197.835.000	5	217.618.500	5



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.03.03.2.01.15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit	n/a	n/a		1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000
1.03.03.2.01.16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit	n/a	n/a		1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000
1.03.03.2.01.17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan perpipaan	Rumah Tangga	n/a	n/a		5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000
1.03.03.2.01.18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	unit	n/a	n/a		2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Perluasan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	unit	n/a	180	944.000.000								

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM Perdesaan	SR	n/a			320	1.600.000.000	330	1.620.000.000	430	1.782.000.000	450	1.960.200.000
1.03.03.2.01.20	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	n/a	n/a		1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000
1.03.03.2.01.21	Perbaiki SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	n/a	n/a		1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Persen	84,83	87,86	4.896.417.653	89,89	5.351.716.994	91,92	5.436.888.693	93,95	5.500.577.563	95,98	5.650.635.319
1.03.05.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Persen	84,83	87,86	4.896.417.653	89,89	5.351.716.994	91,92	5.436.888.693	93,95	5.500.577.563	95,98	5.650.635.319
1.03.05.2.01.01	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Data Teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air Limbah	Dokumen	12	12	217.670.240								



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja										
					2022		2023		2024		2025		2026		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Hasil Perencanaan Teknis Air Limbah	Dokumen	1	1										
		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	n/a	n/a			1	317.670.240	1	317.670.240	1	317.670.240	1	317.670.240
		Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Limbah	Dokumen	1	1	55.000.000									
1.03.05.2.01.02	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen	n/a	n/a			1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga	n/a	n/a			100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000



RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	Unit	n/a	n/a	100	1.921.099.341	100	2.006.271.040	100	2.069.959.910	100	2.220.017.666	
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Unit rumah tersambung pada Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Unit	350	350		2.100.000.000							
		Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Rumah Tangga	n/a	n/a	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	unit	60	60		644.000.000							
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	n/a	0	60	644.000.000	60	644.000.000	60	644.000.000	60	644.000.000	
1.03.05.2.01.07	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik	Orang	n/a	0	60	10.000.000	60	10.000.000	60	10.000.000	60	10.000.000	



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja										
					2022		2023		2024		2025		2026		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Air Limbah Domestik													
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Dokumen	2	2	369.800.000									
		Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok	n/a		0		10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000
1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dukungan Operasional Sekber Kartamantul	tahun	1	1										
		Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan animas	dokumen	1	1										
		Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat	dokumen	1	1	399.980.000									
		Laporan pelaksanaan kegiatan	dokumen	1	1										



RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		sosialisasi sanimas												
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	n/a	0		150	399.980.000	150	399.980.000	150	399.980.000	150	399.980.000
1.03.05.2.01.10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL	dokumen	12	12	659.967.413								
		Operasional IPAL Bambanglipuro	bulan	12	12									
		Sewa lahan IPAL Bambanglipuro	tahun	1	1									
		Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit	n/a	0		2	659.967.413	2	659.967.413	2	659.967.413	2	659.967.413
1.03.05.2.01.11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dokumen	n/a		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	unit	60	60	450.000.000								



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Skala Permukiman												
		Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	n/a			60	450.000.000	60	450.000.000	60	450.000.000	60	450.000.000
1.03.05.2.01.13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	n/a			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
1.03.05.2.01.14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	n/a			100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	M ³ /Hari	n/a			20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000
1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	M ³ /Hari	n/a			5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000
1.03.05.2.01.17	Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen	n/a			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000



5.3.4. SPM Bidang Perumahan Rakyat

Rencana penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat yang tertuang di dalam Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 meliputi:

1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dalam rangka pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat berupa:

Tabel V.21 Kinerja Penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan Rakyat

Indikator	Capaian Kinerja 2021	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi program pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat berupa:

Tabel V.22 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	persen	100	100	3.788.800.826	100	4.784.865.801	100	4.813.352.381	100	4.984.687.619	100	4.499.156.802
1.04.02.2.01	<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	<i>Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/ relokasi</i>	<i>jenis</i>	<i>n/a</i>	1	75.000.000	2	140.000.000	5	33.000.000	5	33.000.000	5	33.000.000
1.04.02.2.01.01	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Identifikasi	dokumen	<i>n/a</i>	1	75.000.000								
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Dokumen	<i>n/a</i>	0			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1
1.04.02.2.01.02	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	<i>n/a</i>			1	40.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	<i>n/a</i>			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
1.04.02.2.01.04	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/ Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	<i>n/a</i>			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi	Dokumen	n/a			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
1.04.02.2.01.06	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	n/a	n/a		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
1.04.02.2.03	<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi</i>	<i>unit</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	20	1.020.000.000	10	1.020.000.000	10	1.020.000.000	10	600.000.000
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	n/a			10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	4	80.000.000
1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
1.04.02.2.03.03	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	M	n/a			1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000
1.04.02.2.03.04	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Unit	n/a			10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	4	200.000.000
1.04.02.2.03.05	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi	Unit	n/a			5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000



Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Kabupaten/ Kota yang Terbangun												
1.04.02.2.03.06	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit	n/a			5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000



5.3.5. SPM Bidang Trantibumlinmas

Rencana penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang tertuang di dalam Perubahan Renstra BPBD dan Perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026 meliputi:

1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat berupa:

Tabel V.23 Kinerja Penyelenggaraan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Indikator	Capaian Kinerja 2021	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
I. PERUBAHAN RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2021-2026						
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II. PERUBAHAN RENSTRA BPBD TAHUN 2021-2026						
Penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB)	71,43%	85,71%	100%	100%	100%	100%
Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana	25%	30%	35%	40%	45%	50%
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	75%	87,5%	100%	100%	100%	100%
Pembuatan Rencana Kontijensi (Rekon)	28,57%	33,33%	55,56%	55,56%	77,78%	100%
Pelatihan pencegahan dan mitigasi	4%	5%	6%	8%	10%	15%
Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	30%	50%	55%	60%	65%	70%
Respon cepat kejadian luar biasa (KLB)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator	Capaian Kinerja 2021	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
penyakit/wabah zoonosis prioritas						
Respon cepat darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan untuk pemenuhan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat berupa:

Tabel V.24 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

A. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2021 – 2026

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	100	100	2.384.412.000	100	2.479.788.771	100	4.887.460.448	100	2.541.472.297	100	3.436.809.527
1.05.02.2-01	<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti</i>	persen	100	100	1.922.692.980	100	1.971.397.541	100	4.328.280.135	100	1.976.423.909	100	2.760.306.301
1.05.02.2-01.01	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan	Laporan intel kewilayahan	Dokumen	12	12	1.104.506.880								
		Laporan patroli kewilayahan	Dokumen	12	12									
		Laporan pengamanan kewilayahan	Dokumen	12	12									
		Laporan pengawasan pejabat	Dokumen	12	12									
		Laporan pengendalian operasi kewilayahan	Dokumen	12	12									
		Patroli kewilayahan	kali	288	288									



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	300			300	1.071.392.831	300	3.338.274.954	300	1.087.418.211	300	1.562.400.034
1.05.02.2-01.02	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Laporan pelaksanaan penertiban kewilayahan	Dokumen	12	12	345.476.800								
		Laporan pelanggaran dan pengaduan transtibum yang ditangani	Dokumen	12	12									
		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	300			300	378.524.480	300	416.526.928	300	358.329.620	300	504.312.582

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.05.02.2-01.03	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Dokumen	12			12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000
1.05.02.2-01.04	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Laporan pemberdayaan Linmas	dokumen	12	12	366.864.300								
		Satlinmas Rescue Istimewa yang terlatih dan dikukuhkan	orang	99	99									
		Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	orang	100	100									
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12			12	403.050.730	12	443.405.803	12	407.796.383	12	536.626.021
1.05.02.2-01.05	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bemuansa Hak Asasi Manusia	Peserta pelatihan bemuansa hak asasi manusia	orang	100	100	93.845.000								
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang	Orang	100				100	103.229.500	100	113.552.450	100	104.907.695	100



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Ditingkatkan Kapasitasnya												
1.05.02.2-01.06	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	12			12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000
1.05.02.2-01.07	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketertarikan dan ketertiban umum	Sarpras Minimal Trantibum yang dipenuhi	jenis	3	3	12.000.000								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	30			30	13.200.000	30	14.520.000	30	15.972.000	30	17.569.200
1.05.02.2-01.08	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat yang Telah Dibuak dan Dimutakhirkan	Dokumen	12			12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000
1.05.02.2-01.09	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	12			12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000
1.05.02.2-02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	persen	100	100	461.719.020	100	507.891.230	100	558.680.353	100	564.548.388	100	676.003.226

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.05.02.2-02.01	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	12			12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000
1.05.02.2-02.02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Peserta Sosialisasi Pengawasan dan kepatuhan pelaksanaan perda dan perbup	orang	100	100	92.925.000								
		Review SOP dalam penegakan Perda dan Perkada	dokumen	1	1									
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	12			12	85.217.500	12	104.439.250	12	105.683.175	12	128.051.492
1.05.02.2-02.03	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan sidang	dokumen	12	12	368.794.020								
		Laporan yustisi dan non yustisi	laporan		4									
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang	Laporan	12			12	405.673.730	12	437.241.103	12	441.865.213	12	530.951.734



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Dapat Ditangani Sesuai SOP												
1.05.02.2-03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan pembinaan PPNS	persen	100			100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000
1.05.02.2-03.01	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	12			12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000

B. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 - 2026

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	20	25		30		35		40		45	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	persen	100	100		100		100		100		100	
						3.190.686.000		2.855.000.000		3.068.000.000		3.160.800.000		3.034.241.000

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		kesiapsiagaan terhadap bencana												
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100		100		100		100		100	
		Indeks Pemulihan Pascabencana	Angka	n/a	n/a		45		55		60		65	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	persen	30	50	10.000.000	60	100.000.000	65	110.000.000	66	551.000.000	70	121.000.000
1.05.03.2.01.01	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	1	430.000.000	0	-
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	jenis	3	3	10.000.000								
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang				1680	100.000.000	1.700	110.000.000	1.800	121.000.000	1.800	121.000.000
1.05.03	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	persen	n/a	59	2.974.961.000	65	2.050.000.000	70	2.270.000.000	75	1.960.000.000	80	2.261.000.000
1.05.03.2.02.01	Penyusunan rencana penanggulangan	Penyediaan/ pemutakhiran dokumen rencana	dokumen	0	0	-								



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	bencana Kabupaten/Kota	penanggulangan bencana Kabupaten												
		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen			0	-	0	-	0	-	1	400.000.000	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana meningkat 80% dari jumlah peserta	orang	2300	272	405.532.000								
		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang			400	600.000.000	400	600.000.000	400	600.000.000	400	600.000.000	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Pengendalian Operasi	dokumen	0	0	-								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen				12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000
1.05.03.2.02.04	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyediaan Peralatan Penanganan Bencana	jenis	n/a	4	210.000.000								
		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit				48	800.000.000	55	850.000.000	34	600.000.000	28	450.000.000
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana	dokumen	n/a	4	10.000.000								
		Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko	Dokumen				1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Tinggi Menimbulkan Bencana												
1.05.03.2.02.06	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Pembentukan FPRB Kecamatan	Kecamatan	0	17	129.927.000								
		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan				8	150.000.000	16	150.000.000	16	150.000.000	16	150.000.000
1.05.03.2.02.07	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen Inventarisasi, Pemulihan Pasca Bencana	Dokumen	0	1	1.810.235.000								
		Rekonstruksi Pasca Bencana	lokasi	26	19									
1.05.03.2.02.08	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana meningkat 80% dari jumlah peserta	orang	0	24	29.992.000								
		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang				28	100.000.000	28	100.000.000	28	100.000.000	28	100.000.000
1.05.03.2.02.09	Penyusunan rencana kontinjensi	Penyediaan/ pemutakhiran dokumen rencana kontinjensi	dokumen	0	2	200.875.000								
		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen				2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
1.05.03.2.02.10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Simulasi Penanganan Bencana	lokasi	0	14	158.400.000								
		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang				100	50.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000
1.05.03.2.02.11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Penyediaan/ pemutakhiran dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen	0	0	20.000.000								



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen				0	-	1	100.000.000	0	-	0	-
1.05.03.2.02.12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	-	0	-	20	20.000.000	40	40.000.000	80	80.000.000
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	persen	100	100	185.250.000	100	270.000.000	100	273.000.000	100	280.500.000	100	291.050.000
1.05.03.2.03.01	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	n/a	0	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
1.05.03.2.03.02	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi Teknis Respon Cepat Darurat Bencana	Dokumen	n/a	4	28.350.000								
		SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen				1	33.000.000	1	33.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
1.05.03.2.03.03	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Kecamatan	17	17	69.400.000								
		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang				950	100.000.000	950	100.000.000	950	100.000.000	1.000	110.000.000
1.05.03.2.03.04	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jenis	3	3	72.500.000								
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang				950	100.000.000	950	100.000.000	950	100.000.000	1000	100.000.000

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.05.03.2.03.05	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan				1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000
1.05.03.2.03.06	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Laporan Koordinasi Teknis Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Dokumen	n/a	1	15.000.000								
		SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu					1	30.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	persen	n/a	75	20.475.000	82	435.000.000	85	415.000.000	87	369.300.000	90	361.191.000
1.05.03.2.04.01	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	n/a	1	20.475.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	11.000.000
1.05.03.2.04.02	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/ Kota	Laporan Laporan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Dokumen	n/a	1									
		Laporan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	n/a	1									
		Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	n/a	1									
		Laporan Operasional Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten	Dokumen	n/a	1									
		Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Bencana	Dokumen	n/a	2									
		Perjanjian Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	n/a	1									



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen			1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	
1.05.03.2.04.03	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen			0	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen			12	50.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan			1	20.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	
1.05.03.2.04.06	Penanganan pasca bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen			2	295.000.000	2	270.000.000	2	217.300.000	2	200.491.000	

5.3.6. SPM Bidang Sosial

Rencana penerapan SPM Bidang Sosial yang tertuang di dalam Perubahan Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 meliputi:

1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial dalam rangka pemenuhan SPM Bidang Sosial berupa:

Tabel V.25 Kinerja Penyelenggaraan SPM Bidang Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian				
		Jumlah yang harus dilayani				
		2022	2023	2024	2025	2026
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial						
1.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0	0
2.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0	0
3.	Penyediaan permakanan	125	125	125	125	125
4.	Penyediaan sandang	105	105	105	105	105
5.	Penyediaan alat bantu	17	20	20	20	20
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan	135	140	140	140	140
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	105	110	110	110	110
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	105	110	110	110	110
9.	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	10	15	15	15	15
10.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	3818	3818	3818	3818	3818
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	30	30	30	30	30
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	38	25	25	25	25
13.	Layanan rujukan	30	35	35	35	35
14.	Layanan data dan pengaduan	3158	3160	3160	3160	3160
15.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	30	30	30	30	30
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial						
1.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi	0	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian				
		Jumlah yang harus dilayani				
		2022	2023	2024	2025	2026
	sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan					
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0	0
	3. Penyediaan permakanan	1475	1480	1480	1480	1480
	4. Penyediaan sandang	1475	1480	1480	1480	1480
	5. Penyediaan alat bantu	1	2	2	2	2
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	1475	1480	1480	1480	1480
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	1475	1480	1480	1480	1480
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas anak terlantar	1475	1480	1480	1480	1480
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	30	35	35	35	35
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	933	933	933	933	933
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	3	3	3
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	27	30	30	30	30
	13. Layanan rujukan	3	5	5	5	5
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	111	115	115	115	115
	15. Layanan data dan pengaduan	809	810	810	810	810
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial						
	1. Layanan data dan pengaduan	3676	3680	3680	3680	3680
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	0	0	0
	3. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	8	8	8	8	8
	4. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0	0
	5. Penyediaan permakanan	1411	1415	1415	1415	1415
	6. Penyediaan sandang	110	115	115	115	115
	7. Penyediaan alat bantu	9	15	15	15	15
	8. Penyediaan perbekalan kesehatan	370	375	375	375	375

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian				
		Jumlah yang harus dilayani				
		2022	2023	2024	2025	2026
9.	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	370	375	375	375	375
10.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar	370	375	375	375	375
11.	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	3	5	5	5	5
12.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	4564	4570	4570	4570	4570
13.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	10	10	10	10
14.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5	10	10	10	10
15.	Layanan rujukan	8	10	10	10	10
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial						
1.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	3	3	3	3	3
2.	Penyediaan permakanan	3	5	5	5	5
3.	Penyediaan sandang	3	5	5	5	5
4.	Penyediaan alat bantu	3	3	3	3	3
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan	40	40	40	40	40
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	40	40	40	40	40
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	40	40	40	40	40
8.	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	3	5	5	5	5
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	19	25	25	25	25
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	40	45	45	45	45
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	37	40	40	40	40
12.	Layanan rujukan	3	5	5	5	5
13.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0	0
14.	Layanan data dan pengaduan	14	20	20	20	20
15.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	0	0	0
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota						

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian				
		Jumlah yang harus dilayani				
		2022	2023	2024	2025	2026
	1. Penyediaan permakanaan	200	200	200	200	200
	2. Penyediaan sandang	21	21	21	21	21
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	75	75	75	75	75
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	200	200	200	200	200
	5. Pelayanan dukungan psikososial	12	12	12	12	12

2. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial berupa:

Tabel V.26 Rencana Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Bidang Sosial

Kode		Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti;	persen	80	75	8.938.751.920	75	9.188.751.920	75	9.788.924.104	80	9.788.751.920	80	10.288.751.920
		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani.	persen	n/a	70	70	70	70	70	80	80	80	80	80
1.6.4.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	persen	70	70	8.878.872.499	62	9.127.073.920	65	9.723.217.454	68	9.723.046.426	68	10.219.690.253
1.6.4.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima permakanan	Orang	900	900	6.736.434.814								
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					900	6.596.173.483	900	6.938.225.874	900	6.938.054.846	900	7.216.557.436
1.6.4.2.01.02	Penyediaan Sandang	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima sandang	Orang	20	20	5.488.947								
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota					50	7.069.268	50	7.435.854	50	7.435.854	50	7.734.148
1.6.4.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis terdata di luar panti yang menerima alat bantu	Orang		5	9.979.903								



Kode	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota				10	5.049.477	10	5.311.324	10	5.311.324	10	5.524.391
1.6.4.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Orang	15	15	2.993.971							
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota				5	15.275.174	5	16.067.286	5	16.067.286	5	16.711.836
1.6.4.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Masyarakat yang diberikan pemahaman narkoba melalui sosialisasi dan workshop	Orang		400	219.557.875							
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota				100	288.441.696	100	303.399.182	100	303.399.182	100	315.570.242
1.6.4.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Kasus	5	5	1.995.981							
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang				20	12.611.070	20	13.265.032	20	13.265.032	20
1.6.4.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Kasus		5	1.995.981							
		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang				50	87.549.797	50	92.089.795	50	92.089.795	50
1.6.4.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Kasus		10	1.995.981							

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Kode		Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang				50	77.440.743	50	81.456.525	50	81.456.525	50	84.724.207
1.6.4.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu fakir miskin dan rawan miskin	PMKS	20	20	99.799.034								
		jenis layanan data dan pengaduan yang dimiliki	layanan	3	3									
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang				50	92.240.064	50	97.023.282	50	97.023.282	50	100.915.436
1.6.4.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Pembangunan lanjutan shelter kesejahteraan sosial	Unit		1	1.719.040.282								
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang				20	1.788.207.672	20	2.003.785.602	20	2.003.785.602	20	2.190.588.240
1.6.4.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	persen	100	100	59.629.923								
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang				20	149.315.023	20	157.057.931	20	157.057.931	20	163.358.414
1.6.4.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Koordinasilintas sektor	Kali	2	2	19.959.808								
		penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Orang	10	10									
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang				10	7.700.453	10	8.099.769	10	8.099.769	10	8.424.697
1.6.6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	persen	57	100	250.582.500	100	250.582.500	100	518.608.626	1000	518.608.626	100	918.608.626



Kode		Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.6.6.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	persen	100	100	86.397.500	80	86.397.500	85	178.810.626	85	178.810.626	85	316.725.626
1.6.6.2.01.1	Penyediaan Makanan	Penyediaan Dapur Umum Bencana	jenis bahan	18	18	47.997.500								
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				100	47.997.500	100	36.182.962	100	36.182.962	100	64.148.619
1.6.6.2.01.2	Penyediaan Sandang	Buffer stok bantuan sandang	pakaian	20	20	12.275.000								
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang				50	12.275.000	50	6.593.441	50	6.593.441	50	11.689.485
1.6.6.2.01.3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Koordinasi lintas sektor penyiapan tempat pengungsian	desa	75	75	5.075.000								
		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota	Unit				75	5.075.000	75	118.865.398	75	118.865.398	75	210.448.984
1.6.6.2.01.4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	koordinasi lintas sektor penyediaan bantuan bagi kelompok rentan	jenis bahan	18	18	5.550.000								
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang				4	5.550.000	4	9.075.424	4	9.075.424	4	16.089.781
1.6.6.2.01.5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Korban bencana yang menerima pelayanan dukungan sosial	korban		10	15.500.000								
		Pendampingan Tagana	tagana		137									
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang				15	15.500.000	15	8.093.401	15	8.093.401	15	14.348.756

BAB. VI

MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN SPM

6.1. MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN SPM

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan tahapan untuk memastikan pencapaian SPM di Daerah sebagai rangkaian siklus pelaksanaan pencapaian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja Rencana Aksi Penerapan SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam mencapai target SPM. Secara prinsip, monitoring dilakukan saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana (tercapai atau tidak). Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Evaluasi dilakukan saat kegiatan selesai dilaksanakan guna memastikan apakah capaian sesuai dengan target. Bila ditemukan ketidaksesuaian antara target dan realisasi atau capaian maka digali informasi terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi, kemudian diupayakan rumusan solusi atau rekomendasi atas permasalahan atau kendala dimaksud. Hasil evaluasi menjadi input bagi kepentingan pelaksanaan kepentingan proses selanjutnya.

Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM sesuai dengan bidang urusannya secara internal dan berkala. Monitoring dan evaluasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Monitoring dan evaluasi penerapan SPM Daerah dikoordinasikan oleh Tim Penerapan SPM Daerah. Monitoring dan evaluasi oleh Tim Penerapan SPM Daerah dilaksanakan pada setiap akhir triwulan melalui rapat koordinasi dan/atau tinjauan lapangan jika diperlukan.

6.2. MEKANISME PELAPORAN PENERAPAN SPM

Pelaporan penerapan SPM dimatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 bahwa laporan penerapan SPM dimuat dalam Laporan



Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Laporan penerapan SPM juga dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi. Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 menyebutkan bahwa laporan penerapan SPM digunakan:

- a. untuk melihat perkembangan Penerapan SPM di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota;
- b. untuk perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat; dan
- c. sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Sistematika pelaporan penerapan SPM Daerah melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan laporan secara triwulan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

BAB. VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. KESIMPULAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, jenis SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul terdiri atas SPM: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial; dan penerapannya pada tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat, bidang sosial, dan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Mekanisme penerapan SPM mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan 4 (empat) tahapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu (1) pengumpulan data secara empiris sesuai standar teknis; (2) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (3) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (4) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, SPM telah menjadi prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara dan menjamin hak konstitusional masyarakat.

Kendala utama di dalam penerapan SPM di Kabupaten Bantul adalah nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM belum semuanya sesuai dengan nomenklatur yang tercantum dalam Aplikasi Pelaporan SPM (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id>) terutama pada tahun 2021-2022,

dan pendataan sesuai format tahapan penerapan SPM yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 belum dapat menghasilkan data yang lengkap sehingga penghitungan kebutuhan Jenis dan Mutu Layanan Dasar diperoleh dari proyeksi berdasarkan data capaian warga negara yang telah terlayani kebutuhan dasarnya pada tahun sebelumnya.

7.2. SARAN

Saran yang dapat diberikan untuk penerapan SPM di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Prioritas pemenuhan SPM ditujukan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa sasaran pemenuhan SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip “ketepatan sasaran” yaitu pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada Warga Negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.
2. Perlu adanya kegiatan terkait dengan pendataan warga negara secara empiris dan menyeluruh yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain atau kegiatan pendataan secara mandiri untuk melaksanakan tahap pertama yaitu pengumpulan data dari empat tahapan penerapan SPM.
3. Rencana pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan untuk menjamin akses terhadap Pelayanan Dasar bagi seluruh warga negara dengan prioritas warga tidak mampu/miskin dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah baik RPJMD/RKPD maupun Renstra OPD.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib memprioritaskan pemenuhan SPM sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dalam dokumen perencanaan daerah.
5. Anggaran untuk pemenuhan SPM wajib diprioritaskan dalam penyusunan Rancangan APBD setiap tahun dan Tim Anggaran Daerah memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun.
6. Perlu adanya skema pembiayaan yang memprioritaskan pemenuhan SPM baik melalui APBD, APBN, DAU, DAK, DID, dan Transfer Daerah maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan. Pembiayaan untuk pemenuhan SPM perlu dibedakan dengan pembiayaan non-SPM supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
7. Perlu adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat melalui kerjasama dengan daerah lain, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), BUMD, maupun organisasi non-pemerintah atau organisasi nirlaba yang peduli terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 8. Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar wajib memastikan anggaran pemenuhan SPM dilaksanakan tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat sasaran.
 9. Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah dianggarkan.
 10. Perlu dilakukan reviu terhadap Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM di Daerah ketika diperoleh hasil pendataan empiris yang lengkap dan adanya perubahan dokumen perencanaan Daerah saat terjadi pergantian periode kepemimpinan kepala daerah.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026, semoga dokumen Rencana Aksi ini dapat digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal; serta pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam upaya pencapaian SPM di Daerah.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH